



# **TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Disampaikan oleh:**

***Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D***

**Direktur Daerah Tertinggal, Terluar, dan Perdesaan - BAPPENAS**

**Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

**Samarinda, 17 Januari 2019**

**( 1 )**

## **Transformasi dan Akselerasi Pembangunan**

---

- Perencanaan Berbasis Pengetahuan
- Kerangka Pikir, Transformasi dan Akselerasi Pembangunan
- Konsistensi dan Sinergi

**( 2 )**

## **Sinkronisasi Kebijakan RPJMN dan RPJMD**

---

- Isu Strategis Nasional
- Skenario Pembangunan Nasional 2020-2024
- Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

**( 3 )**

## **Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kaltim**

---

- Skenario Pembangunan
- Prioritas Pembangunan
- Rencana Investasi

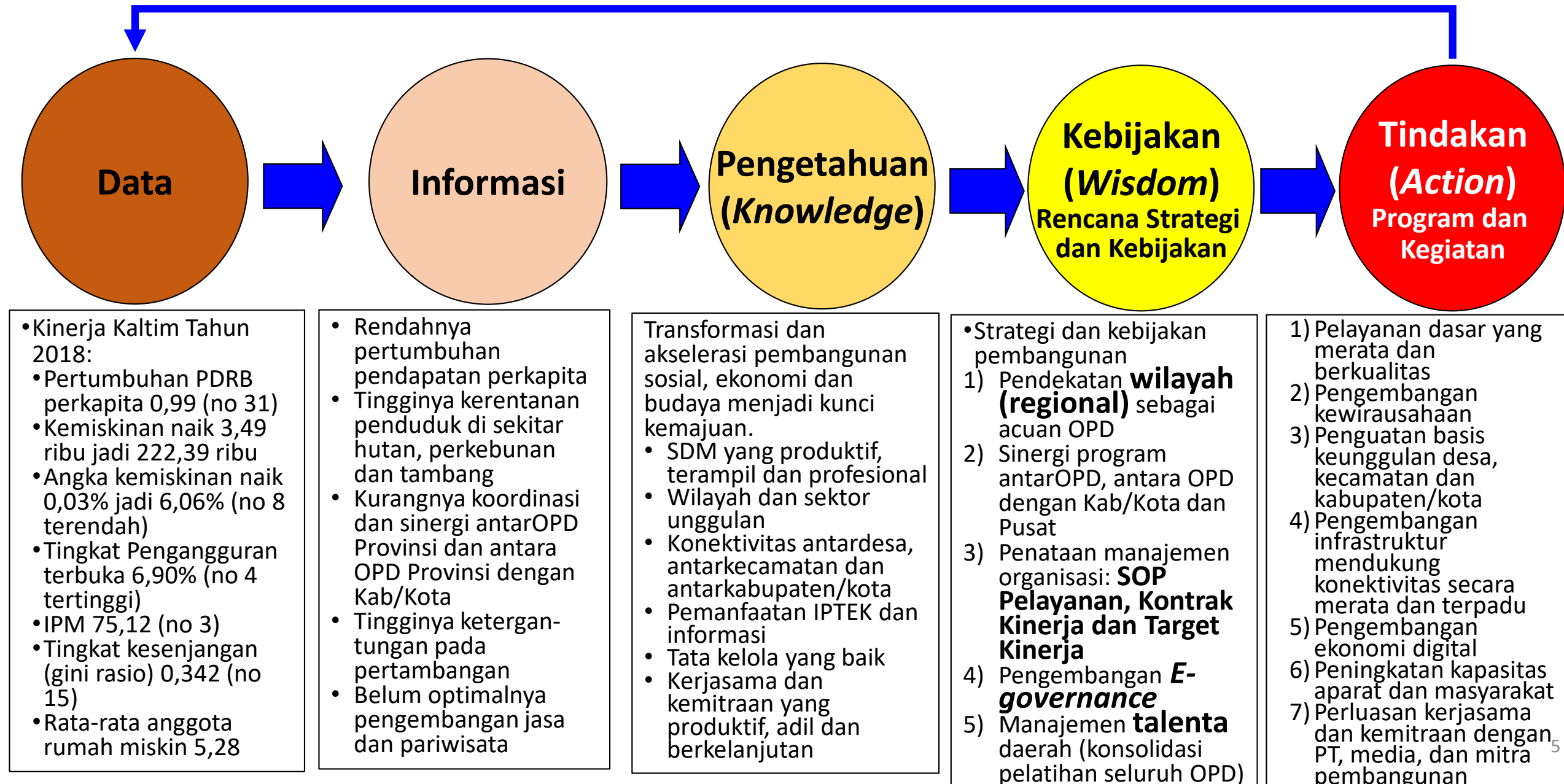
1

# **TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN**

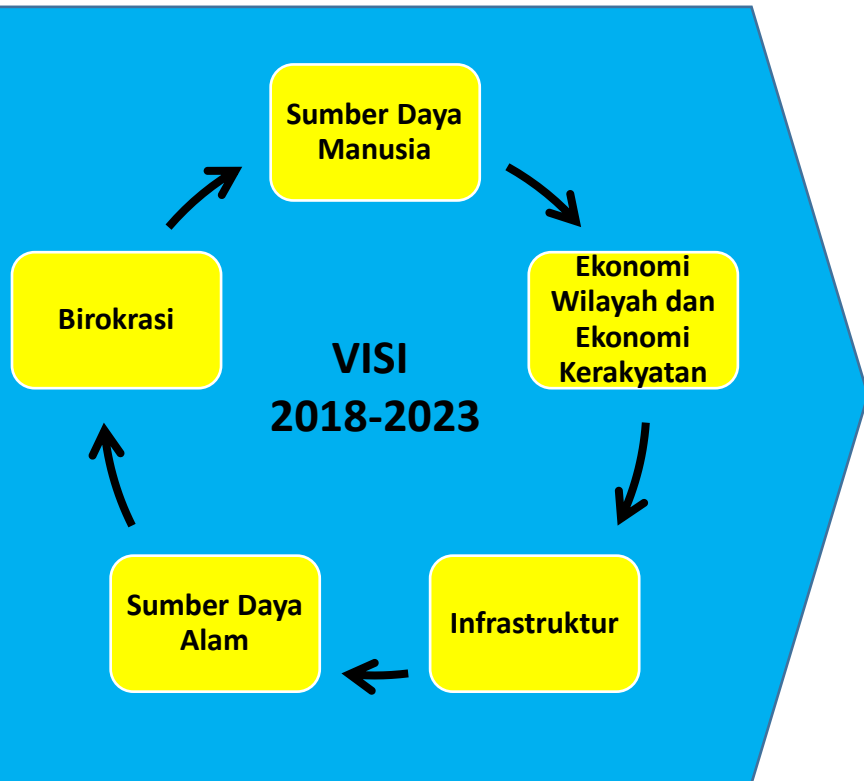
# BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

No.	IDENTIFIKASI MASALAH	PERUMUSAN KEBIJAKAN		IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	KINERJA KEBIJAKAN
	Data dan Informasi	Perencanaan (Penentuan Prioritas, Program, Kegiatan, Output dan Lokasi)	Penganggaran (Penentuan Standar Biaya, Standar Harga dan Jenis Belanja)	Manajemen Organisasi (Pemahaman regulasi, SOP, dan akuntansi)	Manfaat dan Dampak
1	SALAH	SALAH	SALAH	SALAH	GAGAL
2	BENAR	SALAH	SALAH	SALAH	GAGAL
3	BENAR	BENAR	SALAH	SALAH	GAGAL
4	BENAR	BENAR	BENAR	SALAH	GAGAL
5	BENAR	BENAR	BENAR	BENAR	BERHASIL

# PERENCANAAN BERBASIS PENGETAHUAN



# **VISI 2018-2023** ***"BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT"***



## **TUJUAN**

**2018-2023**

1. Meningkatkan Derajat dan Mutu Kesehatan
2. Meningkatkan Derajat dan Mutu Pendidikan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
4. Menurunkan Angka Kemiskinan
5. Menurunkan Angka Pengangguran
6. Menurunkan Tingkat Kesenjangan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat
8. Meningkatkan IPM
9. Terjaganya lingkungan hidup yang lestari

## **MISI PEMBANGUNAN**

Berdaulat Dalam Pembangunan SDM yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik

## **PRIORITAS PEMBANGUNAN**

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan

2. Penguatan modal sosial dan budaya

3. Peningkatan prestasi olahraga dan seni budaya

4. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan

5. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan

6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah

7. Peningkatan uatan konektivitas antarkawasan dan daerah

8. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur

9. Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

## **PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA**

**Pusat data, informasi dan Pengetahuan**

**Pusat Pelayanan Dasar**

**Pusat Pemberdayaan Masyarakat**

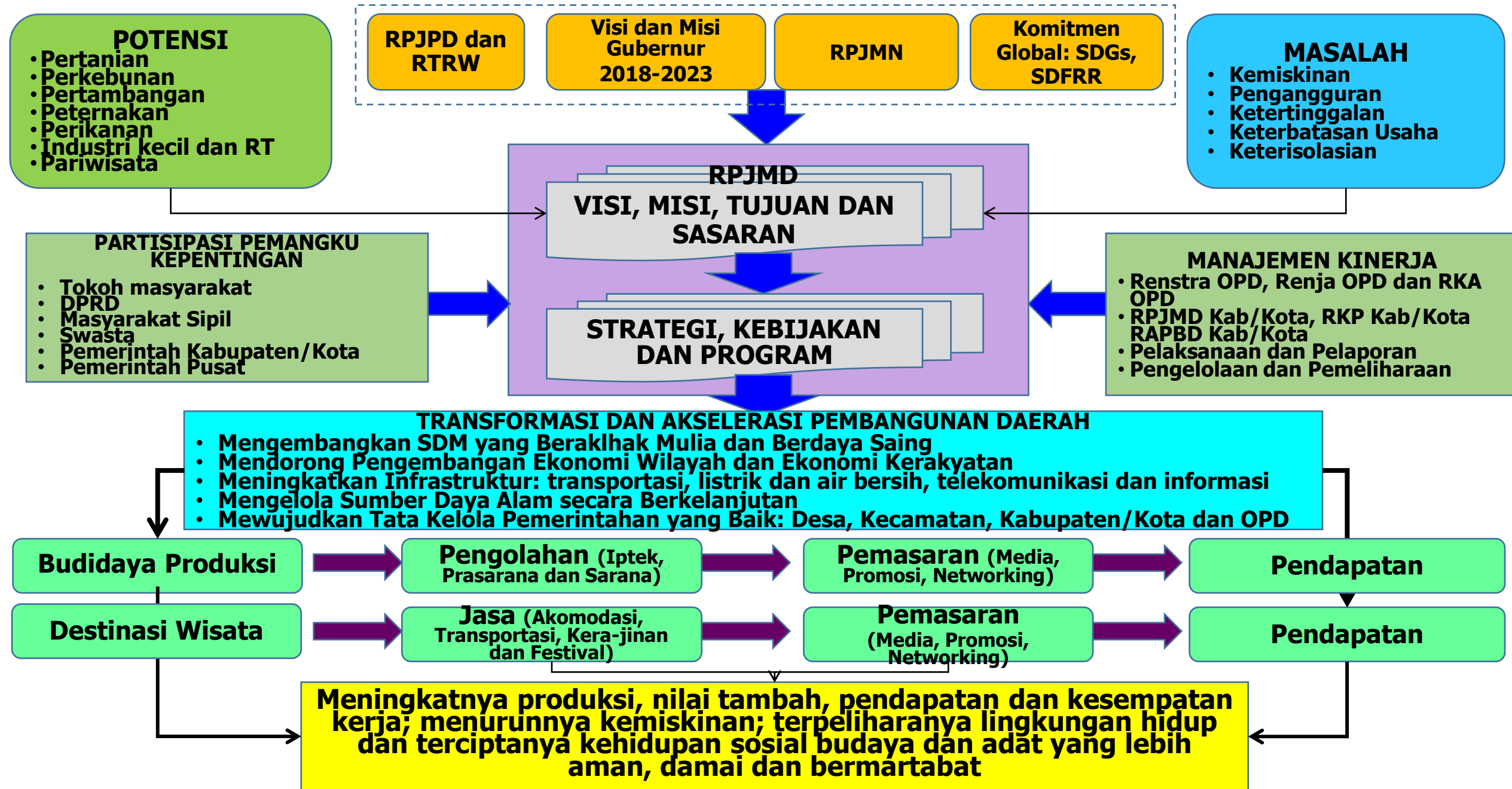
**Pusat Inovasi dan Kewirausahaan**

**Pusat Pertumbuhan Daerah**

## **DUKUNGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

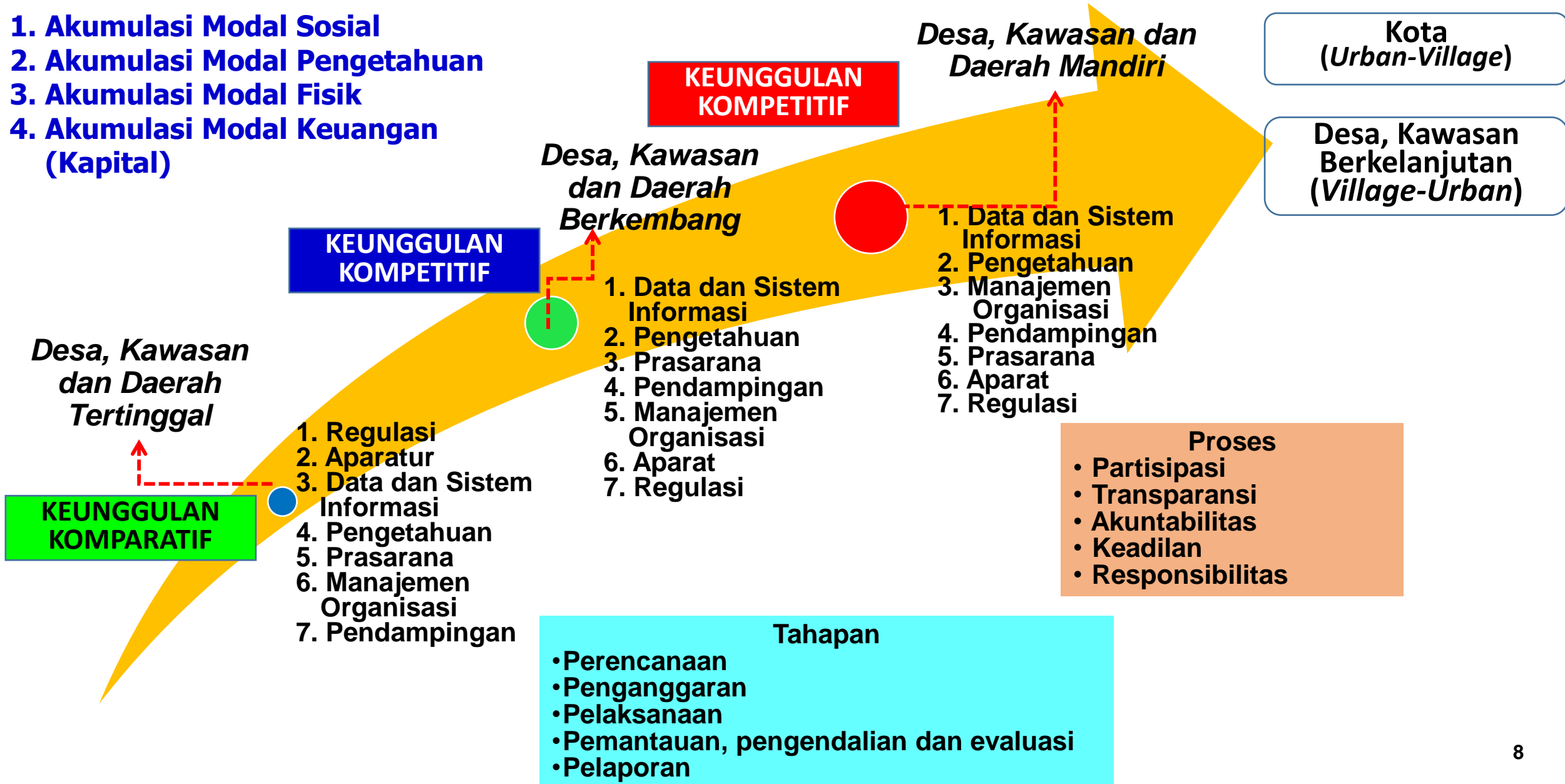
1. Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pemerintah Pusat
3. Pelaku usaha: perbankan dan swasta
4. Mitra pembangunan: Perguruan tinggi, LSM, dan lainnya

# KERANGKA PIKIR RPJMD



# TRANSFORMASI DESA, KAWASAN DAN DAERAH

1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi Modal Fisik
4. Akumulasi Modal Keuangan (Kapital)



# PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DESA

Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU  
Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya

## Instrumen (Masukan)

### Pengambilan Keputusan

- Pilkada
- Rapat DPRD
- Musrenbang

### Keuangan Daerah

- Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) dan Dana Desa
- Pengeluaran
- Investasi

### Administrasi

- Sumber Daya Manusia
- Peralatan
- Peraturan Daerah

## Mekanisme (Proses)

### Jejaring

- DPRD
- Pemda
- Masyarakat Sipil: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa

### Pelayanan Publik

- Pangan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kesempatan Kerja
- Perumahan
- Air bersih dan sanitasi
- Tanah
- SDA dan Lingkungan
- Rasa aman
- Partisipasi

### Manajemen Organisasi

- Sistem Informasi
- Standar Pelayanan Minimum
- Unit Pengaduan Masalah
- Sistem Reward and Punishment

## Pencapaian (Keluaran)

- Partisipasi
- Keberpihakan
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas
- Keadilan

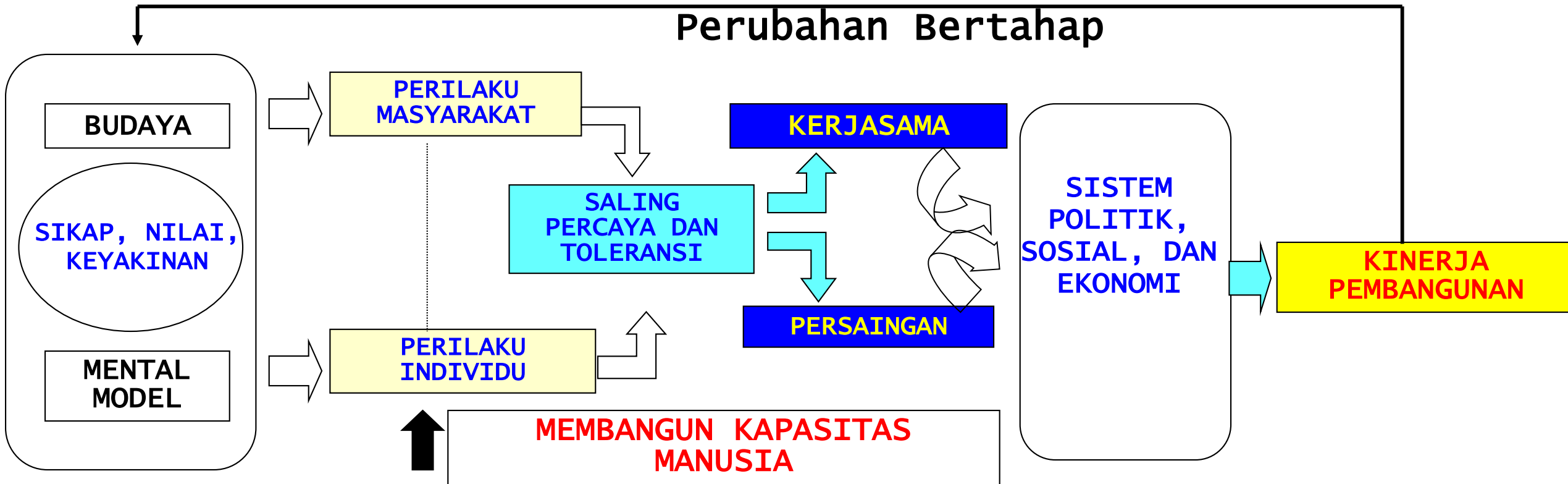
## Kinerja (Manfaat dan Dampak)

Terpenuhinya hak-hak dasar

Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera

Waktu

# BUDAYA DAN KINERJA PEMBANGUNAN



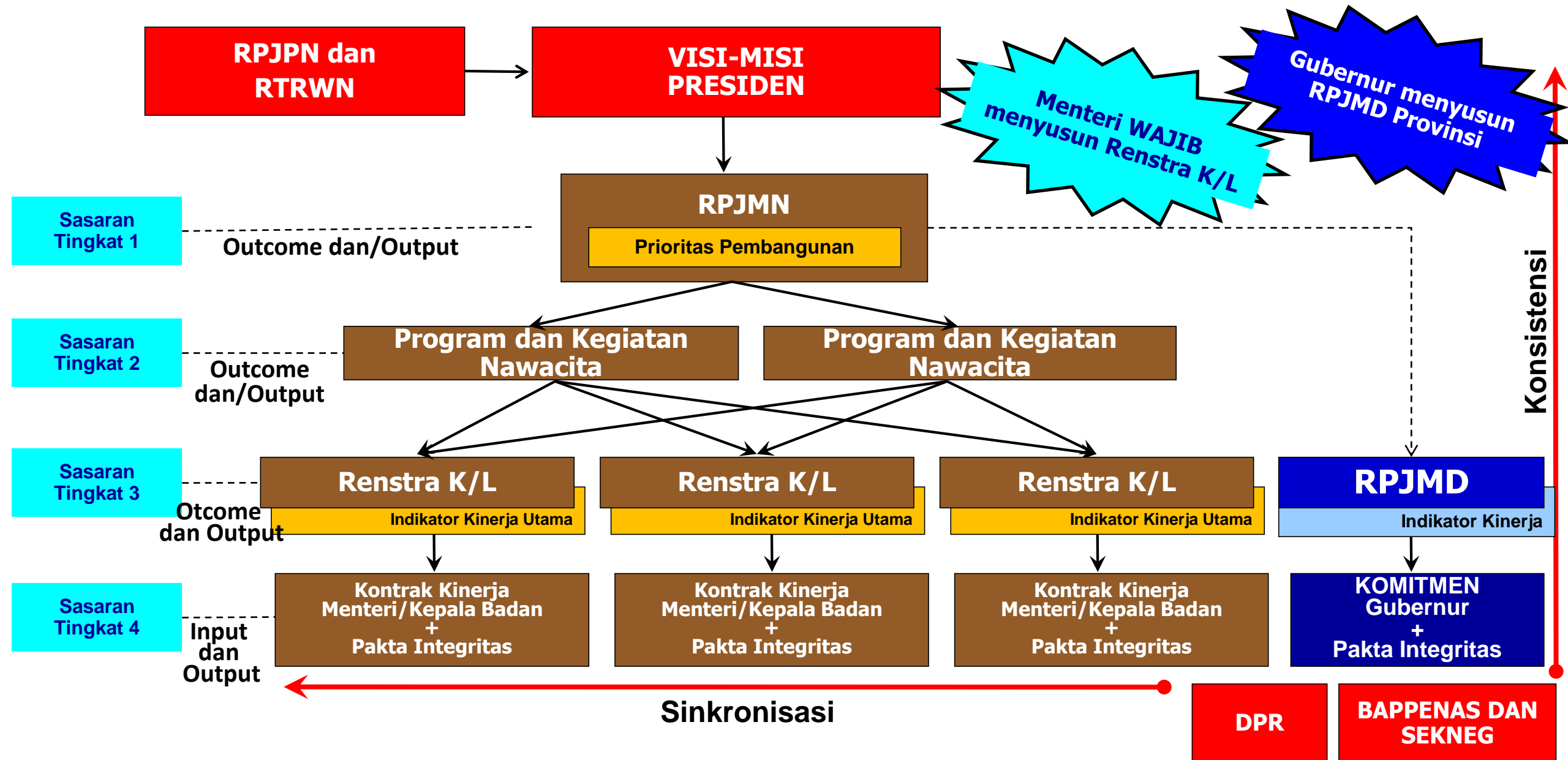
- Disiplin, Tepat Waktu, Budaya Kerja dan Profesionalisme,
- Perlakuan adil dan tanpa diskriminasi
- Pelayanan pendidikan yang bermutu
- Pelayanan kesehatan yang bermutu
- Penelitian dan pengembangan
- Penghargaan terhadap prestasi dan kinerja
- Penciptaan suasana yang stabil

Sumber: Dimodifikasi dari Lawrence Harrison dan Stace Lindsay. Culture and Development.

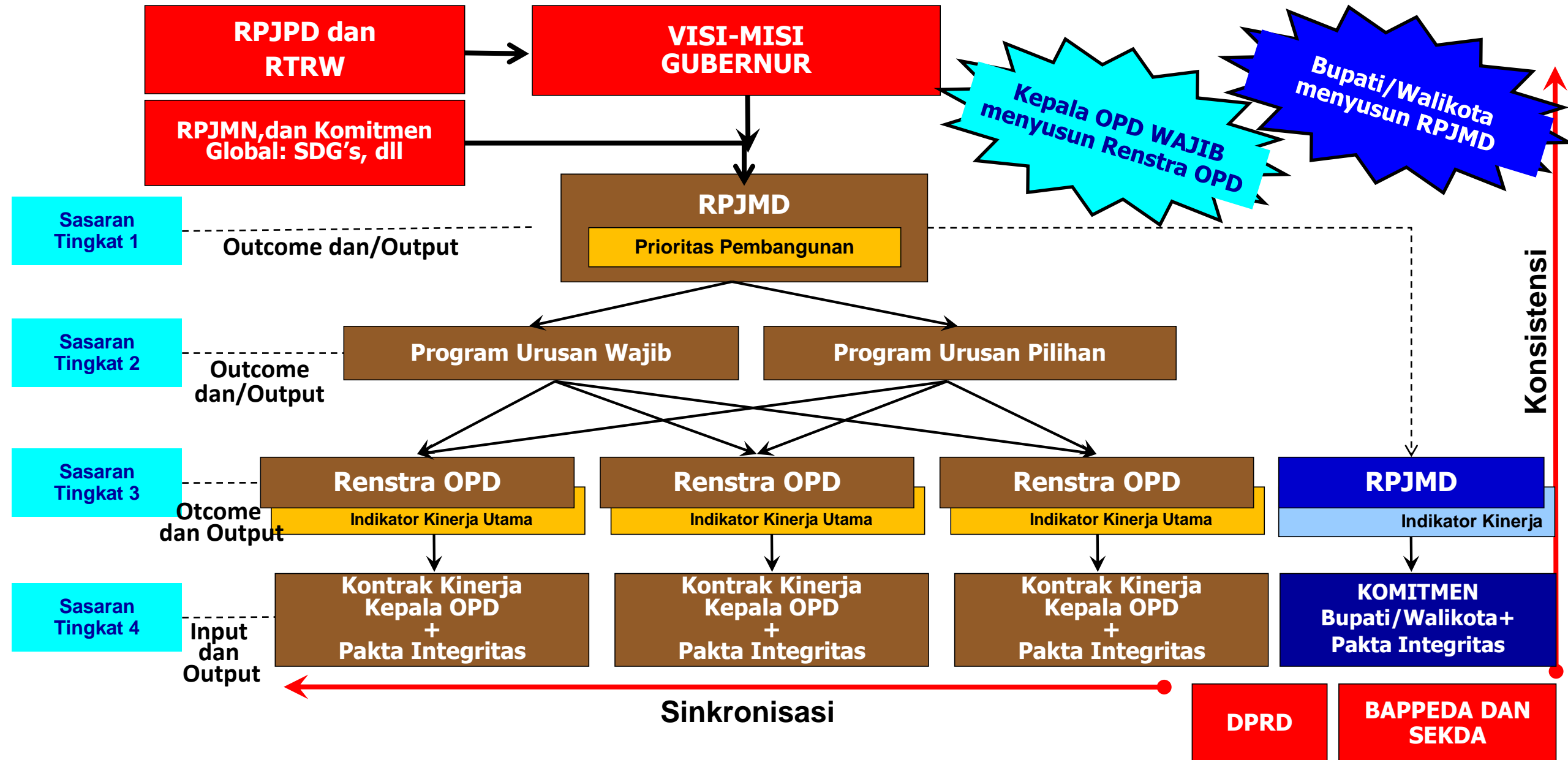
2

## **SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

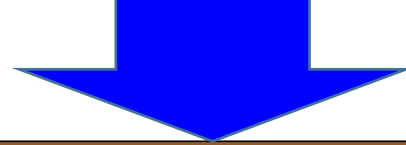
# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



Outcome dan/Output

Sasaran  
Tingkat 3



Outcome dan/Output

Sasaran  
Tingkat 4



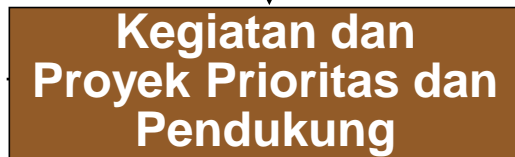
Outcome dan Output

Sasaran  
Tingkat 5



Input dan Output

Sasaran  
Tingkat 6

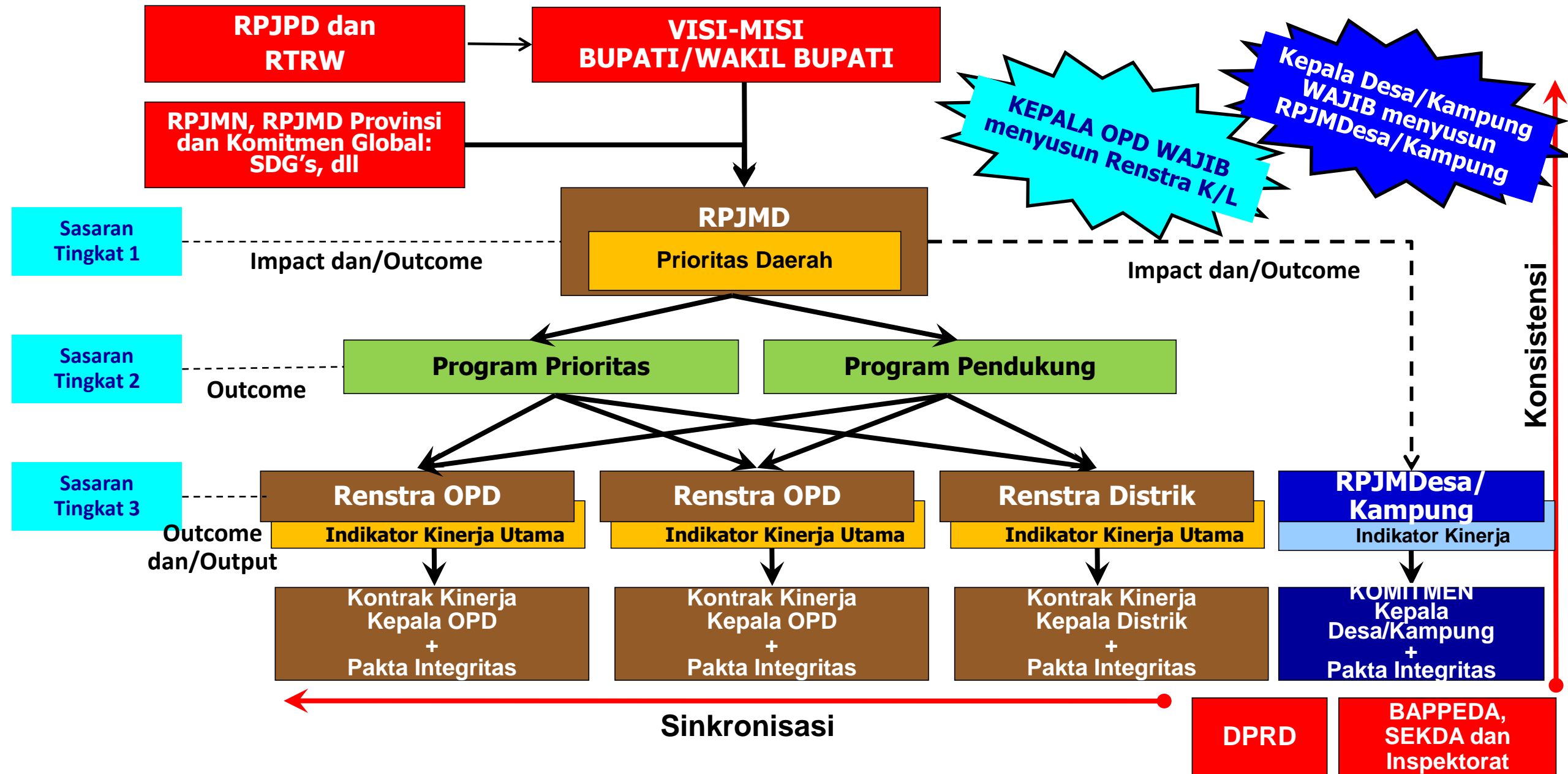


Konsistensi

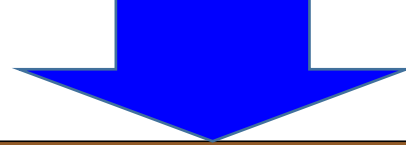
Sinkronisasi

SEKDA, BAPEPDA DAN  
INSPEKTORAT

# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 3



Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 4



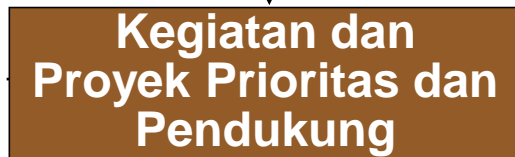
Outcome dan Output

Sasaran Tingkat 5



Input dan Output

Sasaran Tingkat 6



Konsistensi

Sinkronisasi

SEKDA, BAPEPDA DAN INSPEKTORAT

# PENTINGNYA SINKRONISASI RPJMN – RPJMD

***“Menjaga momentum pembangunan di tengah lingkungan yang dinamis”***

1. RPJM Nasional dan Daerah lima tahun ke depan merupakan RPJMN IV (terakhir) dalam kerangka perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025
  - 1) Memastikan pencapaian sasaran-sasaran RPJPN 2005-2025
  - 2) Menyiapkan pondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang berikutnya: Visi 2045
2. Kita sedang berada dalam lingkungan yang berubah / sangat dinamis dan dibutuhkan antisipasi yang terkoordinasi dengan baik secara nasional (lintas pelaku, lintas wilayah)
  - 1) *Disruptive era & Revolusi Industri 4.0: digital penetration, e-commerce, internet of things*, otomatisasi, siklus inovasi yang semakin cepat
  - 2) Meningkatnya proteksionisme (*trade war*) dan berakhirnya *commodity boom*

# ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV)

**Visi Pembangunan 2005-2025**  
**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,**  
**ADIL DAN MAKMUR**

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:



# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGARUSUTAMAAN (2)

## Prioritas RPJMN IV 2020-2024

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun Karakter Bangsa
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
4. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

## Pengarustamaan (*Mainstreaming*)

1. Kesenjaraan Gender
2. Tata Kelola
3. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
4. Modal Sosial dan Budaya
5. Pembangunan Berbasis Teknologi Digital (Transformasi Digital)



# PRIORITAS RPJMN IV 2020-2024



## 1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

Pembangunan yang inklusif dan merata telah menjadi modal utama di dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, yang akan menjadi tujuan fundamental dalam rangka menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui: 1). Peningkatan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Care*), 2). Mempercepat wajib belajar 12 tahun, 3). meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas pembelajaran, serta 4). peningkatan kerja sama layanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.



## 2. Membangun Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa merupakan bagian dari kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

Mentalitas disiplin, etos maju, etika kerja, kreativitas dan inovasi perlu terus dikembangkan sebagai penentu kemajuan bangsa. Pembangunan karakter bangsa diharapkan dapat ditingkatkan melalui: 1). Pendidikan karakter dan budi pekerti, 2). Pengembangan budaya dan prestasi olahraga, 3). Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan 4). Mempercepat pelaksanaan dan upaya perlindungan gender di semua bidang pembangunan.



## 3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui 1). peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan hulu-hilir industri, 2). Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra, 3). Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif, 4). Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian, 5). Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan

# PRIORITAS RPJMN IV 2020-2024



## 4. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

**Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.**

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1). Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2). Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3). Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4). Memperkuat kemampuan sdm dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5). Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.



## 5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

**Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.**

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada penyediaan: (i) infrastruktur pelayanan dasar termasuk perumahan dan permukiman, air minum, serta sanitasi, aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, ketahanan bencana, serta keselamatan transportasi; (ii) infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda untuk mendukung industri pengolahan serta jasa dan pariwisata serta waduk multipurpose dan modernisasi irigasi untuk mendukung sektor pertanian; (iii) infrastruktur pendukung pembangunan perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum masal; serta (iv) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Percepatan pembangunan infrastruktur juga didukung oleh pengembangan strategi investasi dan sumber-sumber pembiayaan melalui skema KPBU dan PINA.

# PRIORITAS RPJMN IV 2020-2024



## 6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

**Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan menegakan kedaulatan negara.**

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1). Reformasi kelembagaan dan kapasitas ASN, 2). Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, 3). Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4). Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.



## 7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

**Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi & intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung SDA & daya tampung LH; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana**

Kebijakan pembangunan rendah karbon akan diarahkan pada bidang lahan, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Peningkatan ketahanan iklim dan bencana diarahkan melalui: 1) Penguatan mitigasi bencana; 2) Penguatan kapasitas penanggulangan bencana; 3) Peningkatan sarpras kebencanaan; 4) Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana; serta 5). Penguatan manajemen kebencanaan.

# PENGARUSUTAMAAN RPJMN IV 2020-2024



## 1. Kesetaraan Gender

**Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.**

### **Indikator:**

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Peran perempuan di dalam pembangunan
- Menurunnya Tindak Kekerasan Pada Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



## 2. Tata Kelola

**Tata kelola pemerintahan yang demokratis akan menciptakan pemerintahan yang bersahabat dan mendukung pembangunan.**

### **Indikator:**

- Government Effectiveness Index
- Indeks Persepsi Korupsi
- E-Government Index 2018
- Ease of Doing Business (EoDB)

# PENGARUSUTAMAAN RPJMN IV 2020-2024



## 3. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung LH sebagai faktor penentu. Pembangunan harus diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif serta tanggap terhadap perubahan SDA dan LH.

### Indikator:

- emisi
- intensitas emisi
- indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi
- ketahanan sektor dan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan bencana
- implementasi API-RB di tingkat sektor dan masyarakat



## 4. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

### Indikator:

- Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)
- Kohesi Sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)
- HaKI komunal berbasis ekosistem
- Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
- Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor
- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar



## 5. Pembangunan Berbasis Teknologi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

### Indikator:

- Meningkatkan NRI (Network Readiness Index) mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
- Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastruktur nya.

# SASARAN MAKRO 2020 - 2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

**5,4%-6,1%**

**Pertumbuhan  
Ekonomi**



**US\$6.069**

**PDB Harga Berlaku  
Per Kapita  
Skenario Sedang**

Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan makro ekonomi tersebut tergantung dari efektivitas perbaikan kebijakan lintas sektor (kebijakan reformasi struktural)

**Target-target Pembangunan  
Tahun 2024**

**2,99 juta ➡ 2,7-3,0 juta**

(Agustus 2018) (2024)

**Penciptaan  
Kesempatan Kerja**

**9,82% ➡ 6,5-7,0%**

(Maret 2018) (2024)

**Tingkat Kemiskinan**

**0,389 ➡ 0.370-0,374**

(Maret 2018) (2024)

**Ketimpangan/  
Gini Ratio**

**5,34% ➡ 4,0-4,6%**

(Agustus 2018) (2024)

**Tingkat Pengangguran  
Terbuka**

**71,38 ➡ 75,35**

(2018) (2024)

**IPM**

# Highlight ASUMSI MAKRO 2020-2024



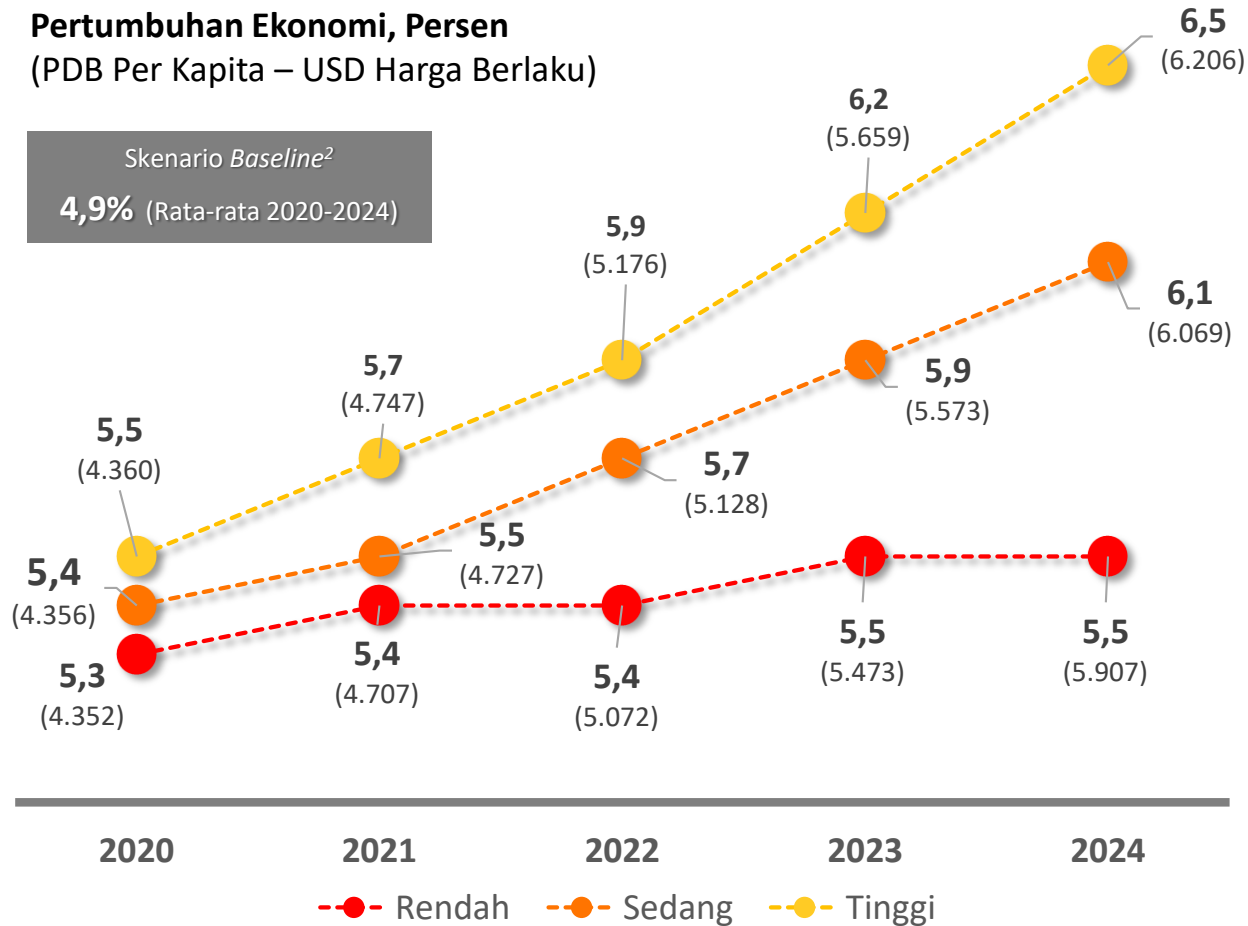
## Kunci peningkatan pertumbuhan<sup>1</sup>:

1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan investasi
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

## Pertumbuhan Ekonomi, Persen (PDB Per Kapita – USD Harga Berlaku)

Skenario Baseline<sup>2</sup>

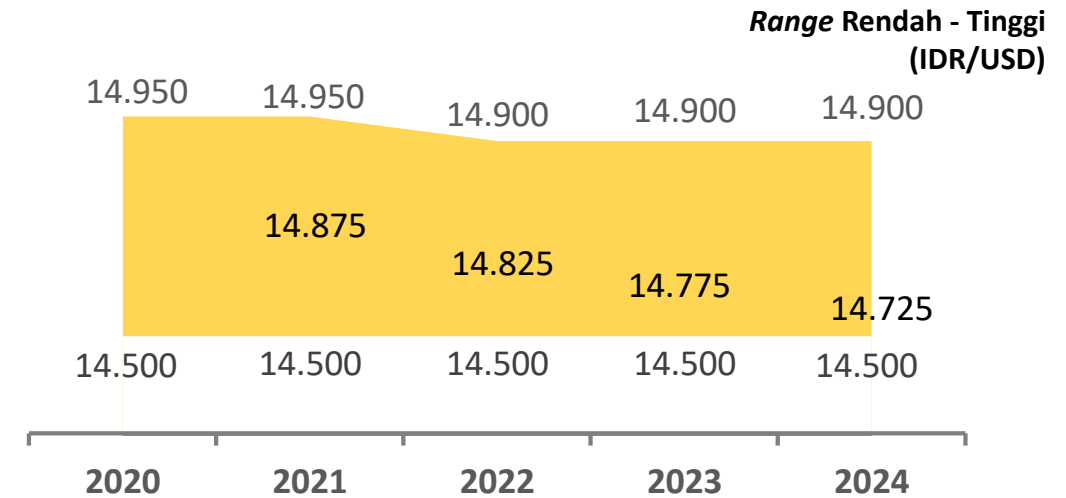
4,9% (Rata-rata 2020-2024)



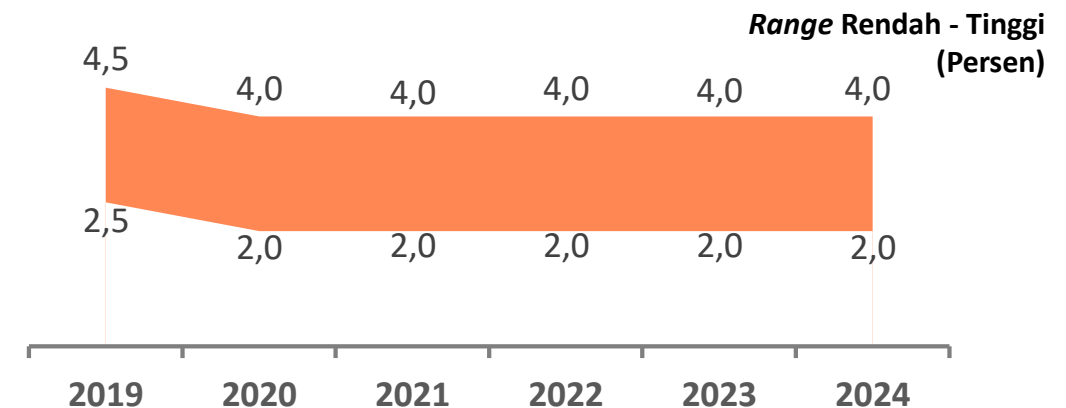
<sup>1</sup>Berdasarkan simulasi pertumbuhan potensial model Growth Accounting Bappenas

<sup>2</sup>Tanpa adanya reformasi struktural sepanjang 2020-2024

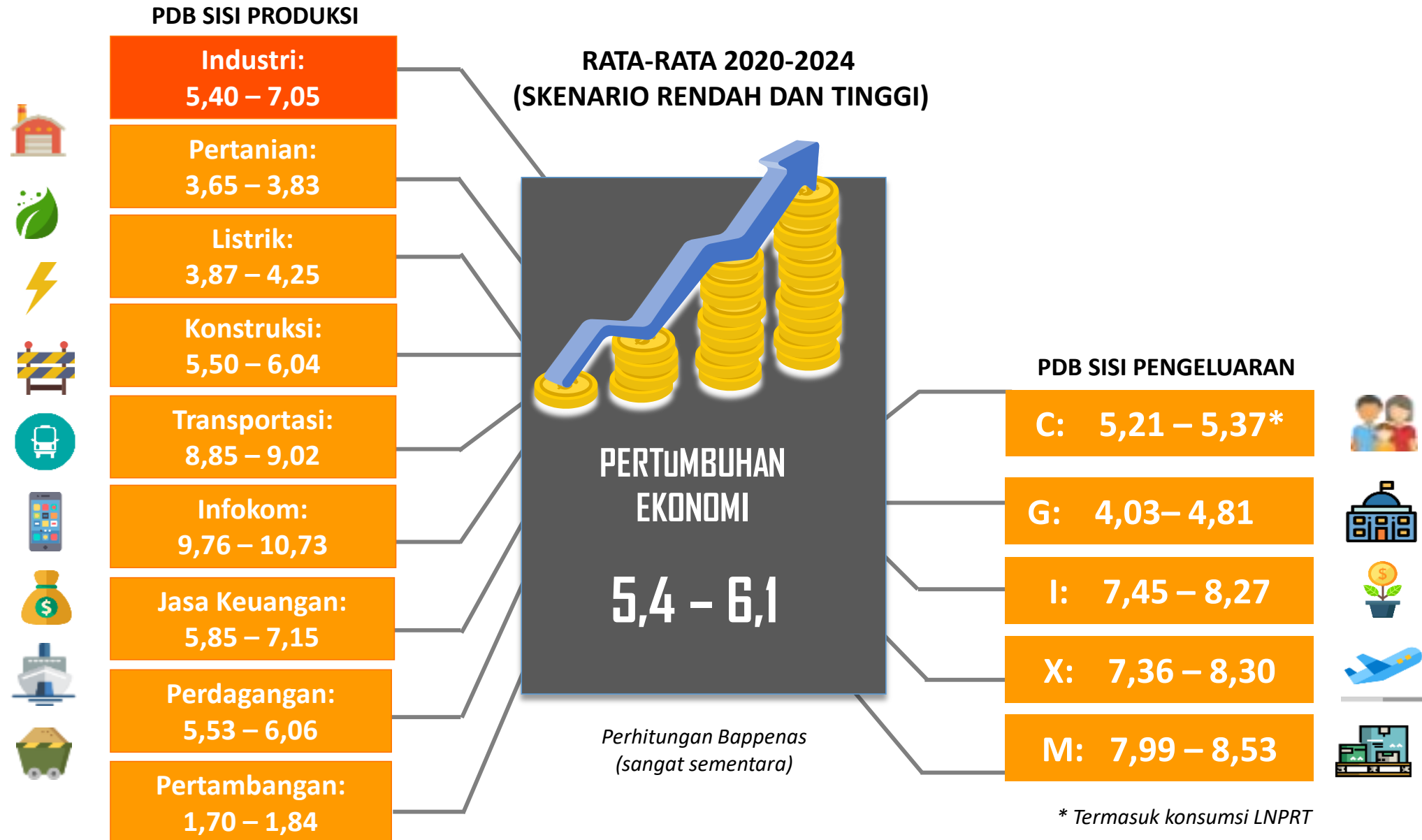
Nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor



Inflasi dijaga pada tingkat jangka panjangnya melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi



# GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 - 2024



# SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN POKOK PENGEMBANGAN WILAYAH

## SASARAN

**Meningkatnya Pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)**



**Meningkatnya Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah**



**Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pelayanan Dasar, Daya Saing serta Kemandirian Daerah**



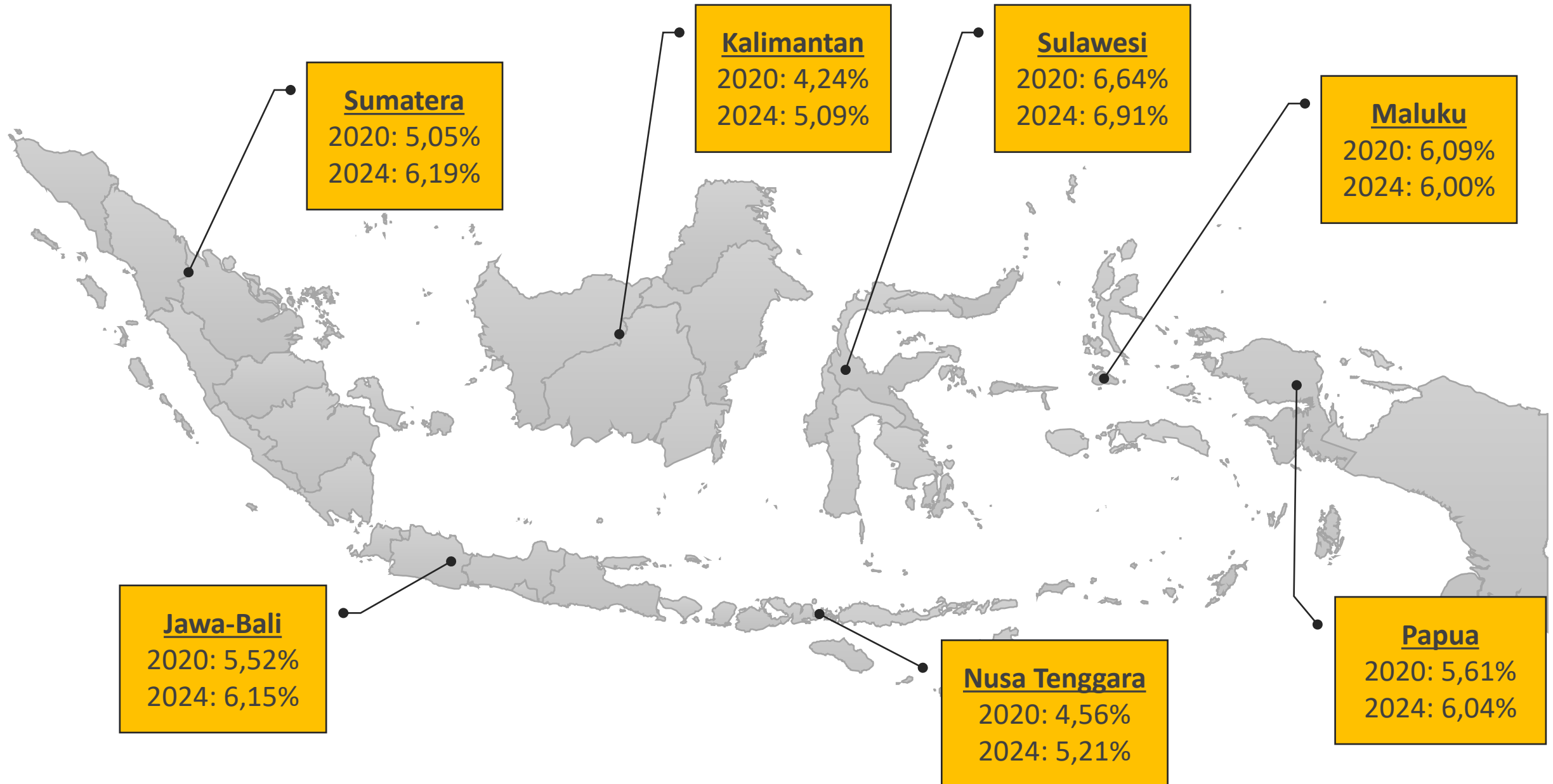
**Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Ruang Wilayah**



## ARAH KEBIJAKAN POKOK

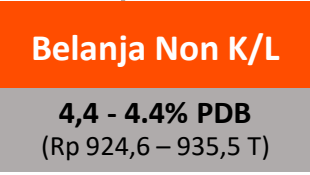
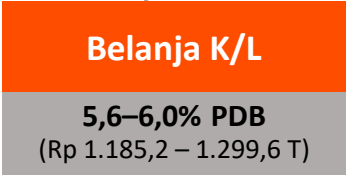
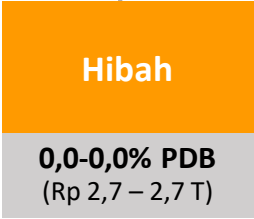
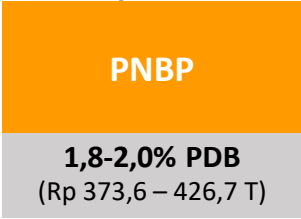
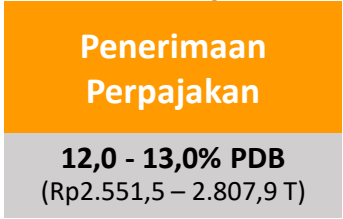
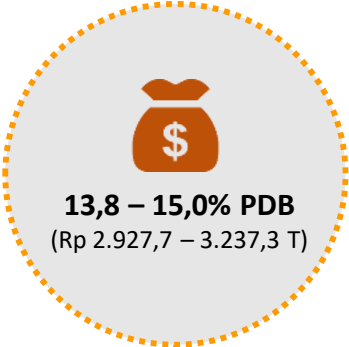
1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang telah ditetapkan)
4. Peningkatan Nilai Tambah SDA
5. Peningkatan konektivitas antar-wilayah
6. Penataan pola hubungan pusat dan daerah
7. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
8. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
9. Peningkatan kemudahan perizinan
10. Pengembangan kerja sama antar daerah, kolaborasi multipihak dan inovasi pemerintahan daerah
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
12. Peningkatan sinergi kegiatan perkotaan dan perdesaan
13. Penegakan penataan ruang yang berbasis bencana dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
14. Peningkatan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah

# SASARAN PERTUMBUHAN EILAYAH– Skenario Sedang



# POSTUR FISKAL 2020-2024

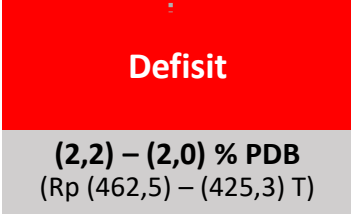
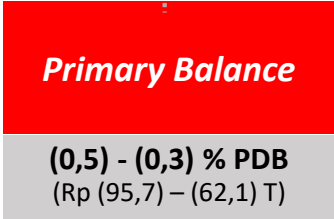
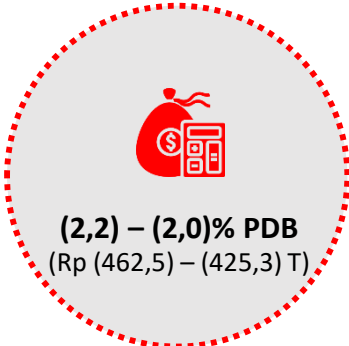
## MOBILISASI PENDAPATAN NEGARA



## PENAJAMAN BELANJA NEGARA

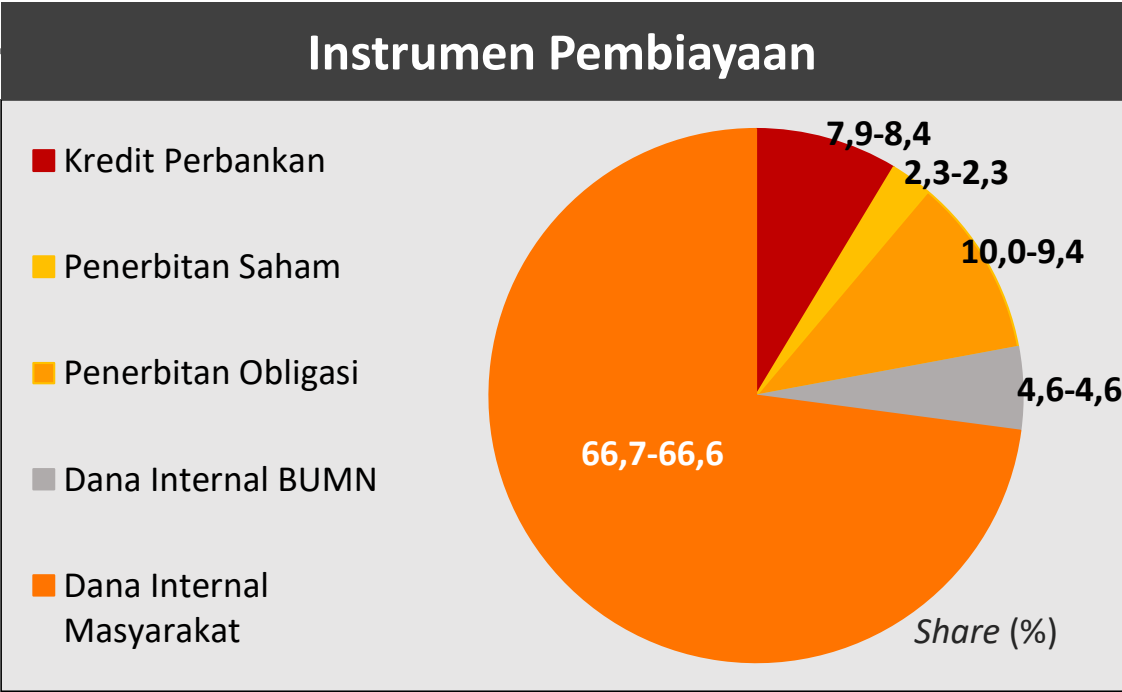
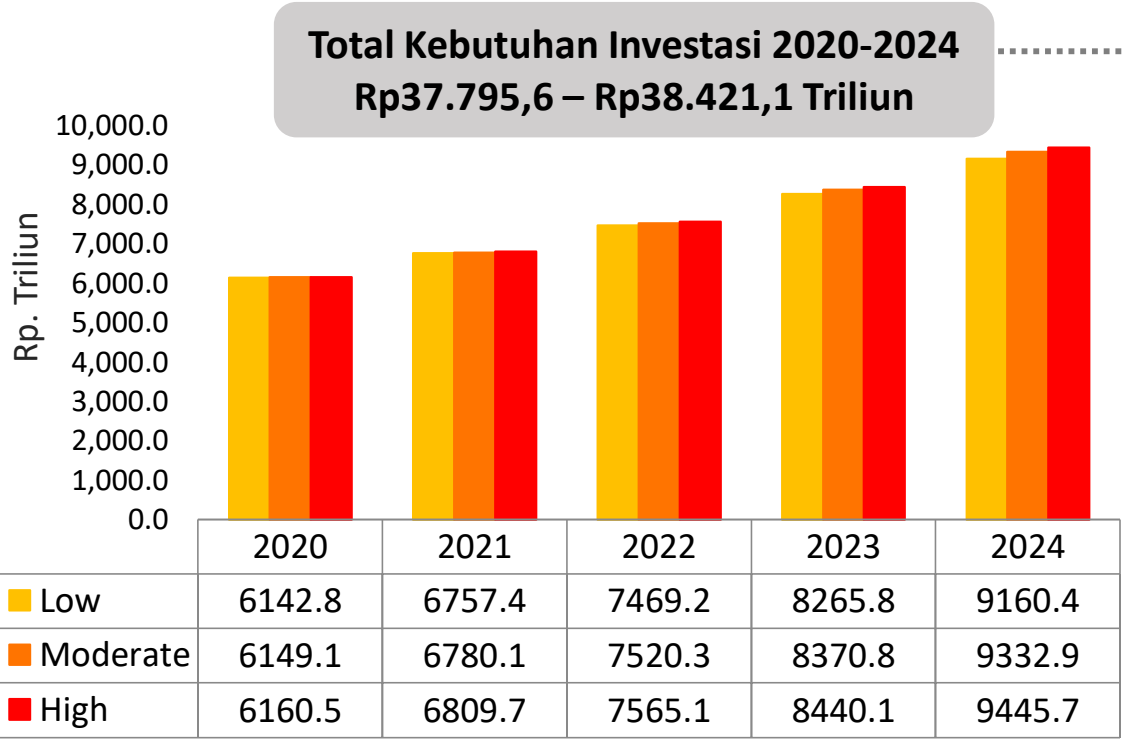
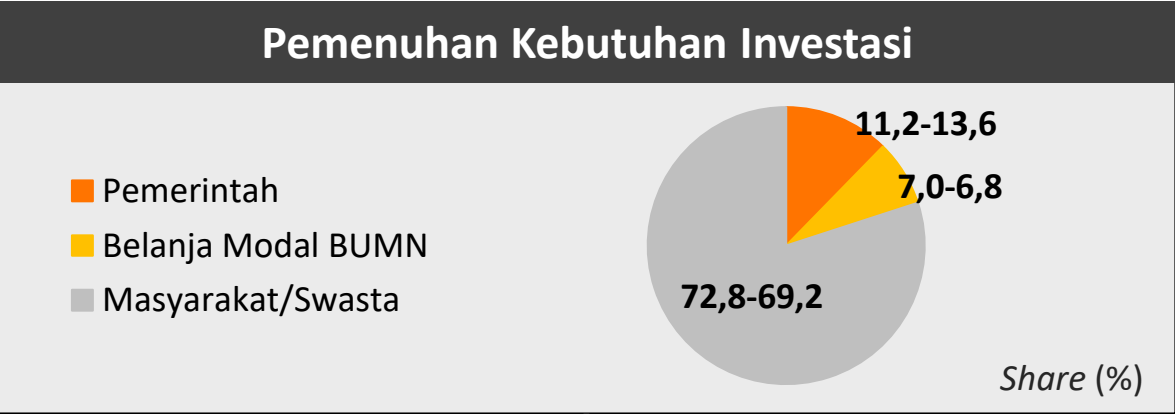
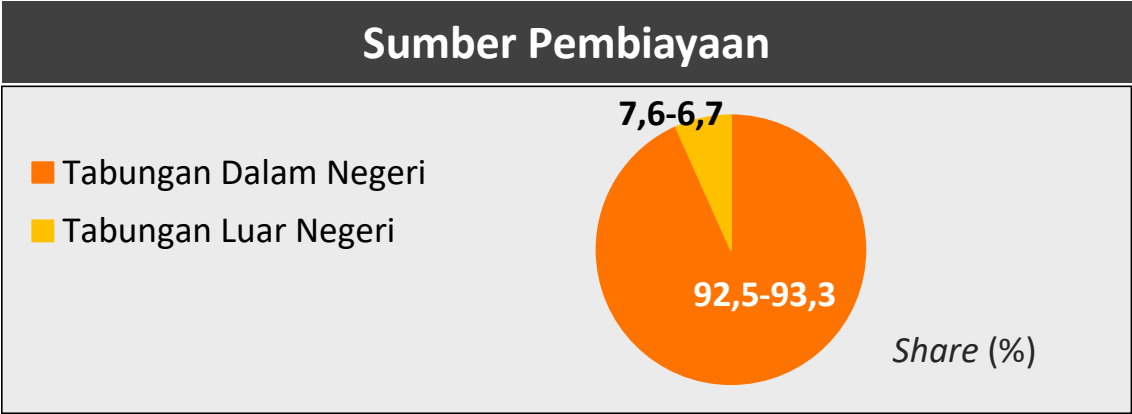


## PEMBIAYAAN



\*) Rata-rata 5 tahunan  
Skenario Low dan Skenario High

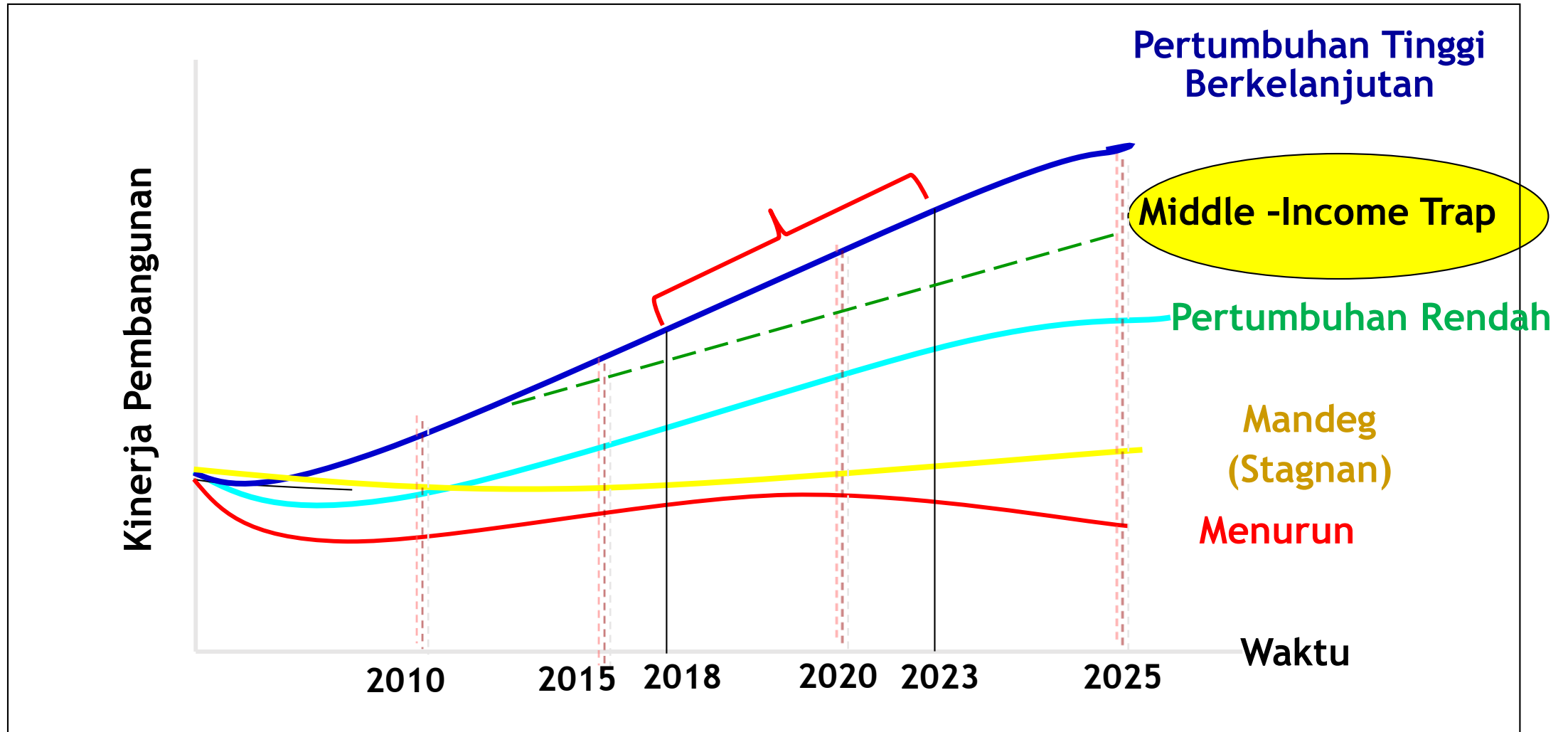
# KEBUTUHAN INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN



3

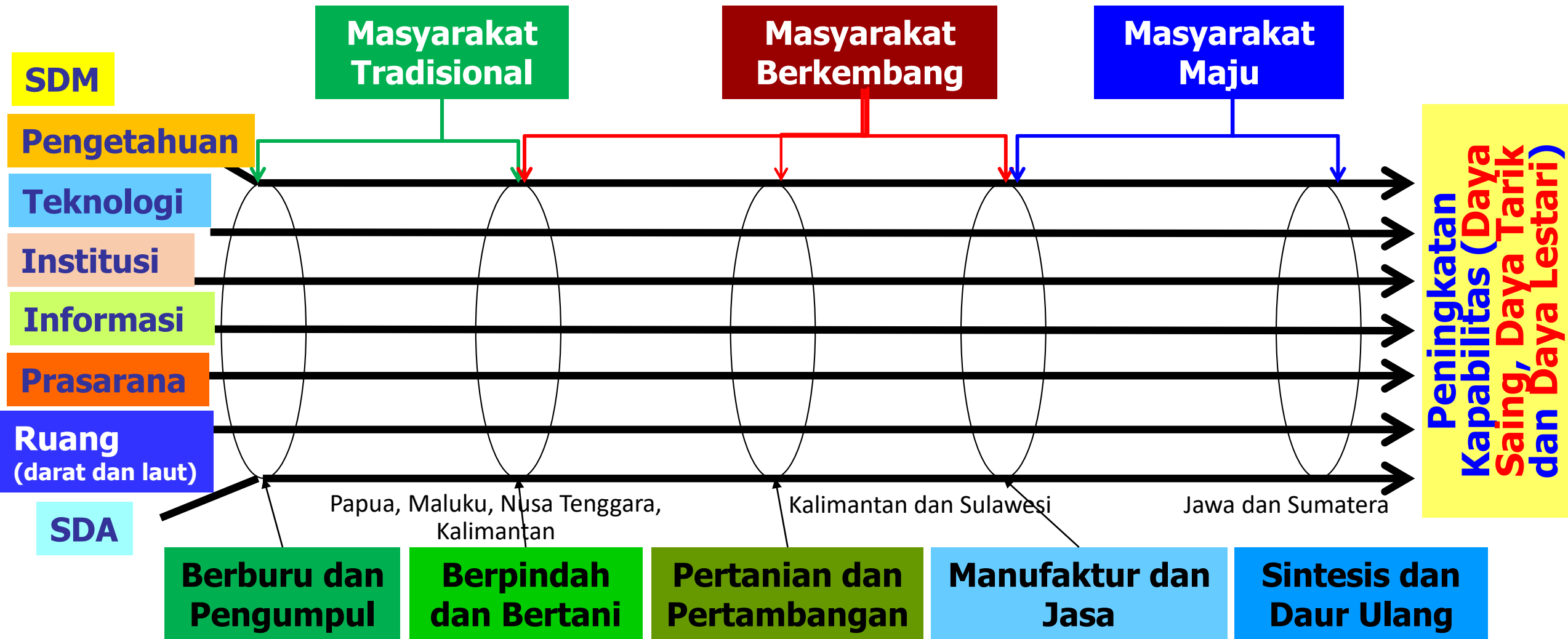
# **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

# BAGAIMANA MASA DEPAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR?



Pertumbuhan ekonomi berkualitas: pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pencegahan kerusakan lingkungan.

# TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA



**Perbedaan Arah (*Direction*), Besaran (*Magnitude*) dan Kecepatan (*Speed*)**

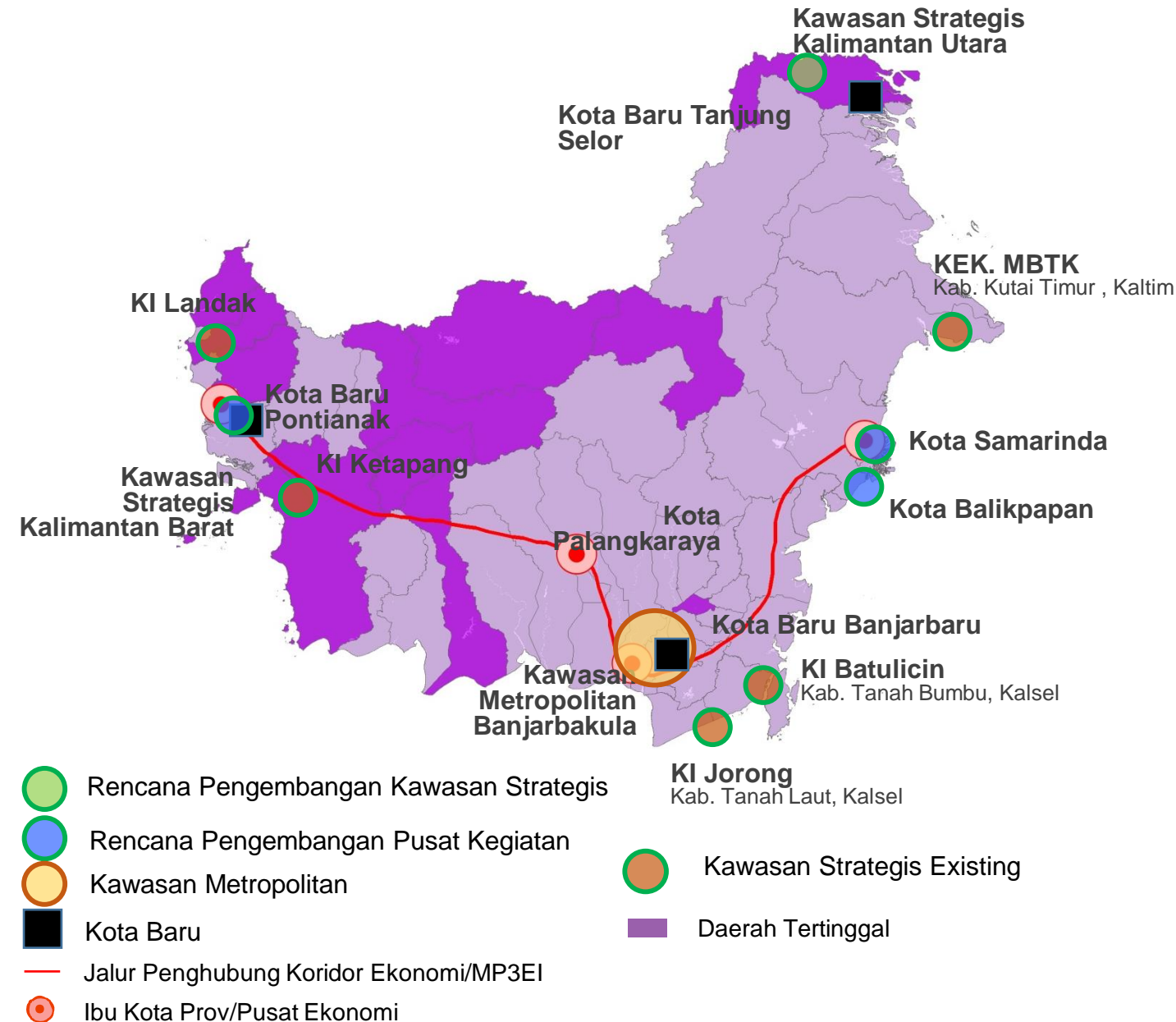
# ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN 2020-2024

Wilayah Kalimantan					Moderate
2020	2021	2022	2023	2024	
4,8	4,9	4,9	5,0	5,2	
5,0					

- Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 yaitu:

- ✓ Industri Manufaktur
  - ❑ Sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas
  - ❑ Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain
- ✓ Pertanian, kehutanan, perikanan
  - ❑ Sub sub sektor tanaman perkebunan
- ✓ Pertambangan dan Penggalian
  - ❑ Sub sektor pertambangan batu bara
- ✓ Transportasi dan pergudangan
  - ❑ Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyebrangan

- Tema Pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu:
  - ✓ Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan, dan lumbung energi nasional
- Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:
  - ✓ Operasionalisasi KEK MBTK, KI Landak, Batulicin dan Jorong.
  - ✓ Peningkatan investasi di KI Ketapang
  - ✓ Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).
  - ✓ Pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan
- Percepatan Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal



# KEUNGGULAN EKONOMI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## POTENSI UNGGULAN WILAYAH

### Keunggulan Komparatif Komoditas (LQ)

- Pangan & Palawija: Padi, Ubi kayu, Ubi jalar;
- Perkebunan: Kelapa Sawit
- Perikanan: Perikanan tangkap (perairan umum dan laut), Perikanan budidaya (budidaya laut, tambak, keramba)

### Keunggulan Komparatif Sektor (LQ-DS)

#### LQ (Komparatif)

- Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Sektor Pertambangan dan Penggalian;
- Sektor Konstruksi;
- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Sektor Transportasi dan Pergudangan;
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

#### DS (Kompetitif)

- Sektor Pertambangan dan Penggalian;
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

### Industri Pengolahan (Nilai Output)

- Industri Minyak Makan Kelapa Sawit
- Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
- Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
- Industri Kayu Lapis
- Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
- Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Alam
- Industri Barang Plastik Lembaran
- Industri Penggergajian Kayu
- Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- Industri Furnitur dari Kayu

**PENGEMBANGAN EKONOMI KALIMANTAN TIMUR DI ARAHKAN: (1) PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PRODUKSI TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN & PETERNAKAN; (2) INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS KOMODITAS AGRO; dan (3) PENGEMBANGAN PARIWISATA**

# SKENARIO PEMBANGUNAN DAERAH

Skenario pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tiga skenario:

- 1. Skenario Normal (Business as Usual):** Mempertahankan kinerja pembangunan melalui kebijakan dan program pembangunan yang sudah ada;
- 2. Skenario Moderat:** Mendorong (akselerasi) percepatan pembangunan melalui kebijakan dan program percepatan pembangunan
- 3. Skenario Optimis:** Melakukan transformasi (perubahan) dan akselerasi (percepatan) pembangunan melalui pelaksanaan sistem dan manajemen berbasis kinerja, penajaman kebijakan dan program, pengendalian dan evaluasi, pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan investasi.

# RENCANA INVESTASI

- Investasi akan menambah cadangan (*stock*) modal dan meningkatkan akumulasi kapital;
- Penambahan modal akan meningkatkan kapasitas produksi dan selanjutnya mendorong produksi dan peningkatan nilai tambah;
- Peningkatan produksi dan nilai tambah berarti pertumbuhan ekonomi;
- Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan tambahan tenaga kerja sehingga menurunkan pengangguran;
- Peningkatan produksi berarti peningkatan nilai tambah dan pendapatan, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.



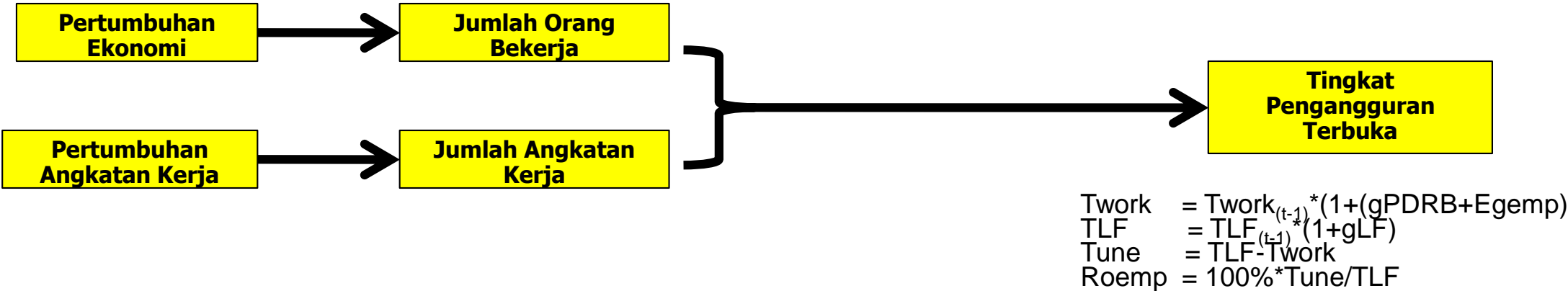
# ASUMSI DASAR PROYEKSI PEREKONOMIAN

1. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar ... persen pada tahun 2018 menjadi ... persen pada tahun 2023.
2. Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan sebesar 0,85 persen pada tahun 2018 menjadi ... persen pada tahun 2023.
3. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,17 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0017 persen.
4. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,05 Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,0005 persen.

# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN

## SKENARIO OPTIMIS: AKSELERASI (PERCEPATAN) DAN TRANSFORMASI (PERUBAHAN)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )							
2. Elastisitas pertumbuhan thd lap. Kerja ( <i>Egemp</i> )							
3. Jumlah orang bekerja (ribu org) ( <i>Twork</i> )							
4. Pertumbuhan angkatan kerja (persen) ( <i>gLf</i> )							
5. Jumlah angkatan kerja (ribu orang) ( <i>TLF</i> )							
6. Jumlah penganggur (ribu orang) ( <i>Tune</i> )							
7. Tingkat pengangguran terbuka (persen) ( <i>Roemp</i> )							



# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN

## SKENARIO MODERAT: AKSELERASI (PERCEPATAN)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )	6,08	5,86	5,44	5,50	5,60	5,80	5,90
2. Elastisitas pertumbuhan thd lap. Kerja ( <i>Egemp</i> )	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3. Jumlah orang bekerja (ribu org) ( <i>Twork</i> )	19.553.910	19.306.508	19.367.778	19.114.560	19.275.122	19.442.816	19.614.885
4. Pertumbuhan angkatan kerja (persen) ( <i>gLF</i> )	0,91	0,89	0,85	0,85	0,82	0,79	0,78
5. Jumlah angkatan kerja (ribu orang) ( <i>TLF</i> )	20.432.453	20.149.998	20.274.674	19.953.840	20.117.461	20.278.401	20.436.573
6. Jumlah penganggur (ribu orang) ( <i>Tune</i> )	878.543	843.490	906.900	839.280	842.339	835.585	821.688
7. Tingkat pengangguran terbuka (persen) ( <i>Roemp</i> )	4,3	4,19	4,47	4,21	4,19	4,12	4,02

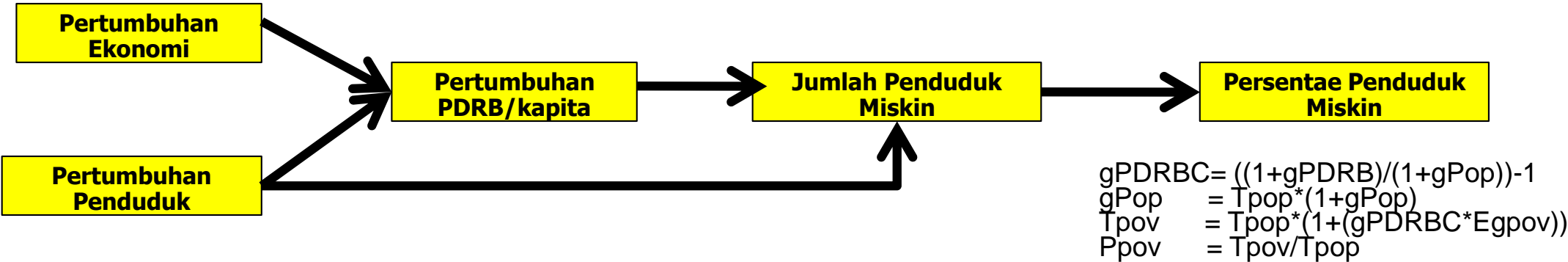
## SKENARIO NORMAL: BUSINESS AS USUAL

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )	6,08	5,86	5,44	5,50	5,60	5,70	5,80
2. Elastisitas pertumbuhan thd lap. Kerja ( <i>Egemp</i> )	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3. Jumlah orang bekerja (ribu org) ( <i>Twork</i> )	19.553.910	19.306.508	19.367.778	19.114.560	19.275.122	19.439.925	19.609.052
4. Pertumbuhan angkatan kerja (persen) ( <i>gLF</i> )	0,91	0,89	0,85	0,85	0,82	0,8	0,78
5. Jumlah angkatan kerja (ribu orang) ( <i>TLF</i> )	20.432.453	20.149.998	20.274.674	19.953.840	20.117.461	20.278.401	20.436.573
6. Jumlah penganggur (ribu orang) ( <i>Tune</i> )	878.543	843.490	906.900	839.280	842.339	838.477	827.521
7. Tingkat pengangguran terbuka (persen) ( <i>Roemp</i> )	4,3	4,19	4,47	4,21	4,19	4,13	4,05

# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN

## SKENARIO OPTIMIS: AKSELERASI (PERCEPATAN) DAN TRANSFORMASI (PERUBAHAN)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )	6,08	5,86	5,44	5,50	5,60	5,90	6,00
2. Pertumbuhan PDRB/kapita (persen) ( <i>gPDRBC</i> )	5,37	5,18	4,80	4,80	4,84	4,90	4,95
3. Elastisitas pertumbuhan thd kemiskinan ( <i>Egpov</i> )	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017
4. Pertumbuhan penduduk (persen) ( <i>gPop</i> )	0,91	0,89	0,85	0,85	0,82	0,8	0,78
5. Jumlah penduduk total (ribu orang) ( <i>Tpop</i> )	38.363	38.610	38.848	39.178	39.499	39.815	40.126
6. Jumlah penduduk miskin (ribu orang) ( <i>Tpov</i> )	4.893	4.748	4.776	4.737	4.698	4.659	4.620
7. Persentase penduduk miskin (persen) ( <i>Ppov</i> )	12,73	12,28	12,28	12,09	11,89	11,70	11,51



# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN

## SKENARIO MODERAT: AKSELERASI (PERCEPATAN)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,08	5,86	5,44	5,50	5,60	5,80	5,90
2. Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	5,37	5,18	4,80	4,80	4,84	4,86	4,90
3. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Pengurangan Kemiskinan	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0016	-0,0016	-0,0016
4. Pertumbuhan Penduduk (%)	0,91	0,89	0,85	0,85	0,82	0,8	0,78
5. Jumlah penduduk (ribu jiwa)	38.363	38.610	38.848	39.178	39.499	39.815	40.126
6. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	4.893	4.748	4.776	4.737	4.700	4.664	4.627
7. Tingkat Kemiskinan (%)	12,73	12,28	12,28	12,09	11,90	11,71	11,53

## SKENARIO NORMAL: BUSINESS AS USUAL

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,08	5,86	5,44	5,50	5,60	5,70	5,80
2. Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	5,37	5,18	4,80	4,80	4,82	4,84	4,86
3. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Pengurangan Kemiskinan	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0015	-0,0015	-0,0015
4. Pertumbuhan Penduduk (%)	0,91	0,89	0,85	0,85	0,82	0,8	0,78
5. Jumlah penduduk (ribu jiwa)	38.363	38.610	38.848	39.178	39.499	39.815	40.126
6. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	4.893	4.748	4.776	4.737	4.703	4.669	4.635
7. Tingkat Kemiskinan (%)	12,73	12,28	12,28	12,09	11,91	11,73	11,55

# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2018-2023

[illegible]

# TARGET PENGURANGAN PENGANGGURAN 2018-2023

[illegible]

# TARGET PENGURANGAN KEMISKINAN 2018-2023

[illegible]

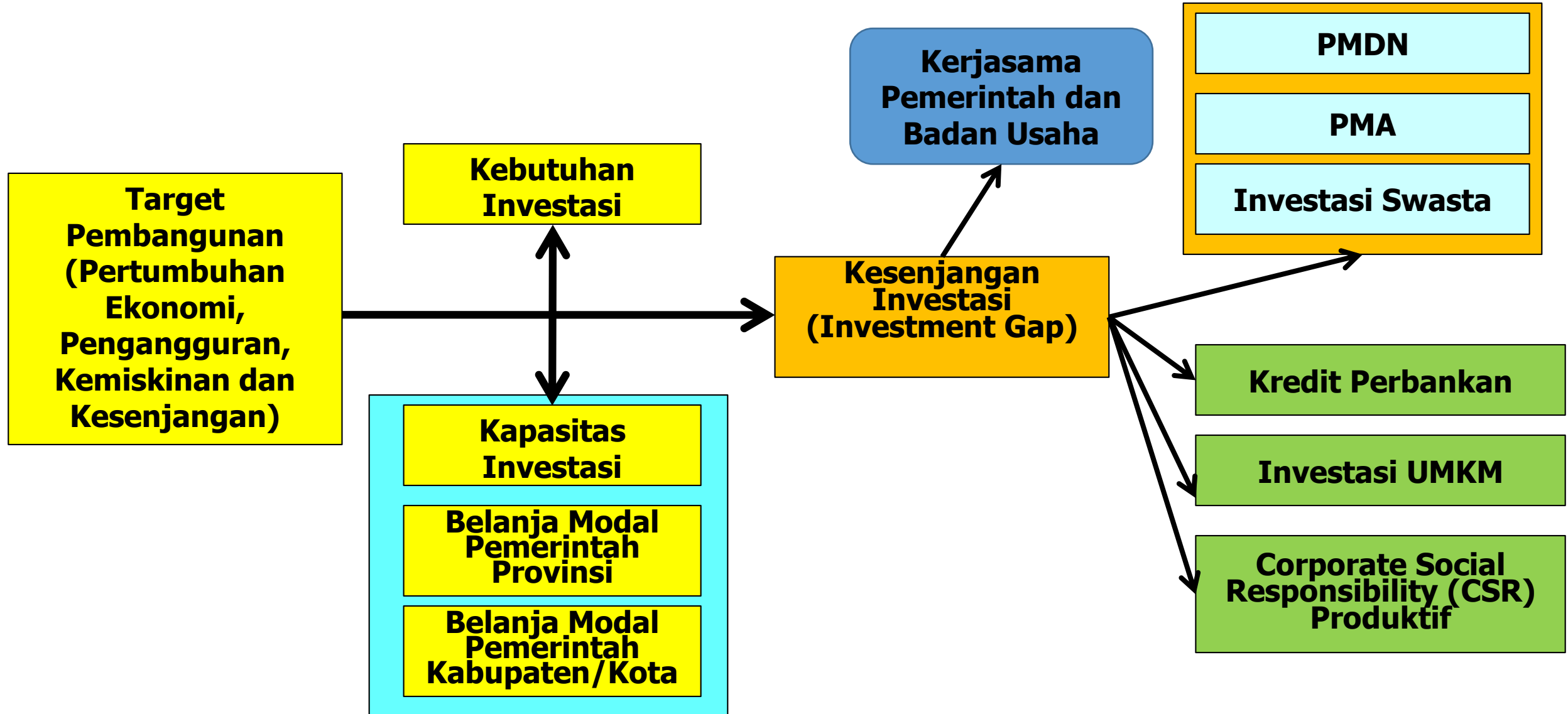
# TARGET PENINGKATAN IPM 2018-2023

[illegible]

# PRIORITAS INVESTASI

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 harus memuat alokasi sumber daya secara jelas khususnya untuk wilayah kabupaten/kota.
2. Investasi harus mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kabupaten/kota.
3. Investasi harus berdampak bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah daerah dan penguatan daya dukung lingkungan secara berkesinambungan.
4. Investasi harus mendorong keterkaitan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan dan pusat-pusat perdagangan daerah.
5. Rencana investasi harus jelas, terukur dan terpadu yang melibatkan OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perbankan dan Swasta.

# SUMBER PENDANAAN INVESTASI



# SUMBER PENDANAAN INVESTASI

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi							
2	ICOR							
3	Tingkat depresiasi (%)							
4	Tingkat tabungan (%)							
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)							
6	Tingkat Inflasi (%)							
<b>7</b>	<b>Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)</b>							
<b>8</b>	<b>Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)</b>							
	a. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten (Rp. Miliar)							
	b. Belanja Modal Pemerintah Kab/kota (Rp. Miliar)							
<b>9</b>	<b>Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)</b>							
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)							
11	Perkiraan Investasi Swasta (Rp. Miliar)							
12	Perkiraan Investasi Swasta PMDN berjalan (Rp. Miliar)							
13	Perkiraan Investasi Swasta PMA berjalan (Rp. Miliar)							
<b>14</b>	<b>Kebutuhan Investasi Swasta Baru</b>							

# PERKIRAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>						
1.1.1	Pajak daerah						
1.1.2	Retribusi daerah						
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan						
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah						
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>						
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak						
1.2.2	Dana alokasi umum						
1.2.3	Dana alokasi khusus						
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya						
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)						
1.3.6	Pendapatan Lainnya						
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>						

# PERKIRAAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*						
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*						
2.1.8	Belanja tidak terduga						
<b>B.</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>						
2.2.1	Belanja pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>						
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>						

# PENUTUP

- Tantangan ke depan tidak mudah, bahkan semakin sulit
  - **Kompetisi** antarbangsa (negara-negara lain juga tidak tinggal diam)
  - **Ketidakpastian** semakin meningkat: pasar global dan perubahan iklim
- **Transformasi sosial, budaya, ekonomi dan digital** akan menjadi kunci percepatan pembangunan daerah
- **Koordinasi** pemerintah pusat-daerah dan pemerintah-dunia usaha semakin penting untuk membangun sinergi
  - Pembangunan **sumber daya manusia** → *link & match* pendidikan-training-industri
  - Pembangunan infrastruktur → **konektivitas** sistem transportasi, sistem logistik dan sistem informasi
  - Hilirasasi pertanian dan pertambangan → Revitalisasi industri pengolahan untuk peningkatan **nilai tambah** komoditi unggulan
  - Promosi sumber-sumber pertumbuhan baru → pariwisata dan industri kreatif
- Perlu berjiwa kewirausahaan dalam melihat peluang pengembangan wilayah, dan bertindak secara sistematis dan akuntabel (*good governance*)

# TERIMA KASIH.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D  
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 Januari 1965  
Golongan : IVC  
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01,  
Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992  
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310  
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195  
E-mail: sumedi@bappenas.go.id  
sumediam@gmail.com

## PENDIDIKAN

1. *Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Thnik Thank)*. Harvard Kennedy School Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
2. *Leadership in Succession and Talent Management*. Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education, Australia. 27 Okt – 1 Nov 2016
3. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
4. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
5. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
6. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
7. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

## PEKERJAAN

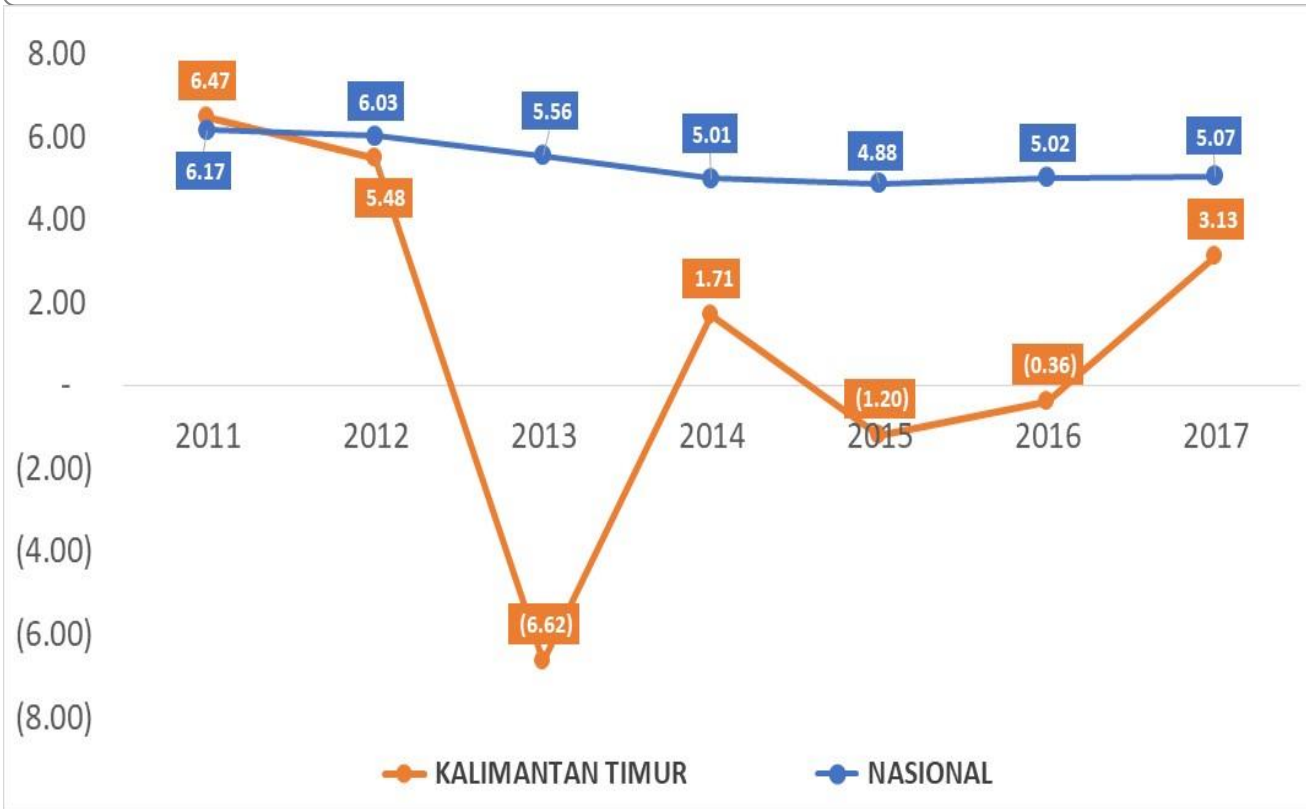
1. Direktur Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. September 2016-sekarang
2. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah. Januari 2006-September 2016
3. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Mei 2004-Jan. 2006
4. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Des. 2000-Mei 2004
5. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Mei 1999 –Des. 2000
6. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Maret 1994 –Jan. 1997
7. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, 1991-Maret 1994



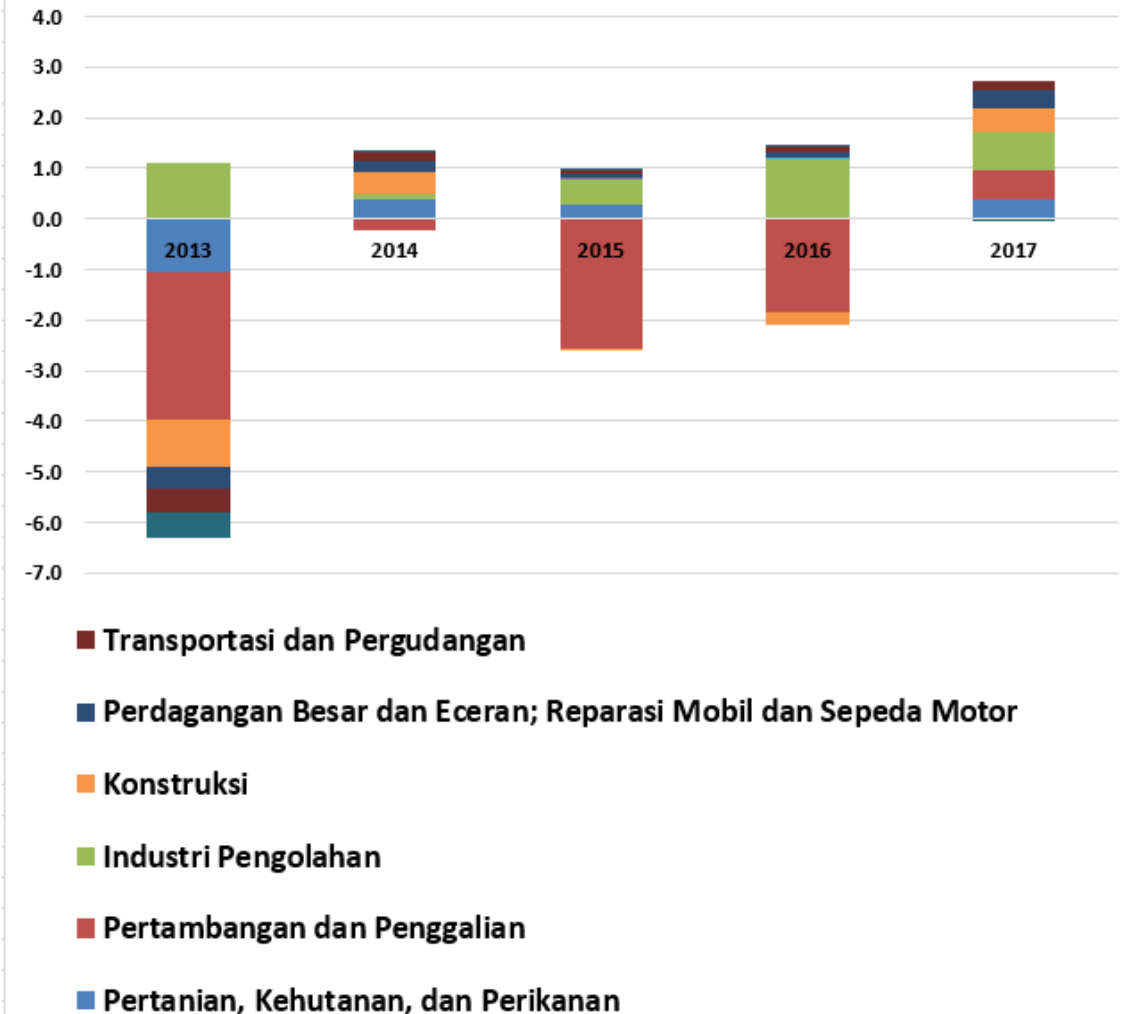
**LAMPIRAN**

# Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017



Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari Sisi Produksi Tahun 2013-2017



Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi:

- Sektor Pertanian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Kontruksi
- Sektor Perdagangan besar dan eceran
- Sektor Transportasi dan Pergudangan

# Share Ekonomi Provinsi Terhadap Pulau dan Nasional

## Rata-Rata Share Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pulau dan Nasional Tahun 2011-2017



Terhadap  
Pulau Kalimantan  
**57,63 %**

Share Terbesar

**1**

Dari 5 Provinsi di  
Pulau Kalimantan



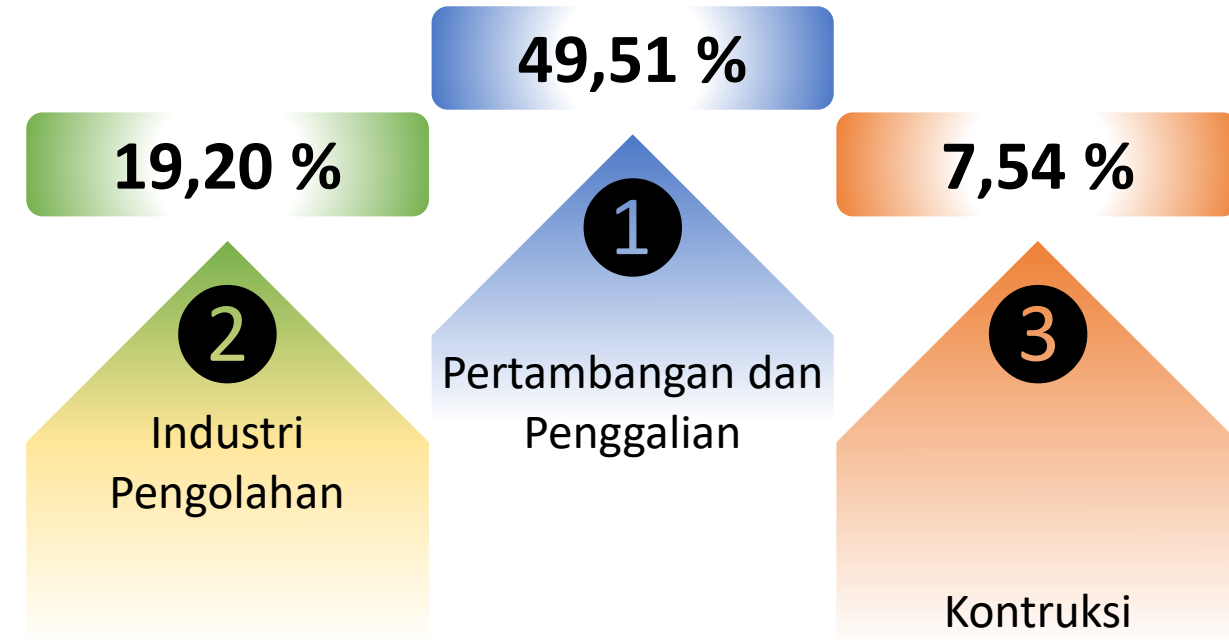
Terhadap Nasional  
**5,13 %**

Share Terbesar

**6**

Dari 34 Provinsi  
secara Nasional

## ③ SEKTOR DENGAN RATA-RATA SHARE TERBESAR TAHUN 2012 S/D 2017



# PDRB Sisi Pengeluaran Tahun 2014-2017

## RATA-RATA SHARE PENGELUARAN TAHUN 2014-2017

**KONSUMSI RUMAH TANGGA**

**16,71 %**

**LEMBAGA SWASTA NIRLABA**

**0,45 %**

**KONSUMSI PEMERINTAH**

**4,46 %**

**PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO**

**27,53 %**

**EKSPOR BARANG DAN JASA**

**108,14%**

**IMPOR BARANG DAN JASA**

**58,33 %**

## RATA-RATA PERTUMBUHAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2014-2017

**KONSUMSI RUMAH TANGGA**

**2,12 %**

**LEMBAGA SWASTA NIRLABA**

**5,01 %**

**KONSUMSI PEMERINTAH**

**-8,37 %**

**PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO**

**-0,17 %**

**EKSPOR BARANG DAN JASA**

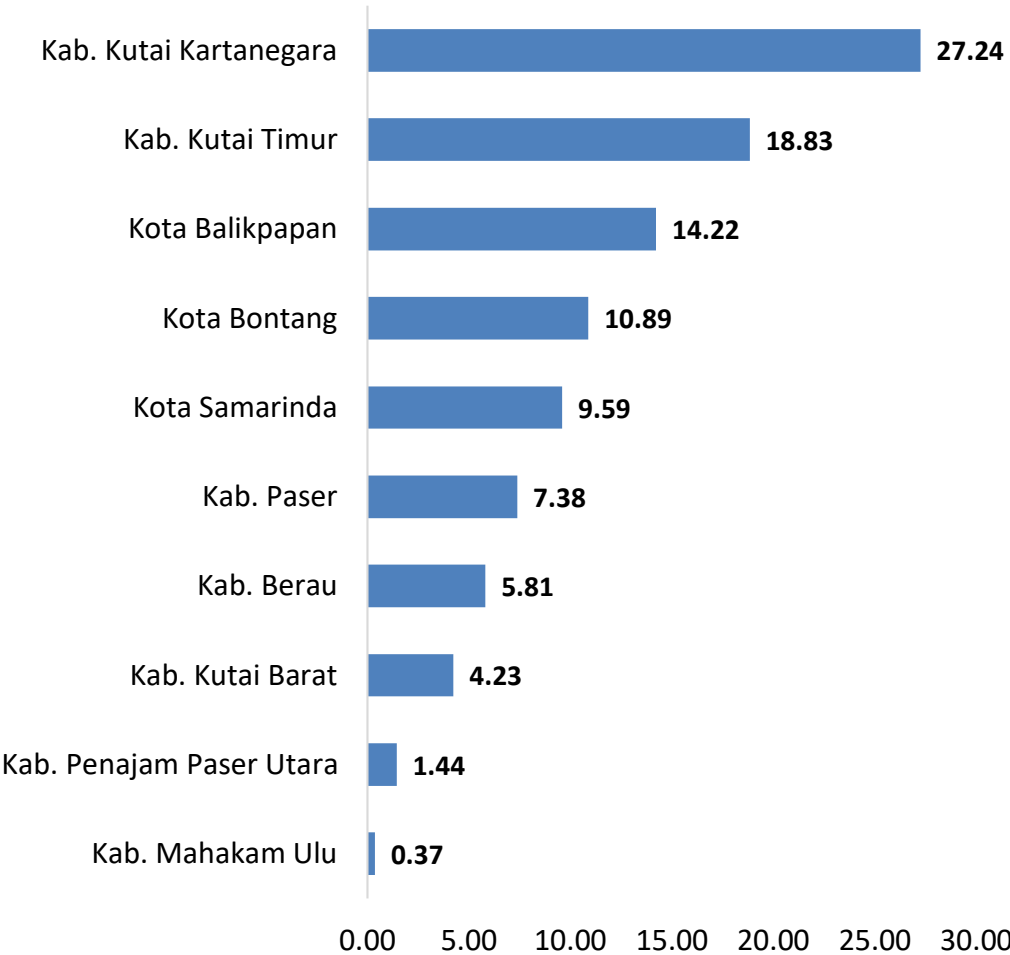
**1,92%**

**IMPOR BARANG DAN JAS**

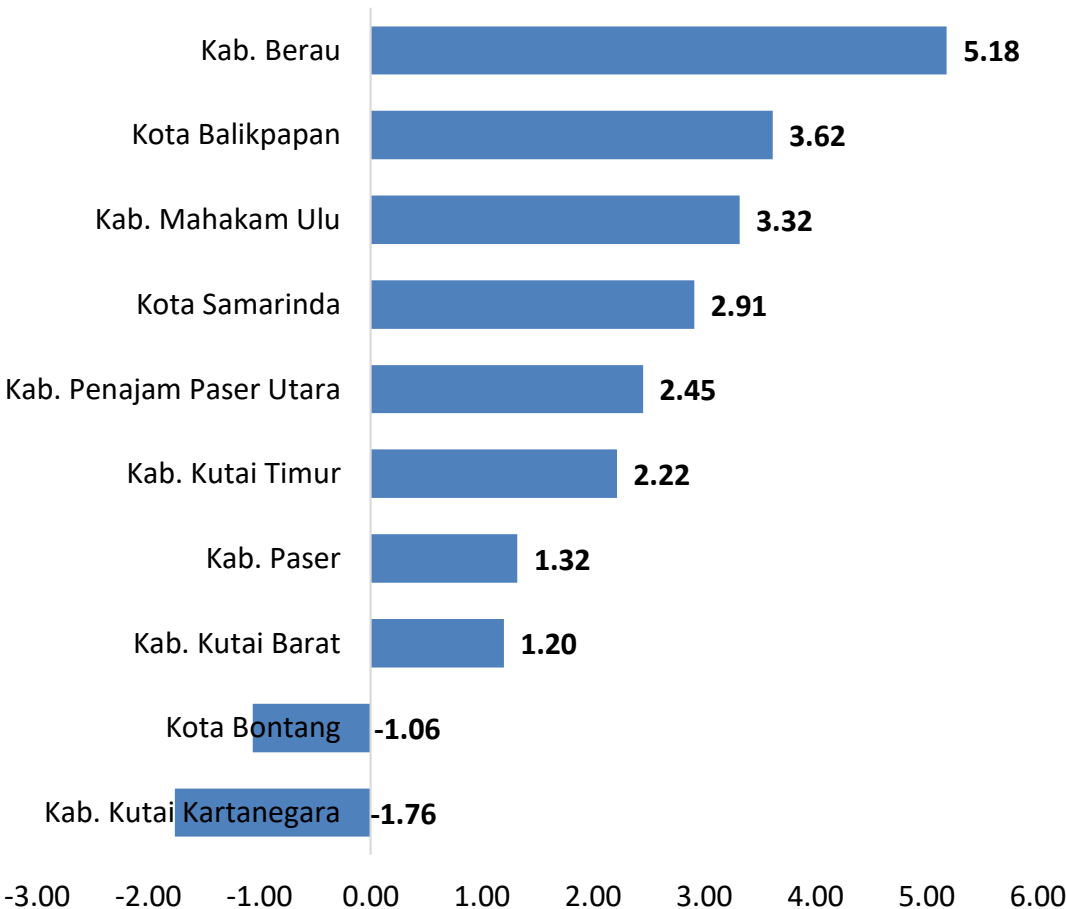
**2,04 %**

# Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017

Rata-rata Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



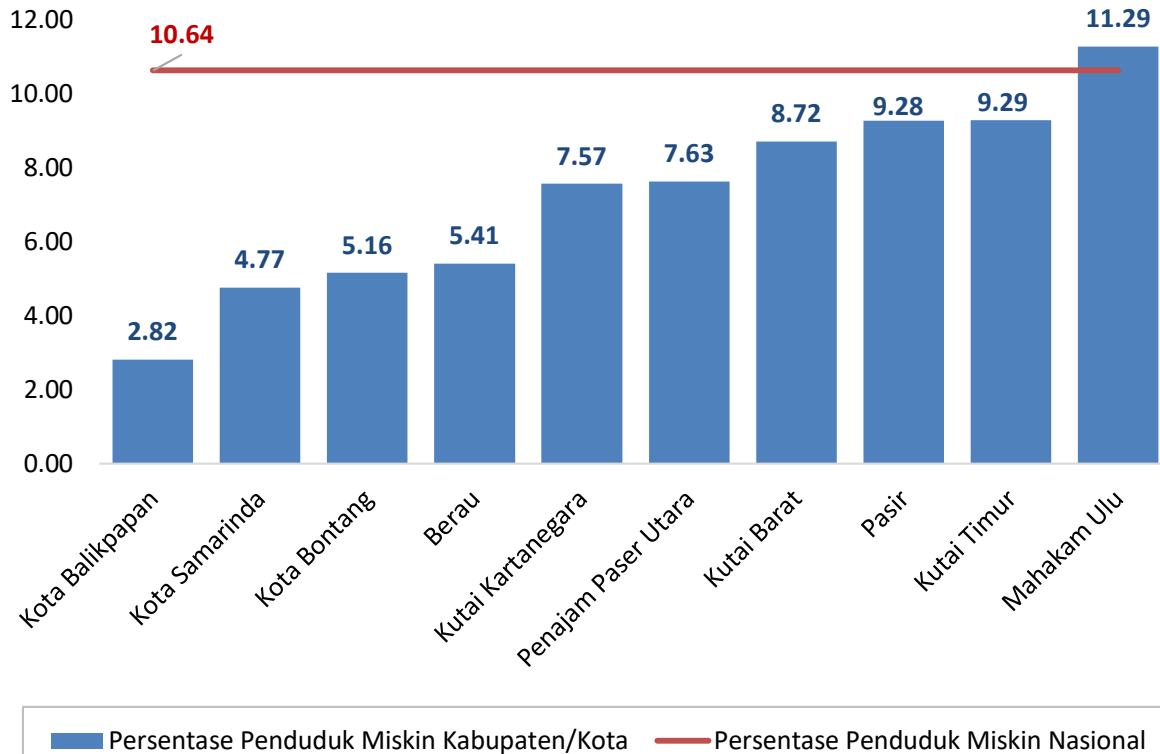
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017



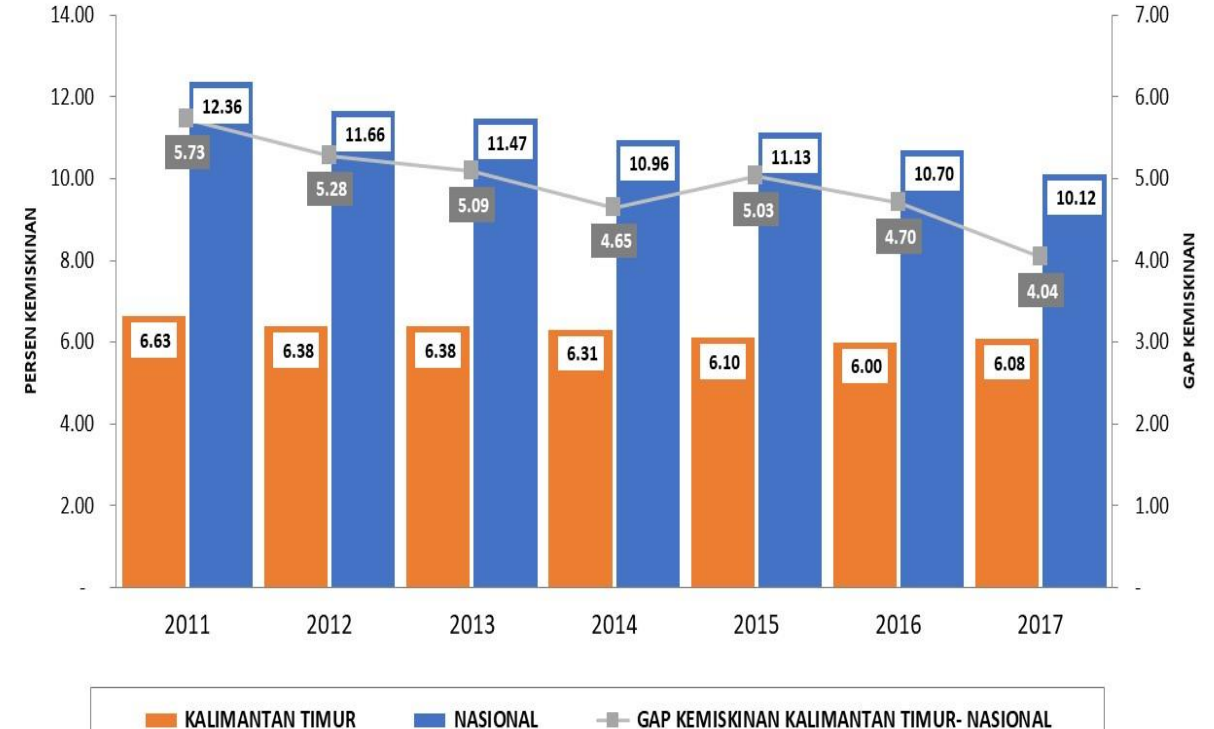
Kontribusi terbesar PDRB Kalimantan Timur disumbang dari Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, dan Kota Balikpapan dengan total kontribusi > 50 persen. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara mengalami percepatan. Hal ini akan cukup baik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah

# Tingkat Kemiskinan Rendah di Bawah Rata-rata Nasional

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Kalimantan Timur Tahunm 2017 (Maret)



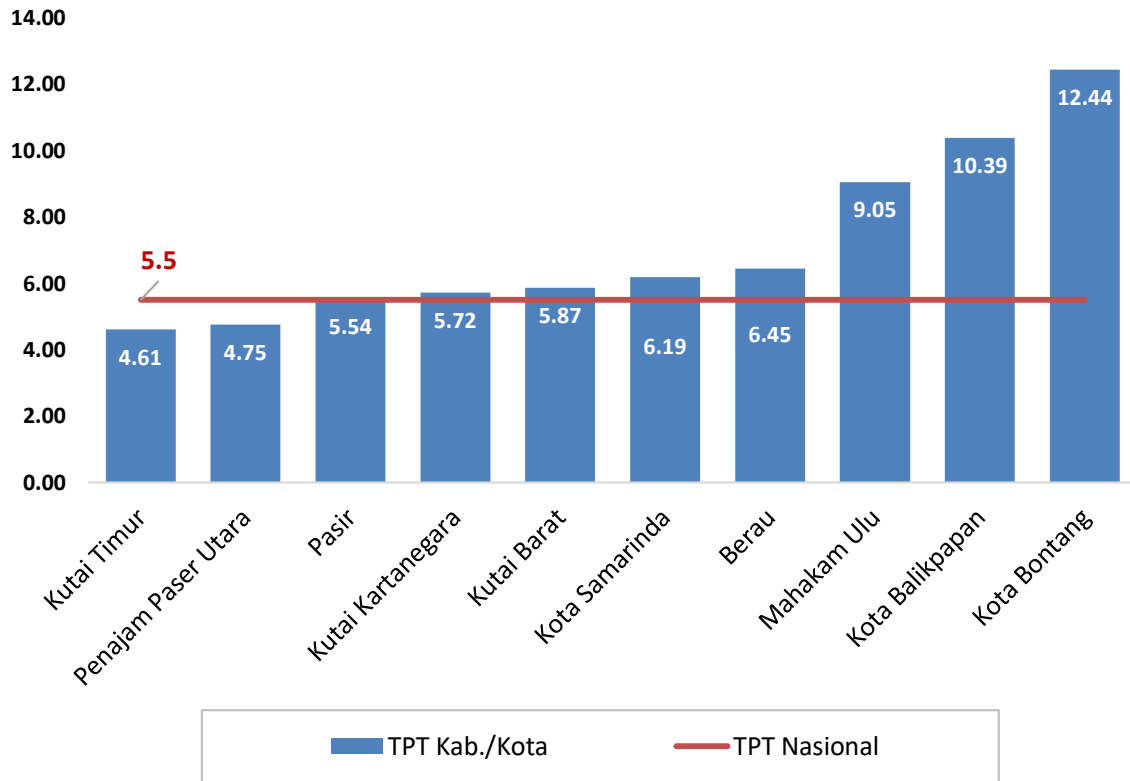
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2011 – 2017 (September)



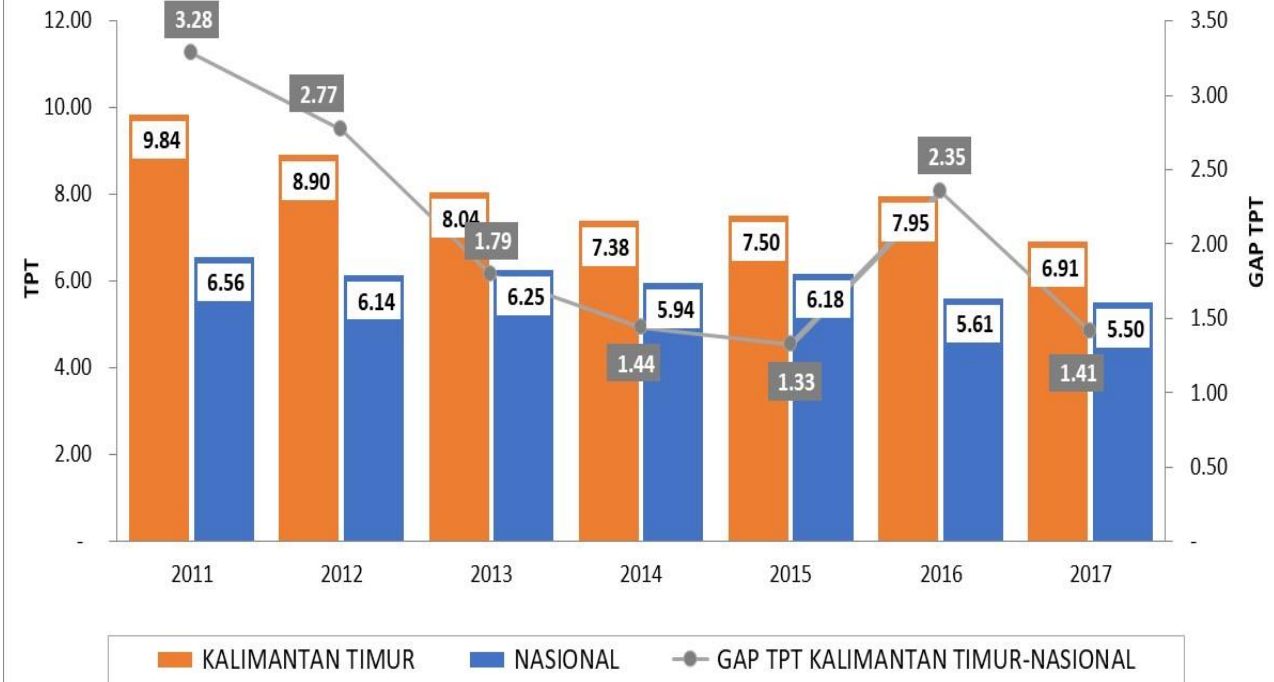
Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur berada jauh di bawah angka Kemiskinan Nasional, dan cenderung menurun setiap tahunnya. Hal yang sama kemiskinan di Kabupaten/kota relatif rendah dibawah angka kemiskinan nasional, kecuali di Kabupaten Mahakam Ulu kemiskinan masih tinggi mencapai 11,29 persen. Untuk pengurangan kemiskinan di Kalimantan Timur, perlu perhatian khusus pemerintah dalam peningkatan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan lapangan pekerjaan

# Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rata-rata masih tinggi ....

Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur  
Tahun 2017 (Agustus)



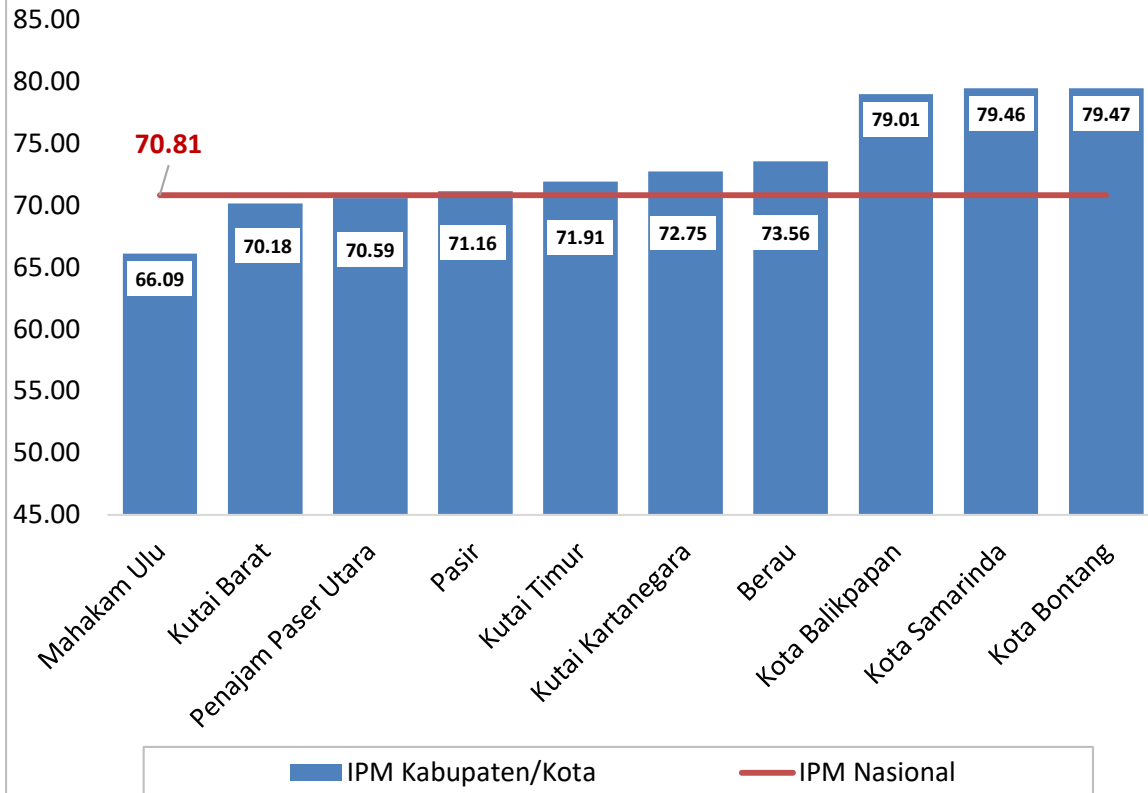
Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional  
Tahun 2011 – 2017 (Agustus)



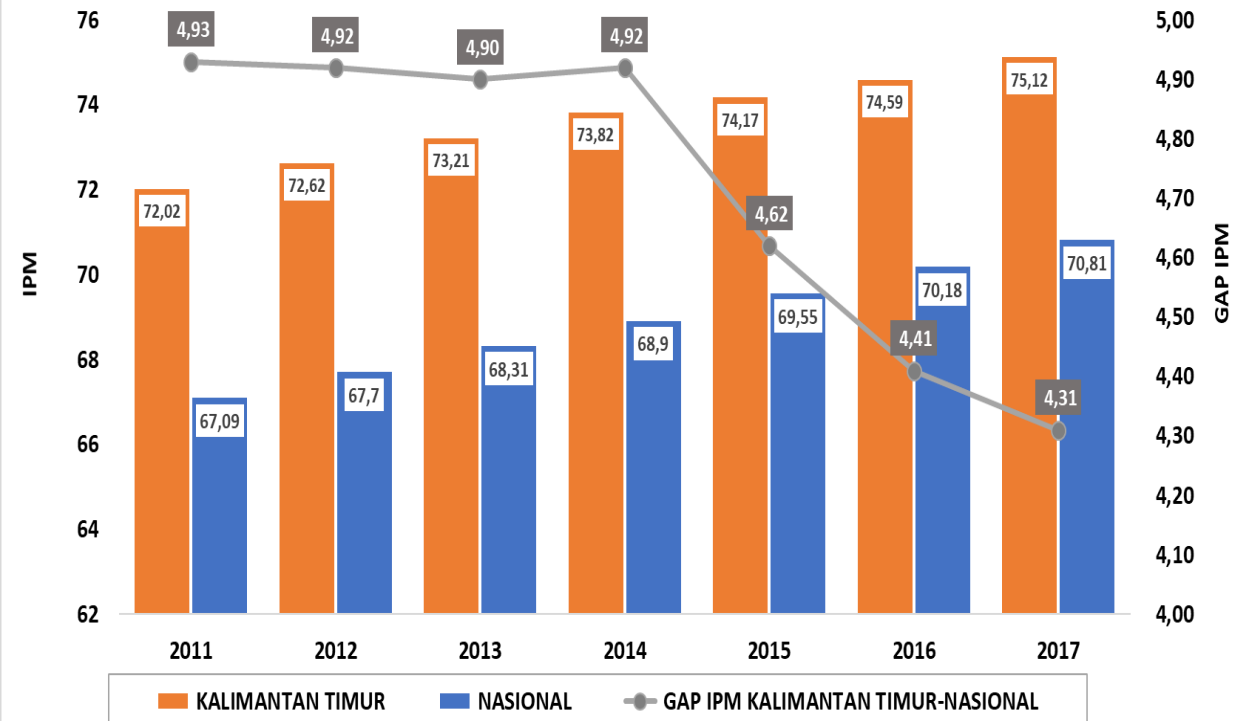
*Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur masih berada diatas rata-rata nasional. Hal yang sama sebagian besar kabupaten/kota dengan angka pengangguran masih tinggi, kecuali di Kab. Kutai Timur dan Penajam Paser Utara rata-rata di bawah nasional. Upaya untuk penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur, diperlukan perhatian pemerintah terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan*

# Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017

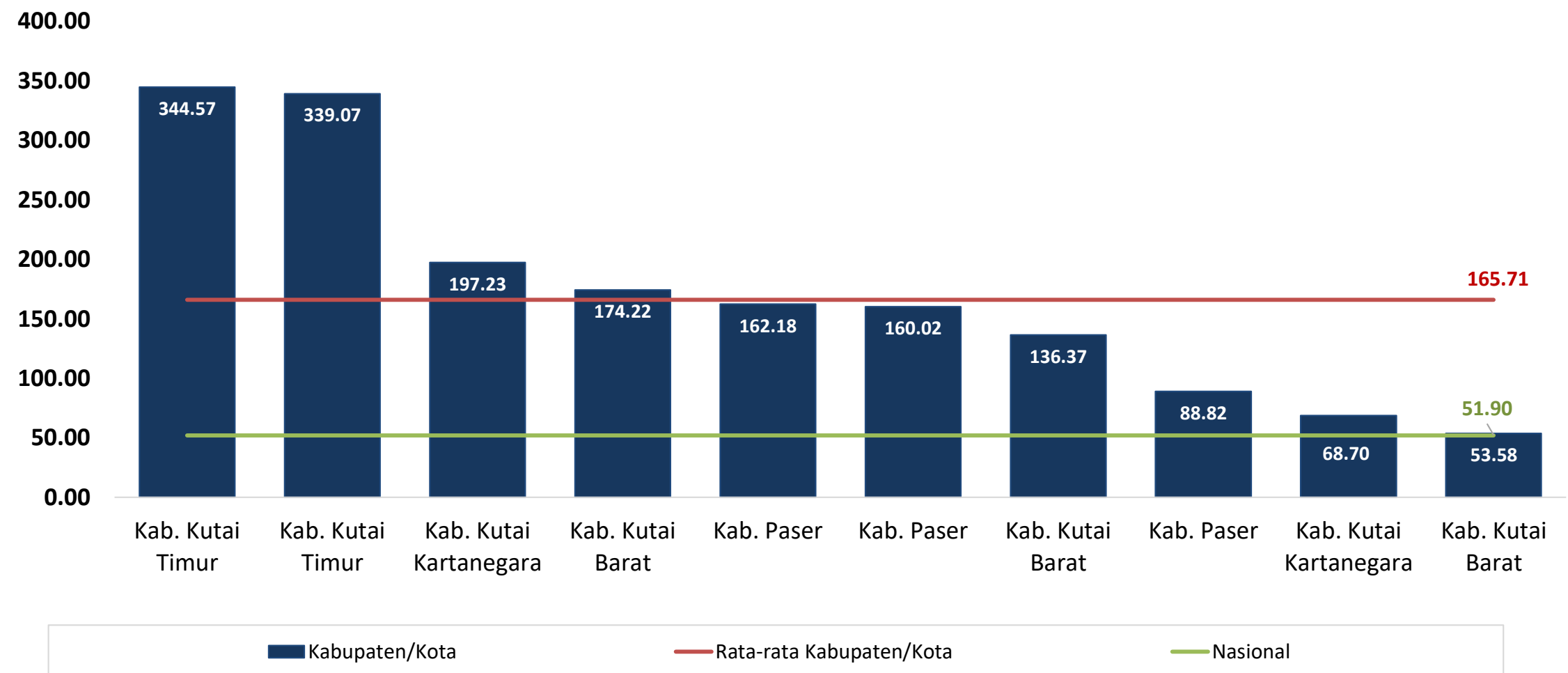


Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2011 – 2017



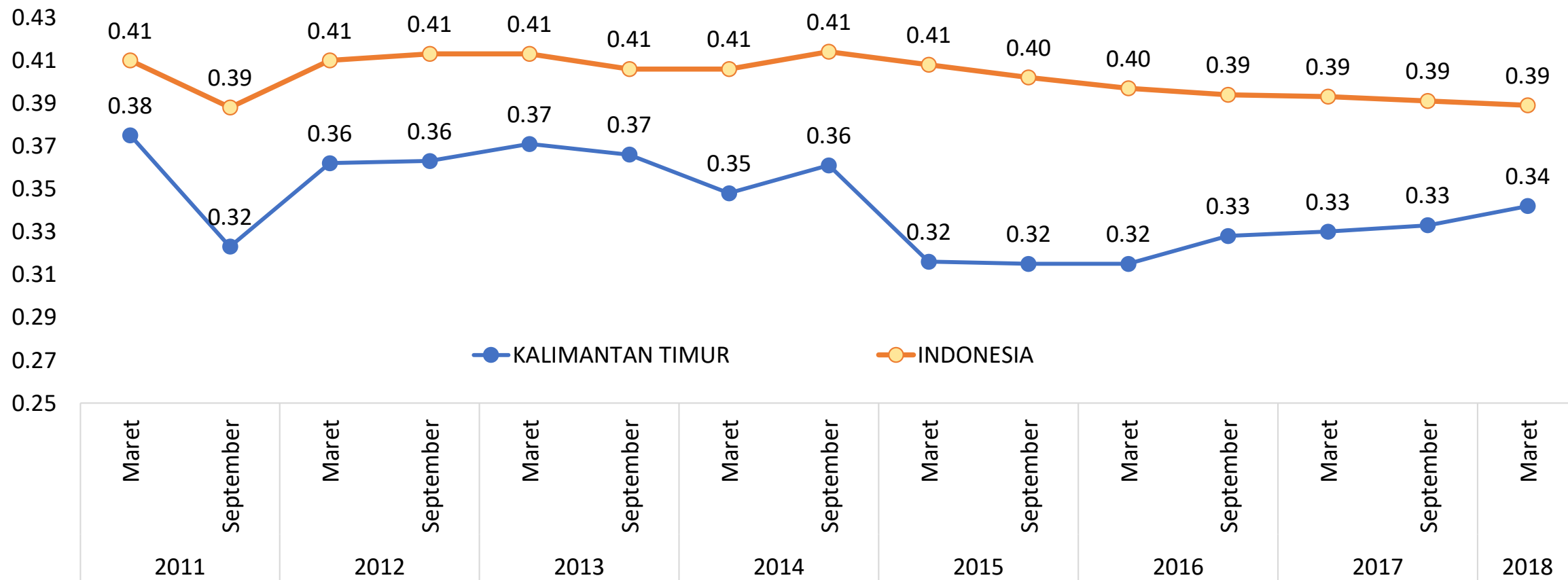
IPM Provinsi Kalimantan Timur berada diatas rata-rata IPM Nasional, dan menunjukan adanya Gap yang cukup tinggi antara IPM Kalimantan Timur dan nasional. Hal yang sama IPM untuk kab./kota sebagian besar berada diatas rata-rata nasional, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat . Untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Timur perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan kemudahan dalam mengakses lapangan pekerjaan.

# PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA ADHB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (RP JUTA/JIWA)



Adanya Gap PDRB Perkapita cukup tinggi antara PDRB perkapita tertinggi di Kab. Kuatai Timur dengan PDRB Perkapita terendah di Kab. Kutai Barat

# Perkembangan Gini Rasio Kalimantan Timur Tahun 2011-2018



*Gini rasio Provinsi Kalimantan Timur relatif rendah dari rata-rata nasional, dengan kisaran Gini rasio 0,32-0,38. Namun ada kecenderungan meningkat sejak tahun 2015*

## **3. KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI**

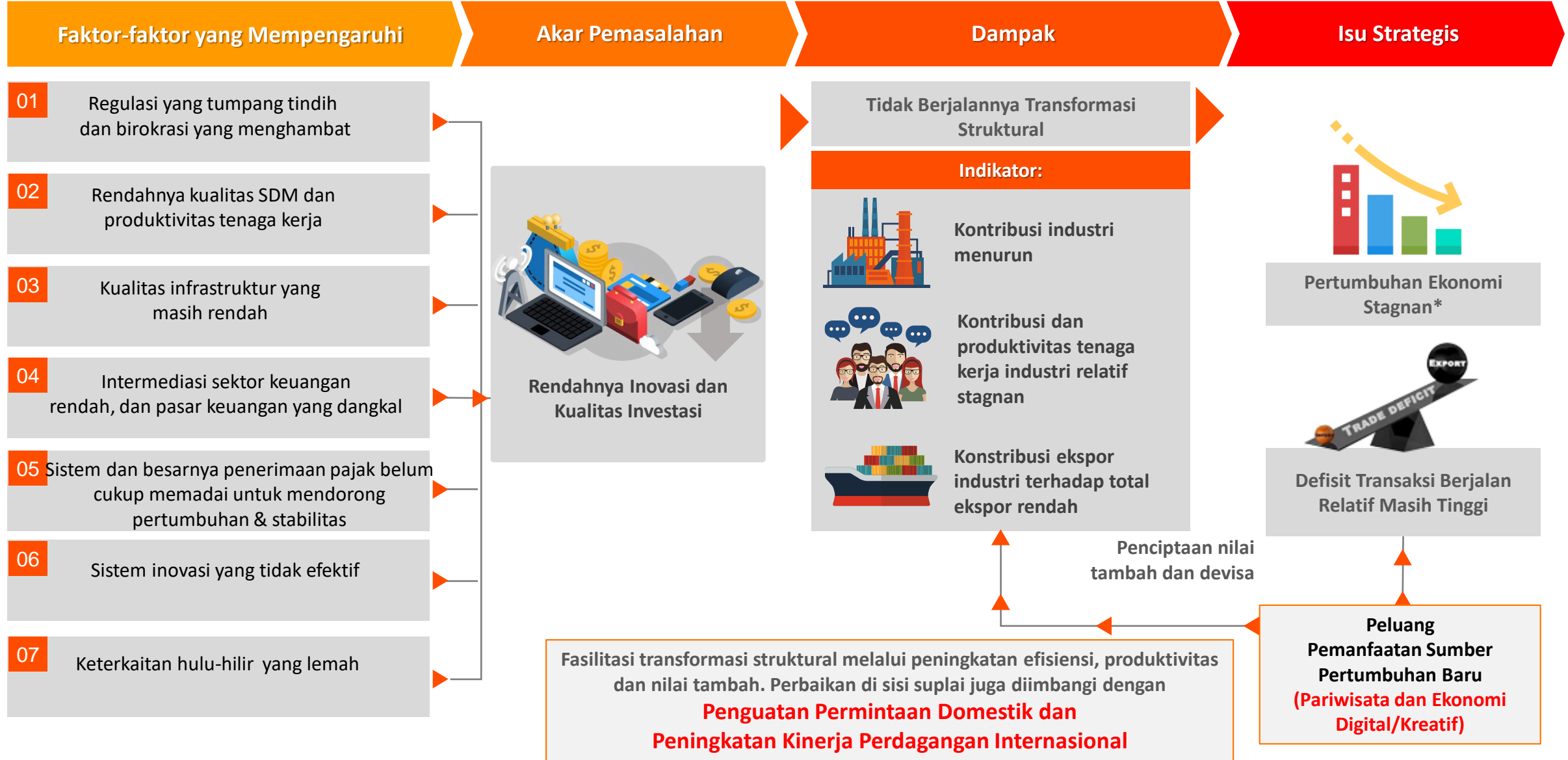
**3.1 Gambaran Ekonomi Domestik**

**3.2 Isu Strategis & Arah Kebijakan Revitalisasi Industri Nasional**

**3.3 Isu Strategis & Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata**

**3.4 Isu Strategis & Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif**

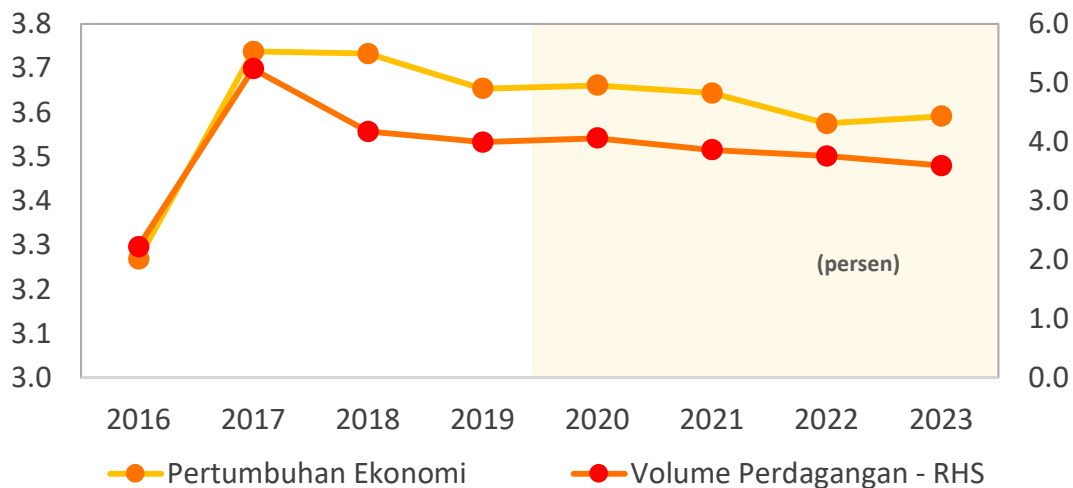
# Gambaran Ekonomi Domestik dan Isu Strategis Ekonomi 2020-2024 : Perkuatan Transformasi Struktural



\*dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan

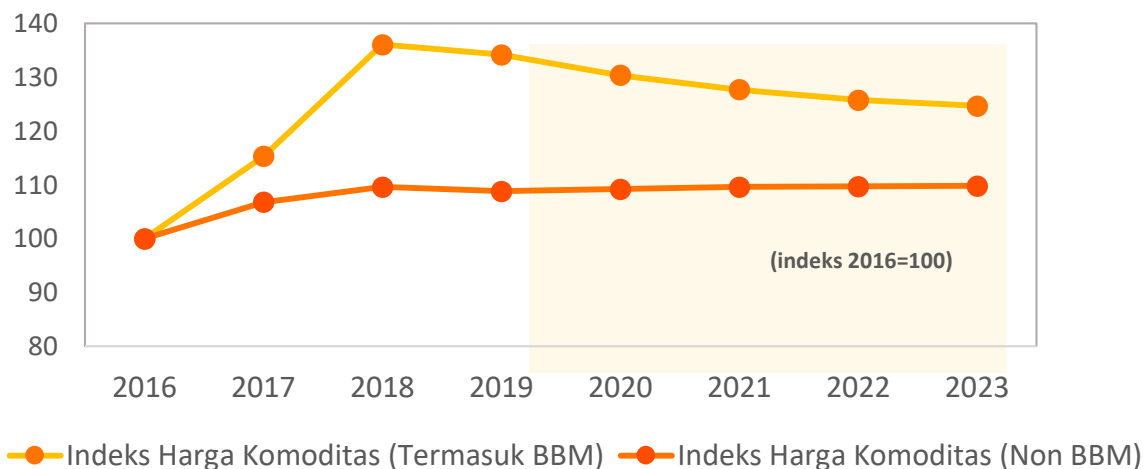
# Lingkungan Eksternal Lima Tahun ke Depan

## Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia cenderung melambat



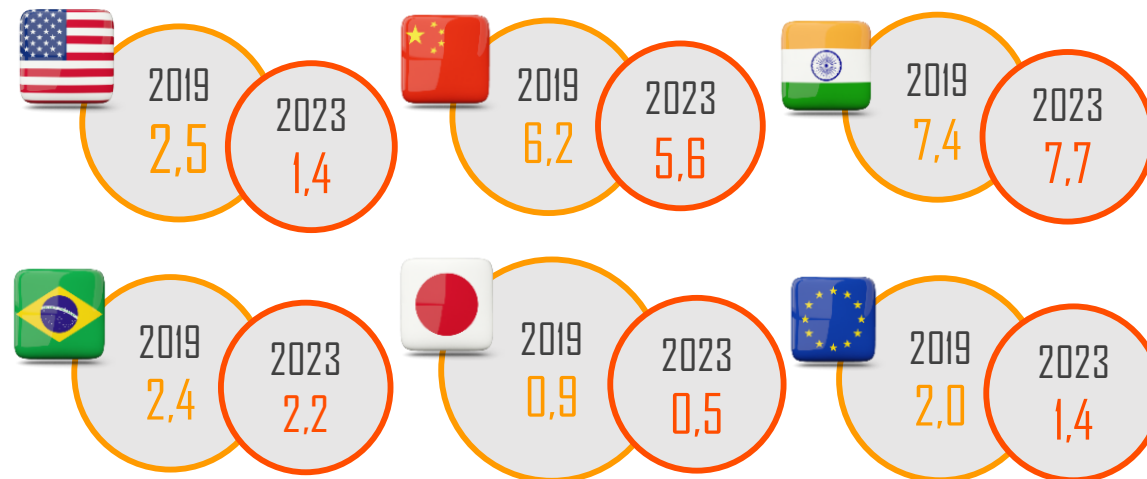
Sumber: *World Economic Outlook* Oktober 2018

## Harga komoditas internasional cenderung menurun



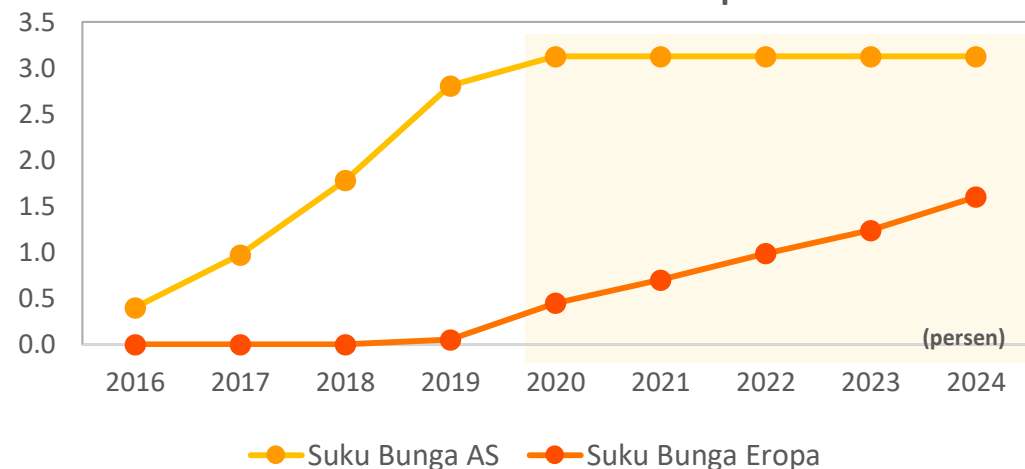
Sumber: *Pink Sheet*, World Bank

## Perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama (persen)



Sumber: *World Economic Outlook* Oktober 2018

## Tekanan normalisasi kebijakan moneter beralih dari AS ke kawasan Eropa



Sumber: *Oxford Economics*

# KERANGKA REVITALISASI SEKTOR INDUSTRI UNTUK MENDORONG TRANSFORMASI STRUKTURAL

## SISI KONSUMSI

### Pendekatan Umum:

- Fasilitas Ekspor
- Pengembangan SDM

**Manufaktur  
Berkas Ekspor**

- Pasar domestik sebagai **tempat ujicoba** sebelum memasuki pasar internasional yang kompetitif

Meningkatkan kapasitas pemenuhan pasar domestik sebagai tahapan menuju daya saing internasional

- Daya beli domestik sebagai **pasar baru/penciptaan produk**

**Sumber Pertumbuhan Baru**

### Pendekatan Spesifik: mendukung

- **Jasa dan Ekonomi Digital**
  - Pariwisata
  - Ekonomi Kreatif/Digital
- **Gaya Hidup Halal dan Sehat**
- **Pengadaan Pemerintah \***

*spillover effect*  
dan  
peningkatan  
kualitas

Penciptaan  
permintaan  
untuk produksi  
manufaktur

**Reformasi Institusi dan  
Regulasi**

**Input perantara  
berbasis Sumber  
Daya Alam**

**Input Barang  
Modal**

**Barang Final**

## SISI PRODUKSI

### Pendekatan Spesifik

Penyediaan energi pada harga yang kompetitif

Fasilitasi investasi dan impor barang modal yang tidak tersedia pada pasar domestik

### Pendekatan Umum

Menaikkan produktivitas

Mengurangi biaya operasional dan biaya *service-link*

## Isu Strategis



Gejala *premature de-industrialisasi* dimana kontribusi PDB industri di Indonesia yang turun lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang setara



Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Tiongkok

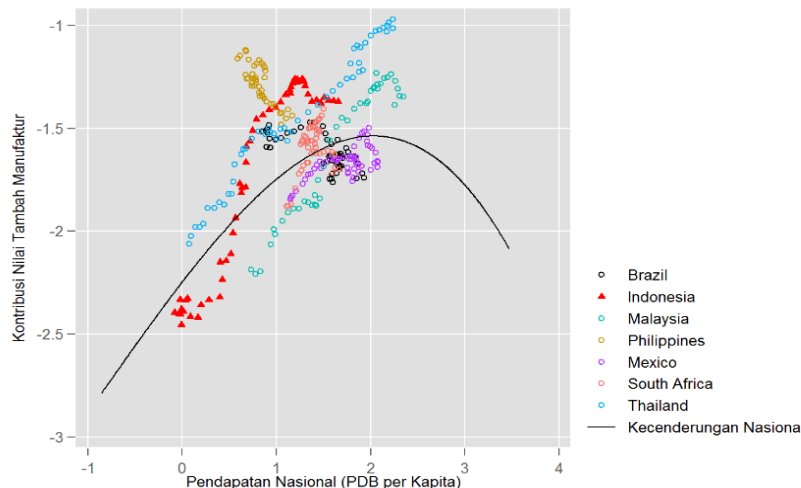


Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara, terutama untuk produk yang berteknologi tinggi

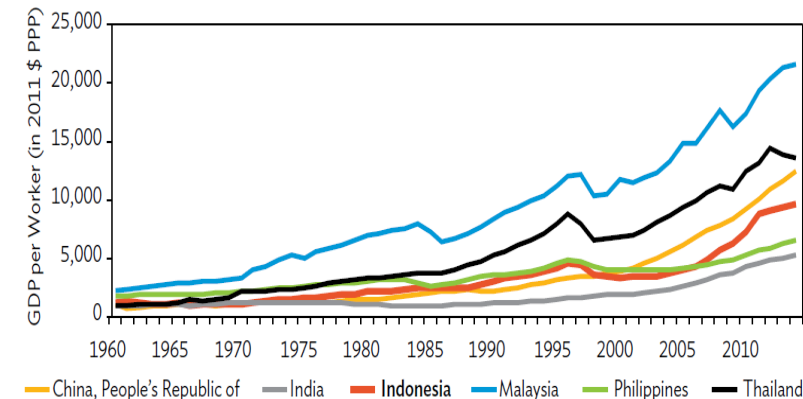


Ketergantungan impor yang tinggi: 71 persen impor (bahan baku dan barang modal) → sektor industri

## Kontribusi Nilai Tambah Sektor Manufaktur Terhadap PDB

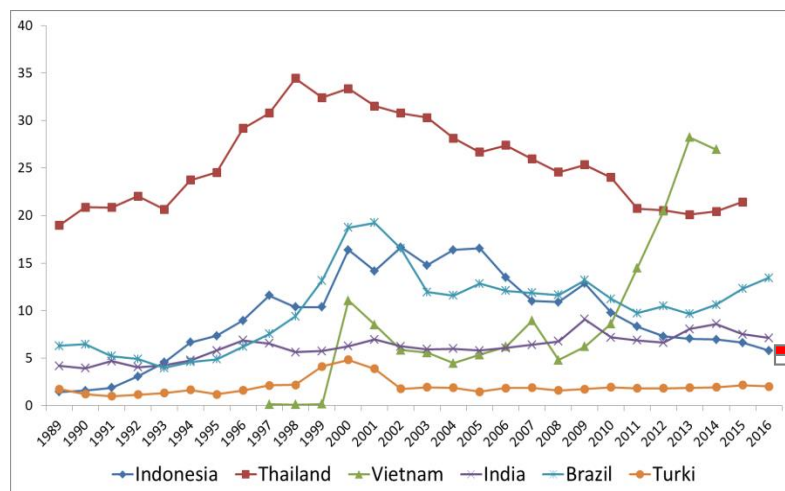


## Produktivitas Tenaga Kerja Antar Negara Asia (USD)



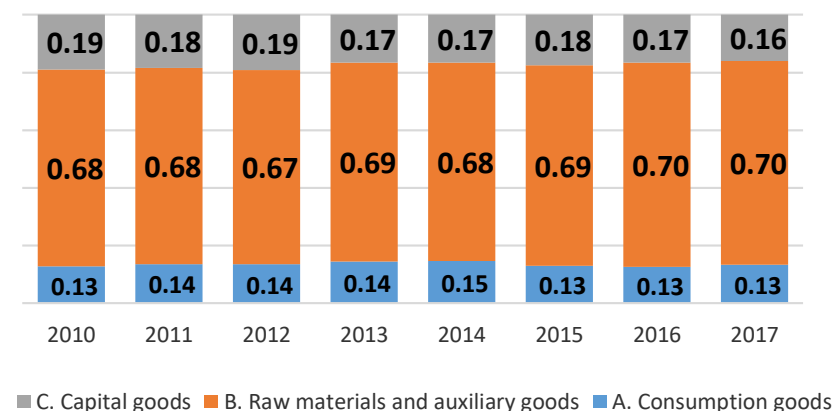
Sumber: Indonesia Enhancing Productivity through Quality Jobs, ADB 2108

## Persentase Ekspor Manufaktur Berteknologi Tinggi



Sumber: Bank Dunia (2018)

## Persentase Impor Berdasarkan Kategori Barang (%)



Sumber: Bank Indonesia

# SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI 2020-2024

## Sasaran

Meningkatnya daya saing dan kapasitas basis industri (SDM dan struktur industri) untuk mendukung transformasi struktural dan pertumbuhan yang berkualitas

## Indikator dan Target

1. Pertumbuhan PDB Sektor Industri 5,40-7,05% (*average*)
2. Pertumbuhan PDB Sektor Industri Non Migas 5,79-7,44% (*average*)
3. Kontribusi Ekspor Produk Industri 59,60 – 68,40 % (*End of Period*)
4. Share Investasi PMA/PMDN Sektor Sekunder 51,43-54,43 % (*End of Period*)
5. Proporsi Tenaga Kerja Industri 15,7% (*End of Period*)

## Arah Kebijakan



**1 Peningkatan Produktivitas SDM Industri**



**2 Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Industri**



**3 Perkuatan Struktur Industri Hulu Strategis**

## Strategi



**1**

Memperkuat Iklim Investasi dan Keterbukaan Perdagangan dalam Rantai Nilai Produksi Global



**4**

Meningkatkan Diplomasi Ekonomi Internasional dan Pemanfaatan *Free Trade Agreement*



**2**

Meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri dan kemajuan teknologi



**5**

Menciptakan Kebijakan Makroekonomi yang Kondusif



**6**

Optimasi Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Potensial



**3**

Memperkuat Kemampuan RD&D, Inovasi dan Percepatan Adopsi Teknologi



**7**

Memperkuat Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri

# KERANGKA REGULASI SERTA INDIKASI LOKASI PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI 2020-2024

## Kerangka Regulasi

- PP dan PMK terkait penyediaan insentif fiskal untuk ekspor, vokasi, serta *research development and design*
- Perpres terkait penyediaan fasilitasi untuk *turn key projects* di sektor industri
- UU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

## Fokus Pengembangan, antara lain:

### Hulu:

- Hilirisasi hasil pertanian dan kehutanan (agroindustri)
- Kimia
- Logam

### Hilir (ekspor):

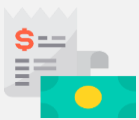
- Makanan minuman
- Otomotif
- Elektronik dan elektrikal
- Mesin dan peralatan
- Farmasi
- Tekstil dan produk tekstil
- Alas kaki

## Indikasi Lokasi

- 25 Kawasan Industri/KEK berbasis industri dalam PSN
  - 2 Kawasan Industri/KEK dievaluasi untuk berpotensi *graduate* dari PSN
  - 2 Kawasan Industri dalam evaluasi prioritas RPJMN 2015-2019 untuk reorientasi
  - Penambahan 2 Kawasan Industri (masih dalam proses evaluasi)
- Pengembangan dan revitalisasi sentra industri, kecil dan menengah

# ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA (1)

## Isu Strategis



Peningkatan devisa pariwisata terutama terkait pengeluaran dan lama masa tinggal wisatawan mancanegara



Pangsa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih rendah terhadap:

Dunia = 1,1%  
Asia Pasifik = 4,3%  
ASEAN = 11,7%

Sumber: CEIC



Kesiapan dan daya dukung destinasi: beberapa indikator daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 30% terbawah

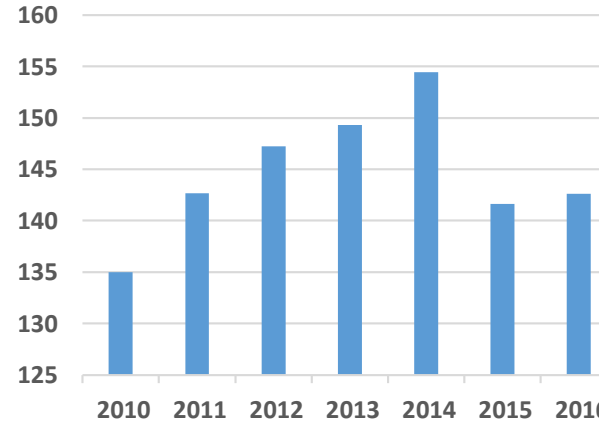


Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pariwisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata

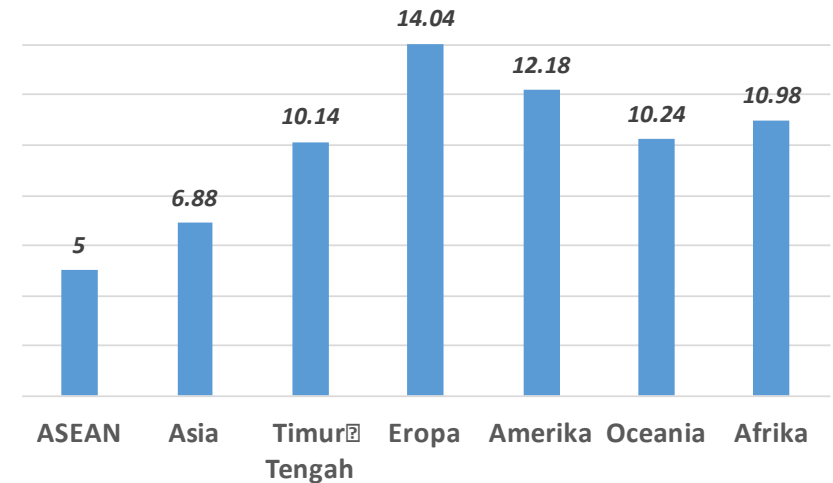


Kurangnya infrastruktur konektivitas: Beban bandara di Indonesia yang tidak merata

Rerata Pengeluaran per Wisatawan per hari (USD)



Lama Kunjungan (Hari)



Sumber: CEIC

Indeks Daya Saing Pariwisata

### Performance Overview

Pillar Rank/136

International Openness 17th

Prioritization of Travel & Tourism 12th

ICT readiness 91st

Human resources and labour market 64th

Health and hygiene 108th

Safety and security 91st

Business environment 60th

Key Score → Highest score

Pillar Rank/136

Price competitiveness 5th

Environmental sustainability 131st

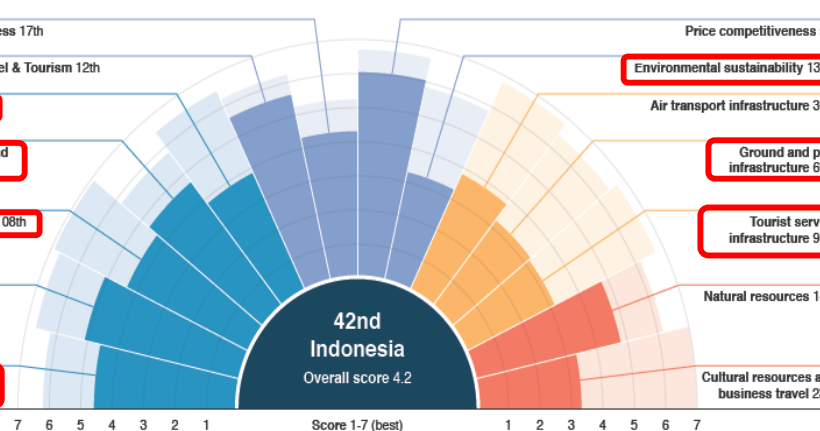
Air transport infrastructure 36th

Ground and port infrastructure 69th

Tourist service infrastructure 96th

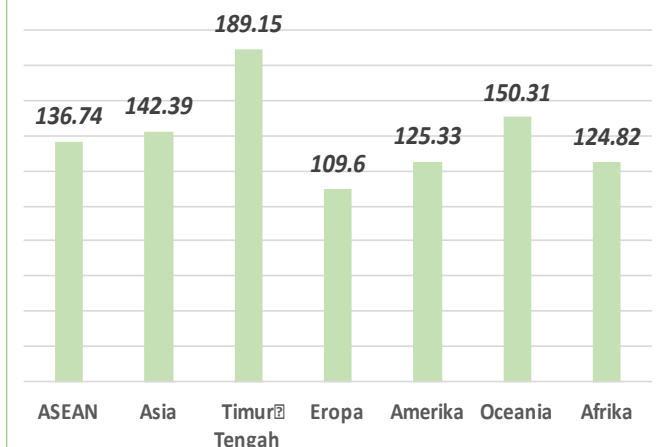
Natural resources 14th

Cultural resources and business travel 23rd



Sumber: Travel & Tourism Competitiveness Index, 2017)

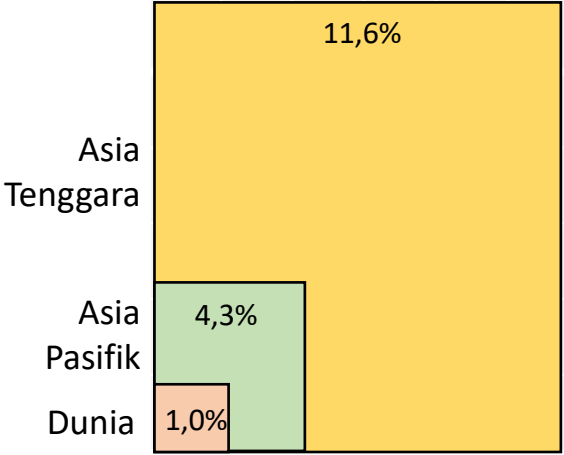
Rerata Pengeluaran (USD/hari)



Sumber: PES 2016

# ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA (2)

## Market share



## Persebaran wisman dan wisnus

Kawasan	Wisman 2015 (%)	Wisnus 2015 (%)
Sumatera	15,08	19,63
Jawa	15,80	51,46
Bali NT	52,55	5,78
Kalimantan	0,77	7,81
Sulawesi	0,80	5,69
Mal Papua	0,97	3,40

## SDM hospitality



## Beban bandara tidak merata

Destination city	Usable remain capacity
Medan	limited
Batam	fair
Jakarta	none
Bandung	limited
Semarang	limited
Yogyakarta	none
Surakarta	fair
Surabaya	none
Denpasar	none
Lombok	fair
Makassar	limited
Manado	limited

## Wisata massal



Peningkatan kunjungan wisatawan membutuhkan segmentasi baik terkait asal (originasi), akses (terutama bandara), tujuan (destinasi), dan kualitas layanan (SDM).

# SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA 2020-2024

## Sasaran

Meningkatnya citra, daya saing dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

## Indikator dan Target

1. Nilai devisa pariwisata 31-40 miliar USD
2. Jumlah wisatawan mancanegara 26-28 juta orang
3. Jumlah wisatawan nusantara 300 juta orang
4. Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata 15 juta orang\*
5. Kontribusi PDB Sektor Pariwisata (masih menunggu konfirmasi penataan data pariwisata oleh BPS)
6. Peningkatan *Travel and Tourism Competitiveness Index* menjadi peringkat ke-20 s.d 25

\*Menunggu konfirmasi data dari BPS

## Arah Kebijakan

1. Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata
2. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur dan Tata Kelola Pariwisata
3. Peningkatan Daya Saing SDM Pariwisata
4. Peningkatan Daya Saing Citra Pariwisata

## Strategi

1. Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal;
2. Peningkatan inovasi dan diversifikasi daya tarik pariwisata untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara;
3. Peningkatan kualitas SDM pariwisata;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pariwisata;
5. Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung standar pariwisata berkelanjutan; dan
6. Penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran.

# KERANGKA REGULASI DAN INDIKASI LOKASI PEMBANGUNAN PARIWISATA 2020-2024

## Kerangka Regulasi

- PP Penetapan KEK Pariwisata
- Perpres Badan Otorita Pengelola
- Perpres untuk *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)
- Kelembagaan khusus untuk mendorong MICE
- Evaluasi Perpres 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

## Fokus Pengembangan

- *Meeting, Incentives, Conference, Exhibition* (MICE)
- Wisata minat khusus (ekowisata, wisata bahari, *adventure*, *cruise*, *heritage*, halal)
- Diplomasi gastronomi
- *Cross border tourism*

## Indikasi Lokasi

- Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
- Penambahan 8 Destinasi Pariwisata Prioritas Baru
- Pengembangan 8 Taman Nasional Prioritas dengan konsep ekowisata
- Penguatan daya dukung dan daya saing Destinasi *Branding* (destinasi dengan *brand* yang sudah kuat)



# ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL (1)

## ISU STRATEGIS 2015-2019

**Pertumbuhan PDB Ekraf < dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 12% di tahun 2019.** PDB Ekraf masih bertumpu pada subsektor berbasis seni/budaya/ tradisi (Kuliner, Fashion, Kriya: 75% PDB Ekraf).

**Akses Pembiayaan untuk usaha Ekraf masih terbatas:** Sebagian besar masih menggunakan modal sendiri (92%) (SKEK, 2016)

**Kepemilikan HKI masih rendah:** Belum ada urgensi untuk mengklaim dan memonetisasi HKI. Hanya 11% pelaku Ekraf memiliki HKI.

**Pertumbuhan populasi usaha Ekraf di luar Jawa masih rendah:** dan sekitar 65,37% dari total perusahaan tersebut ada di Pulau Jawa.

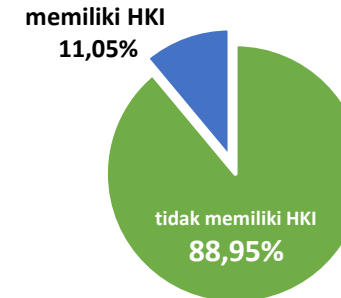
**Penguatan ekosistem E-commerce yang terintegrasi:** ketidakmerataan kecepatan akses internet dan infrastruktur, SDM digital yang masih belum mumpuni, keamanan cyber dan perlindungan konsumen, serta penerapan pajak dan skema pendanaan

### 3 subsektor dengan kepemilikan HKI tertinggi



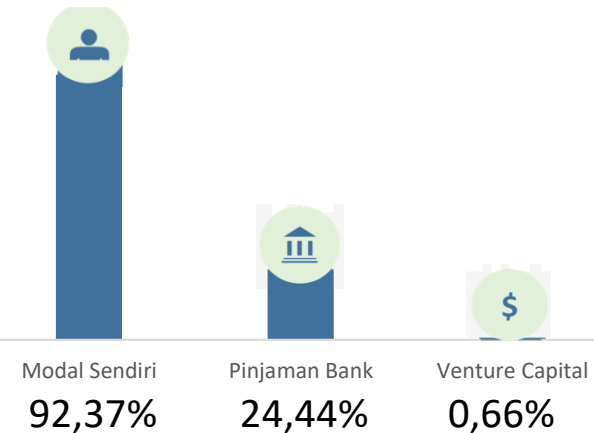
**Pelaku Ekraf Telah Mendapat Fasilitas Pendaftaran HKI Dari Bekraf Tahun 2016-2017**

### Kepemilikan HKI Keseluruhan



**2.857 usaha**

### Sumber Pembiayaan Pelaku Ekraf



Sumber: Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif Bekraf dan BPS, 2017; Opus Bekraf, 2017

## E-commerce

#### Akses Internet

- Disparitas kecepatan akses internet
  - Jakarta – Kawasan Timur Indonesia = 20 – 25 x [Jakarta rata-rata 7 Mbps, Papua rata-rata sekitar 300 Kbps]
  - Indonesia – Internasional [Indonesia rata-rata 4,5 Mbps, Global rata-rata 5,6 Mbps]

#### Keamanan Cyber

- Keamanan transaksi online: persepsi masyarakat vs realita [Survei APJII (2016): 30% pengguna internet (± 30,4 juta pengguna) merasa transaksi online tidak aman]

#### Logistik

- Terbatasnya konektivitas desa ke kota

#### Perlindungan Konsumen

- Belum adanya perlindungan data pribadi

#### SDM

- Peringkat Indonesia di *Global Entrepreneur Index 2017*: 90 dari 137 negara → pendidikan masih lebih banyak menghasilkan *programmer* kelas “*hacker*”, belum *programmer* yang bisa mendukung layanan jasa (*internet of things*) serta memahami manajemen dan bisnis

#### Pajak

- Perlakuan pajak yang tidak sama antara pelaku lokal dengan OTT (*over-the-top*) asing (“*Google Tax*”)

#### Pendanaan

- Keterbatasan skema pendanaan untuk *start-up* (asset *intangible*, risiko kegagalan tinggi)

Fokus Perbaikan:

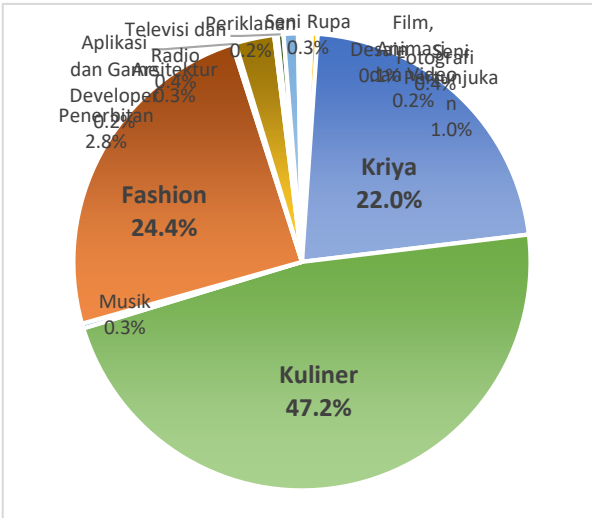
Transaksi cepat, aman dan tercatat

Pengiriman barang cepat dan tepat

Penguatan pelaku usaha (UMKM, *start-up*) sebagai *backbone e-commerce*

# ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL (2)

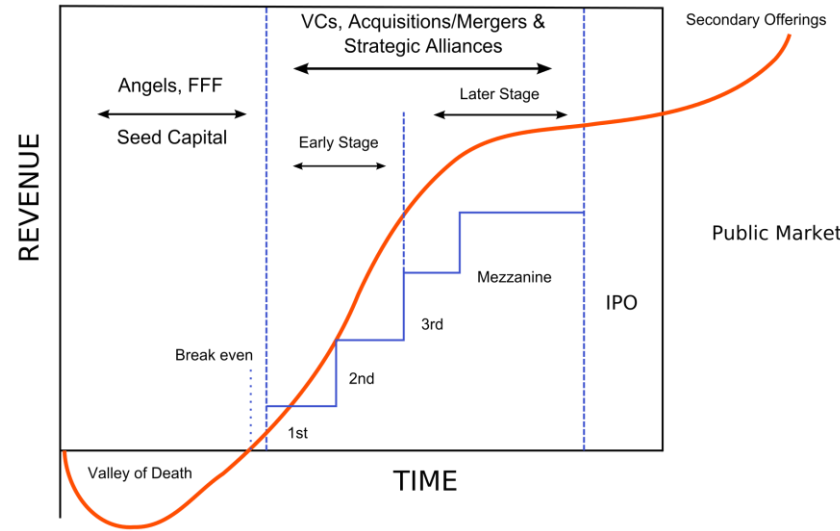
## Kontribusi Subsektor Ekraf (%)



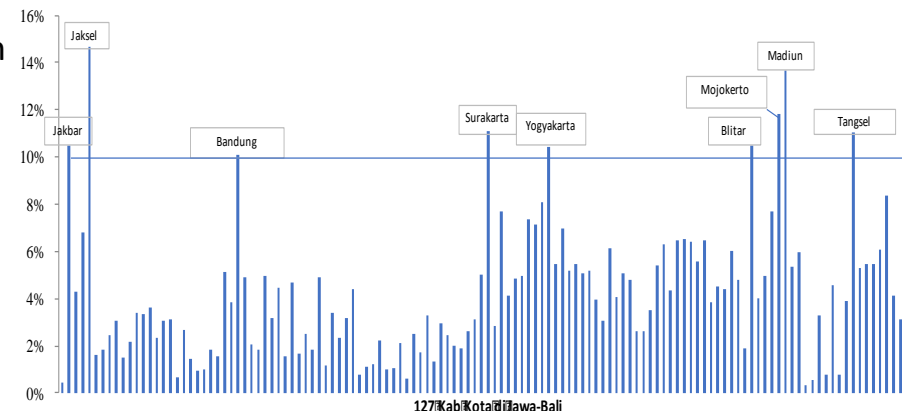
Kontribusi PDB ekonomi kreatif Indonesia masih rendah, dan didominasi subsektor yang memberikan nilai tambah rendah

## Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sektor Ekonomi Kreatif

## Startup Financing Cycle



Share Informasi dan Komunikasi \*)



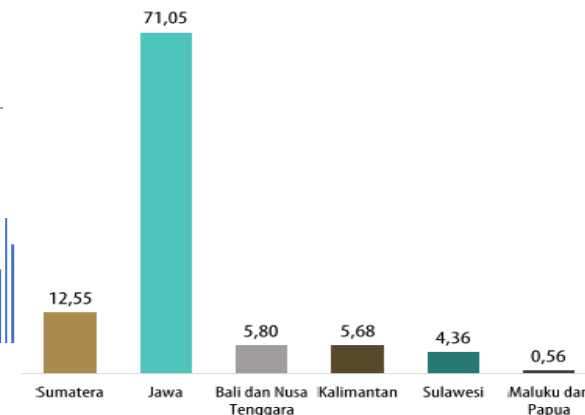
\*) Share (%) Sektor Informasi dan Komunikasi Kab/Kota terhadap PDB Kab/Kota  
Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2017

## Akses Pembiayaan untuk Keberlanjutan Usaha

Tantangan utama pembiayaan antara lain:

- Akses ke lembaga keuangan merupakan tantangan kritis walaupun **bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri**
- **Pengembalian investasi cenderung rendah**
- Sebagian besar lembaga keuangan **tidak memiliki skema yang cocok**
- **Dukungan fiskal yang terbatas** untuk mendorong *start-ups*
- Kemampuan produksi, distribusi, dan ekspor masih lemah

## Penggunaan E-commerce Pada Sektor Ekonomi Kreatif



Sumber: Profil Usaha/Perusahaan 16 Subsektor Ekraf (Bekraf, 2017)

50,87 persen pelaku ekonomi kreatif sudah menggunakan *e-commerce* dalam kegiatan usaha, namun masih berpusat di Jawa (sejalan dengan kontribusi sektor informasi dan komunikasi yang masih berpusat di Jawa)

# SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF 2020-2024

## Sasaran

Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang berkualitas

## Indikator dan Target

1. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 5,45 – 6,10 persen<sup>1</sup>
2. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp 1.840 – 1.890 Triliun<sup>2</sup>
3. Nilai ekspor ekonomi kreatif USD 21,5-25,3 miliar<sup>3</sup>
4. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 21 juta orang<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Prognosa Bappenas (rata-rata scenario rendah-tinggi)

<sup>2</sup>Prognosa Bappenas (tahun 2024)

<sup>3</sup>Hasil prognosa sementara Badan Ekonomi Kreatif

<sup>4</sup>Prognosa Bappenas

## Arah Kebijakan

1. Peningkatan daya saing SDM kreatif dan digital
2. Peningkatan ekosistem pelaku dan usaha kreatif dan digital
3. Peningkatan daya saing industri kreatif dan digital

## Strategi

1. Mengasah bakat dan meningkatkan kompetensi SDM kreatif dan keahlian digital (*digital skills*) khususnya generasi muda
2. Penguatan ekosistem untuk *start-up* kreatif dan digital
3. Peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif
4. Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
5. Peningkatan kelembagaan, kapasitas pengembangan usaha dan kualitas tata kelola usaha kreatif dan digital

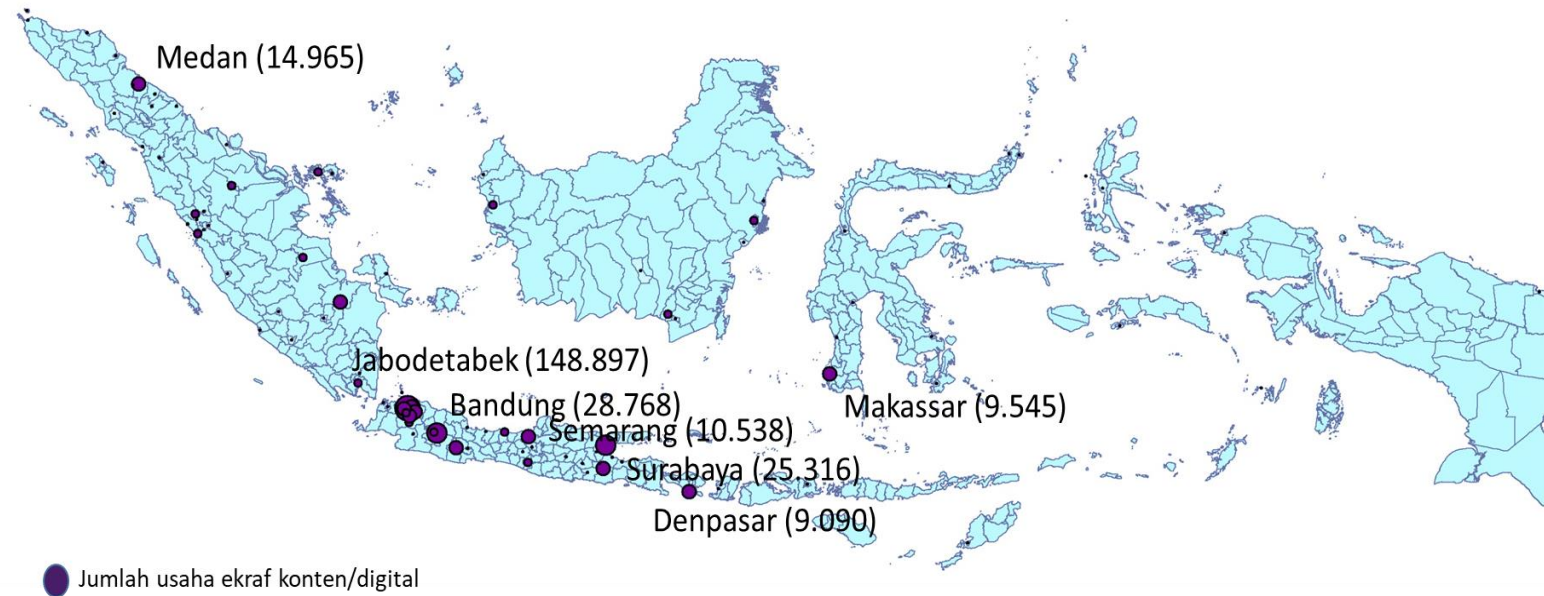
# KERANGKA REGULASI DAN INDIKASI LOKASI SEKTOR EKONOMI KREATIF 2020-2024

## Kerangka Regulasi

- RUU Pengembangan Ekonomi Kreatif (inisiatif DPD, sedang dalam pembahasan di DPR RI)
- Penyusunan PP dan peraturan perundangan lainnya sebagai turunan dari UU Pengembangan Ekonomi Kreatif, termasuk Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Peraturan perundangan terkait pengembangan Roadmap Pengembangan Digital Ekonomi di Indonesia

## Indikasi Lokasi

- Pengembangan Ekraf berbasis budaya/tradisi: kuliner, kriya, fashion → 34 provinsi dengan dukungan dana dekonsentrasi
- Pengembangan Ekraf berbasis budaya kontemporer/konten digital (Film, Animasi Game Developer, Musik) → 10 kota besar/metropolitan Jawa-Bali, Sumatera (Medan), dan Sulawesi (Makassar)



Sumber: Berdasarkan data Profil Usaha/Perusahaan 16 Subsektor Ekraf Berdasarkan SE 2016, Bekraf 2017

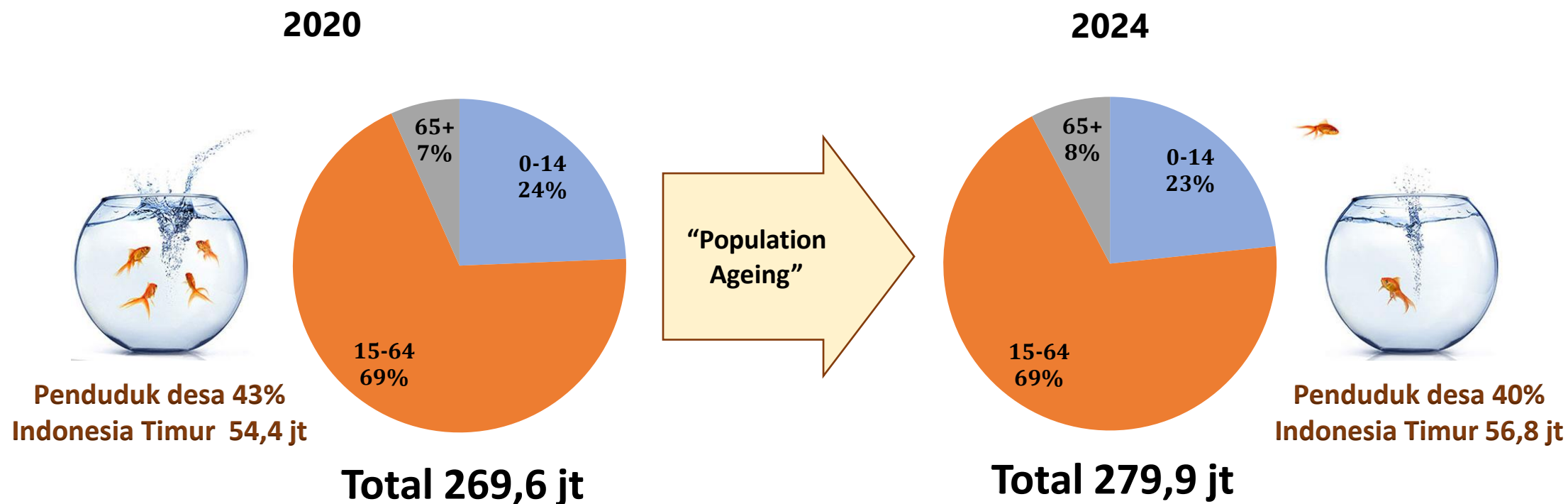
## **4. KERANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA**

**4.1 Dinamika Kependudukan 2020-2024**

**4.2 Pilar-Pilar Pembangunan Manusia**

**4.3 Isu Strategis & Arah Kebijakan**

# Dinamika Kependudukan 2020-2024: Penduduk Memasuki Penuaan (*Ageing*) dan Puncak Bonus Demografi



- **Penduduk usia produktif 174-180 juta pada 2020-2024**, paling banyak di wilayah Asia Tenggara.
- Pembangunan manusia berdasarkan pendekatan siklus hidup secara menyeluruh untuk mempersiapkan:
  - **Sumber Daya Manusia berdaya saing**: tenaga kerja yang handal dan adaptif, serta wirausaha yang adaptif, kreatif, inovatif
  - **Penduduk lanjut usia (*Aged Population*) yang sehat dan produktif**
- **Urbanisasi berjalan pesat** dengan pertumbuhan penduduk perkotaan bertambah 0,7% per tahun.

## Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sehat    Cerdas    Adaptif    Kreatif    Inovatif    Terampil    Bermartabat

Layanan Dasar &  
Perlindungan Sosial

Pendidikan

Kesehatan

Perlindungan  
Sosial

Produktivitas

Pendidikan dan  
Pelatihan Vokasi

Pendidikan  
Tinggi

IPTEK-Inovasi

Kewirausahaan

Pembangunan  
Karakter

Pendidikan  
Karakter

Pendidikan  
Agama

Pendidikan  
Kewargaan

Pertumbuhan penduduk seimbang

# Isu & Arah Kebijakan: Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang

## Isu Strategis

### Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

#### Tingkat kelahiran (TFR) dan disparitas tinggi

- Nasional (2017): 2,28
- Tertinggi : 2,82 (NTT)
- Terendah : 1,73 (DIY)



Tingkat kelahiran menurun namun disparitas antar provinsi masih tinggi

ASFR 15-19  
tahun



48  
SDKI 2012

Perempuan usia 20-24 menikah di bawah 18 tahun

DAN



22,35  
(2016)

22,91  
(2017)

## Sasaran

### Indikator

### Target 2024

Angka Kelahiran Total (TFR)

2,1

ASFR 15-19 Tahun

18 (proyeksi intervensi SDGs)

## Arah Kebijakan

Meningkatkan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui:

1. Perluasan akses pelayanan KB sesuai karakteristik wilayah
2. Penguatan KIE dan konseling tentang KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan tersegmentasi.
3. Penguatan lingkungan strategis mencakup KB dan keluarga, regulasi, kelembagaan, dan tata kelola

## Program Prioritas



**Refocusing pelayanan dan diferensiasi penggerakkan konseling** KB dan kesehatan reproduksi sesuai segmentasi wilayah dan kelompok sasaran.

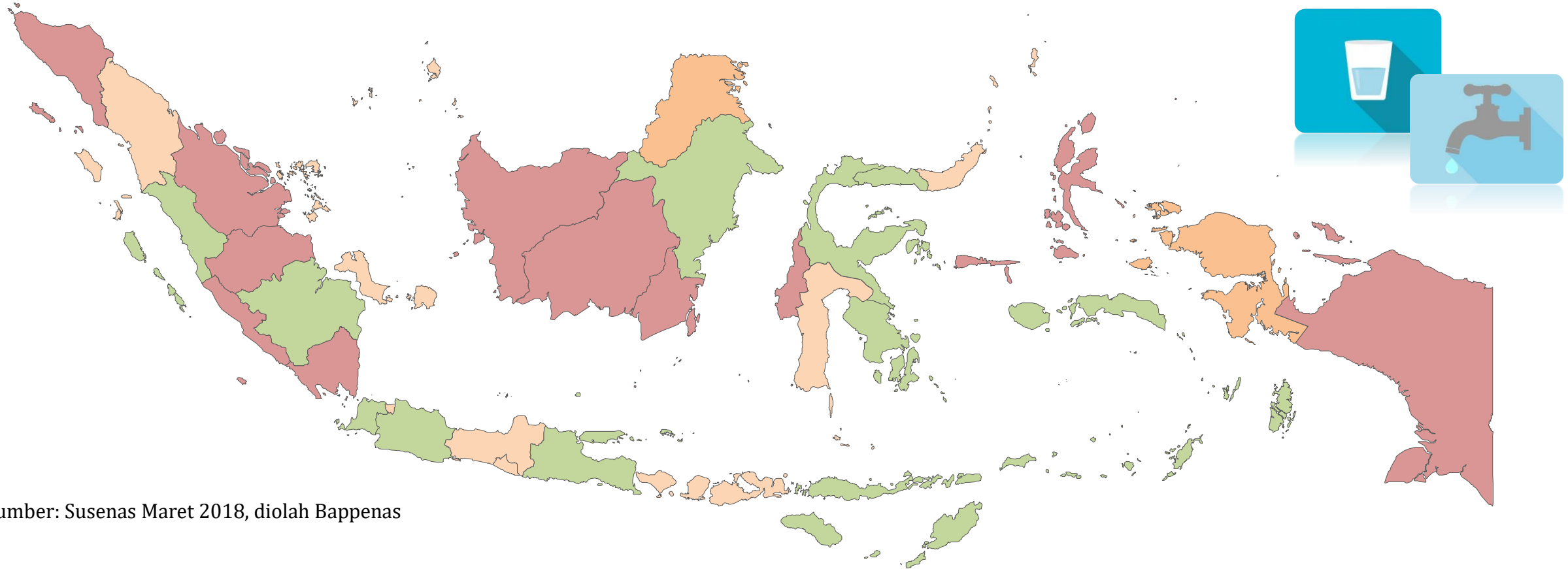


**Penerapan standar dan perbaikan perencanaan kebutuhan alkon** (*supply chain management*).

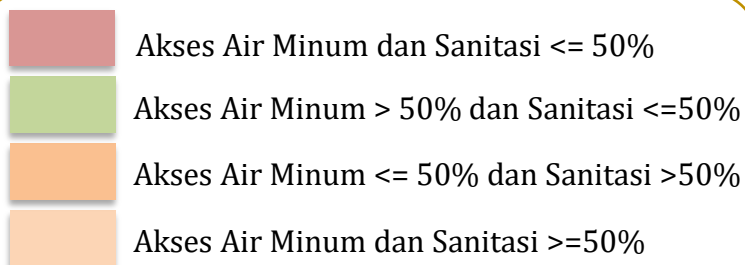


**Penataan kelembagaan KB serta penguatan data dan informasi menuju satu data**

# Akses Rumah Tangga Miskin (RTM) terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak

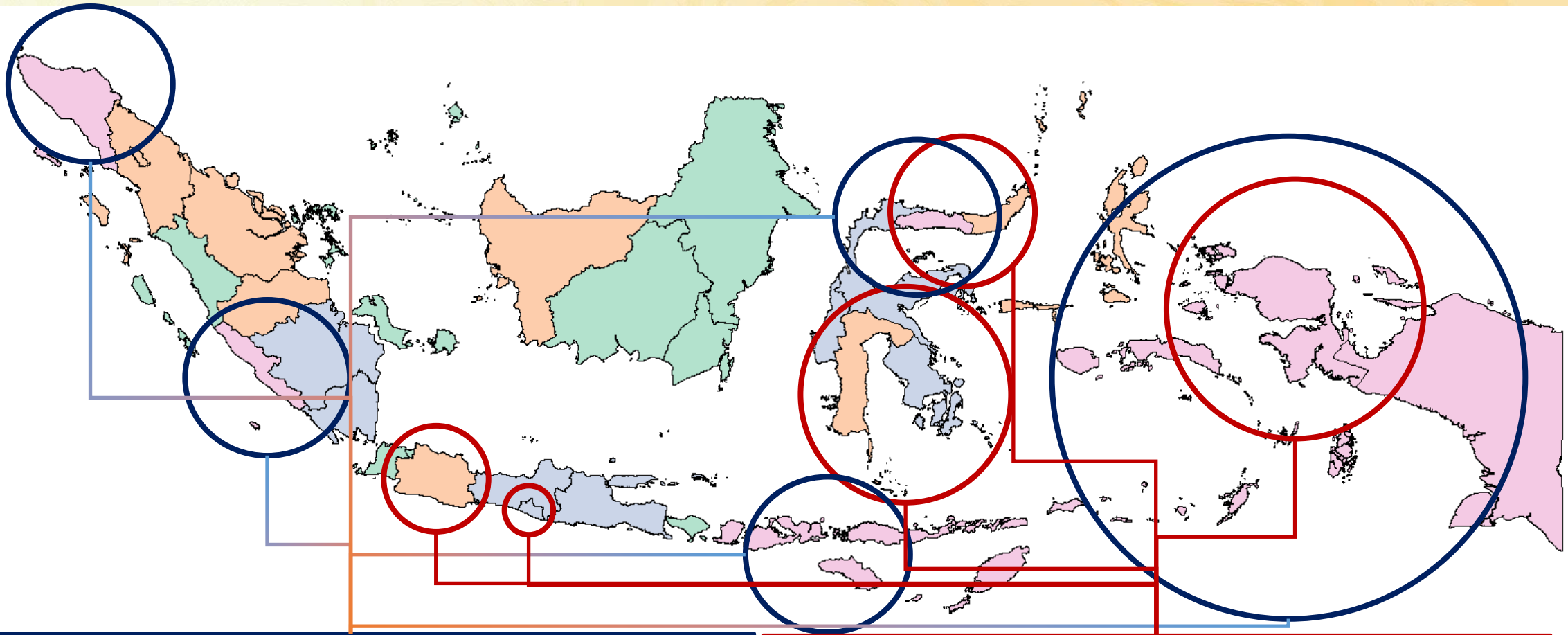


Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas



- Masih banyak RTM tersebar di beberapa provinsi yang belum mendapatkan akses untuk air minum dan sanitasi layak.
- 43,2% RTM belum mendapat akses air minum layak dan 53,9% belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.
- Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatera juga perlu intervensi khusus perluasan akses bagi RTM terhadap infrastruktur dasar.

# Program per Wilayah (Kemiskinan dan Ketimpangan)



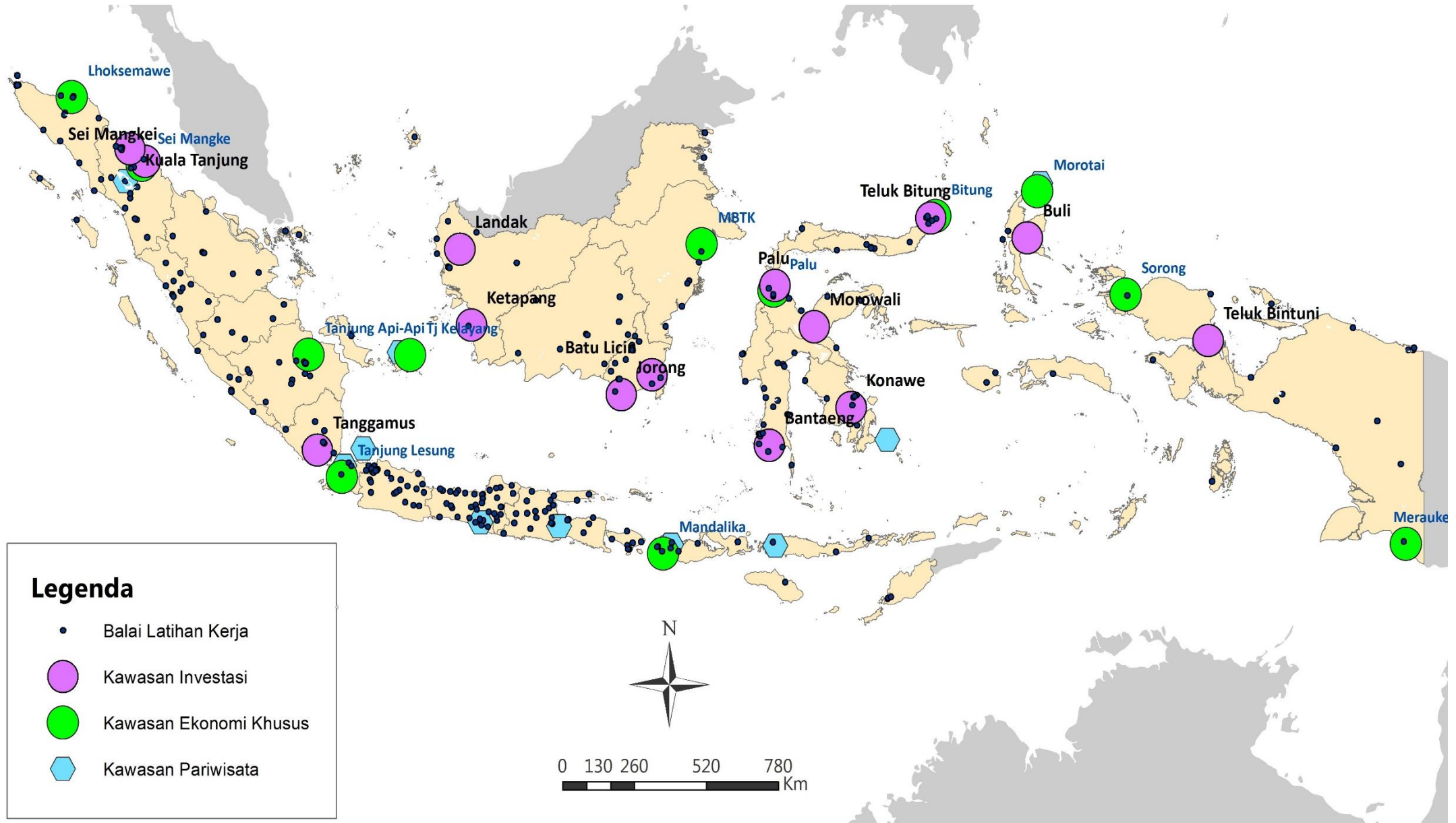
## Program peningkatan kesejahteraan:

- Bantuan afirmasi melalui komplementaritas dan sinergi program bantuan sosial.
- Pengembangan inkubasi bisnis yang disertai dengan mentoring dari perusahaan besar.
- Peningkatan produktivitas melalui pendidikan & pelatihan keterampilan kerja.
- Pola keberantaraan, peningkatan akses permodalan bagi penduduk miskin.

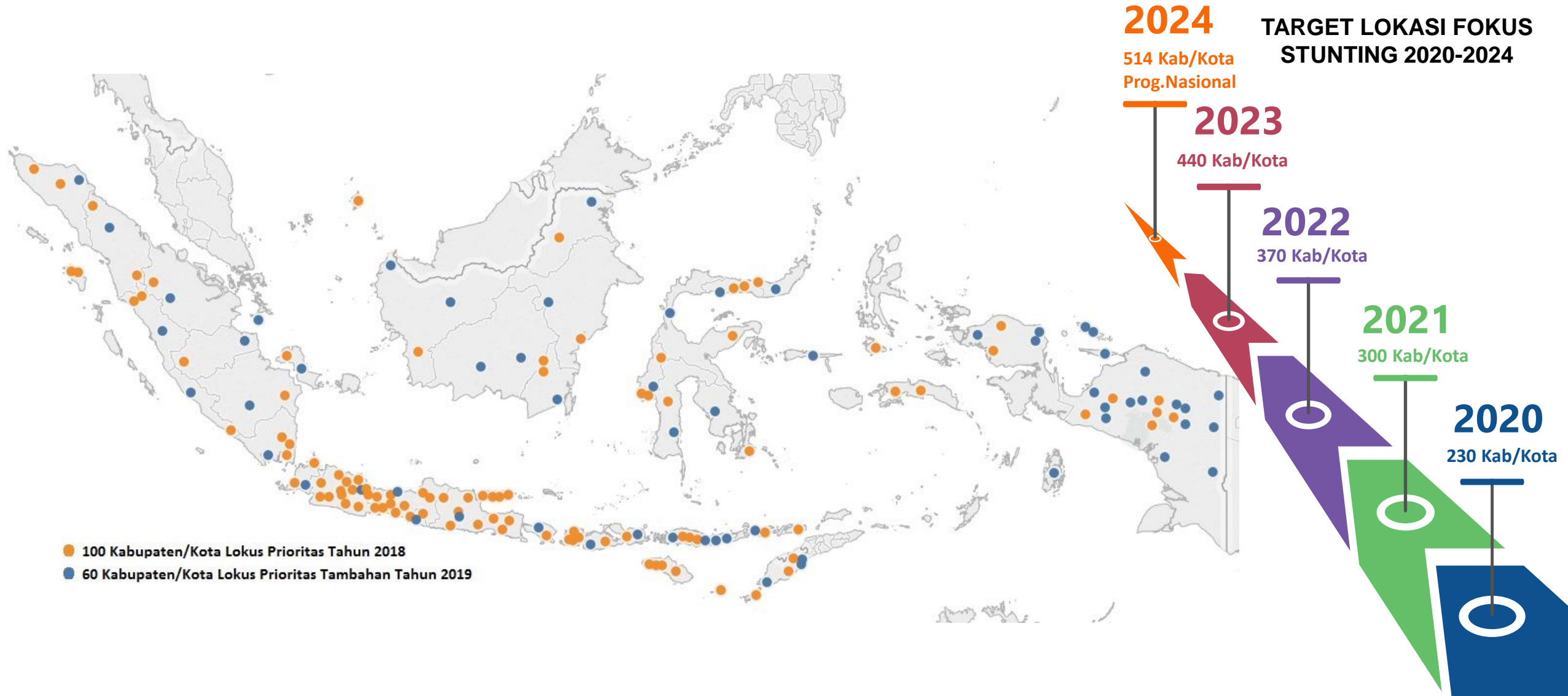
## Program penurunan ketimpangan:

- Peningkatan akses lahan melalui reforma agraria.
- Penerapan tarif pajak lebih progresif dan bervariasi antardaerah.
- Redistribusi pajak.
- Kemudahan akses bagi wirausaha sosial (dampak investasi dan keringanan pajak).

# Balai Latihan Kerja dan Kawasan Industri



# Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi



## **5. KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**5.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024**

**5.2 Isu Strategis: Pembiayaan dan Kualitas Infrastruktur**

**5.3 Fokus Pembangunan Infrastruktur**

**5.4 Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2020-2024**

# Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

## Infrastruktur Pelayanan Dasar

-  Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Terjangkau
-  Pengelolaan Air Tanah, Air Baku serta Air Minum Aman Berkelanjutan
-  Akses Sanitasi Layak dan Aman (Air Limbah dan Sampah Domestik)
-  Keamanan dan Keselamatan Transportasi
-  Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

## Infrastruktur Ekonomi

### Konektivitas

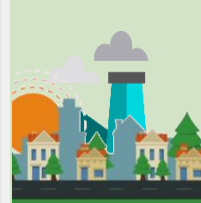


Tol Laut +



Antarmoda

Pengembangan Wilayah / Pusat pertumbuhan

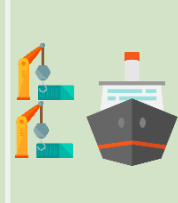


Kawasan Terbangun



Area Pelabuhan

TOL LAUT



Area Pelabuhan



Pengembangan Wilayah / Pusat pertumbuhan



KTI / Daerah Tertinggal

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Aksesibilitas Daerah Tertinggal

### Sektor Ekonomi



Pertanian-  
Perkebunan-  
Kelautan Perikanan



Industri Pengolahan



Jasa dan  
Pariwisata

## Infrastruktur Perkotaan



**Kota Nyaman:**

Kota aman dan nyaman



**Kota Berkelanjutan:**

Kota hijau berketahanan iklim dan bencana



**Kota Cerdas:**

Kota berdaya saing yang berbasis TIK



Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan



Pembangunan TIK

## Pengarusutamaan



Infrastruktur Hijau

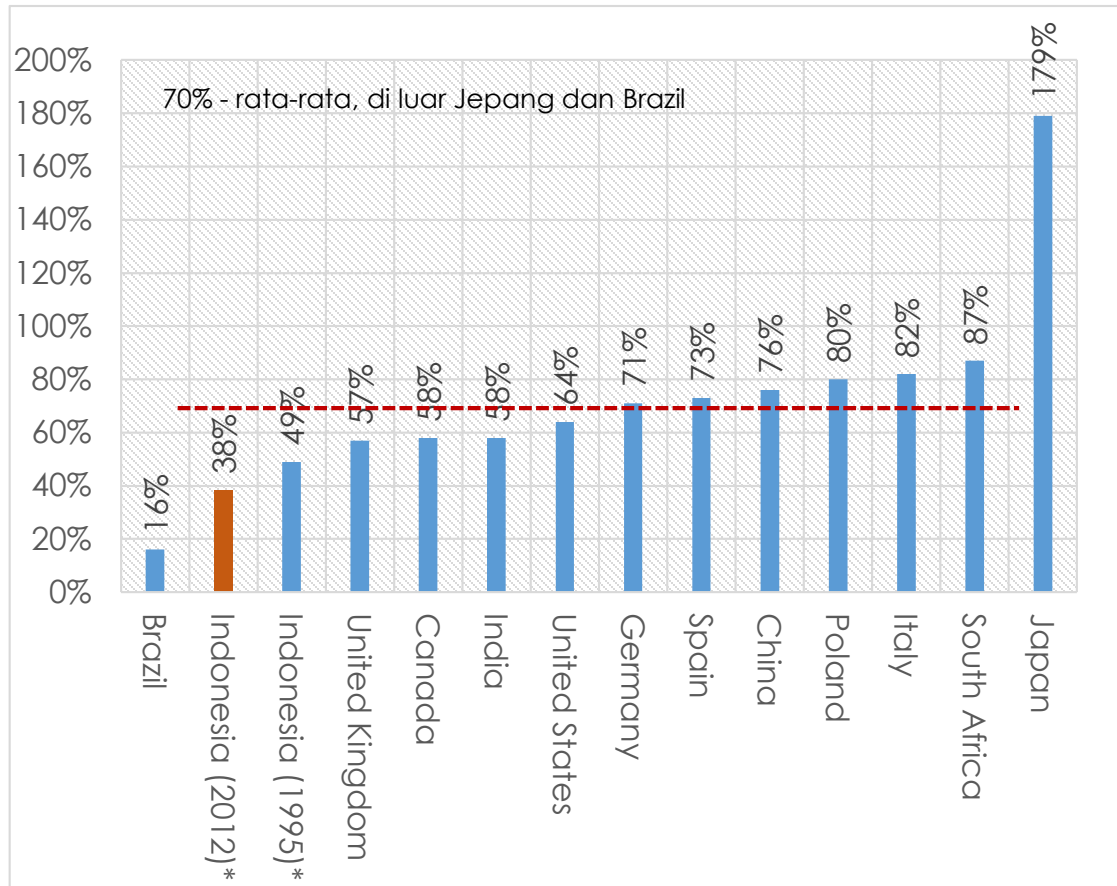


Infrastruktur Tangguh Bencana

# Isu Strategis Pembiayaan Infrastruktur

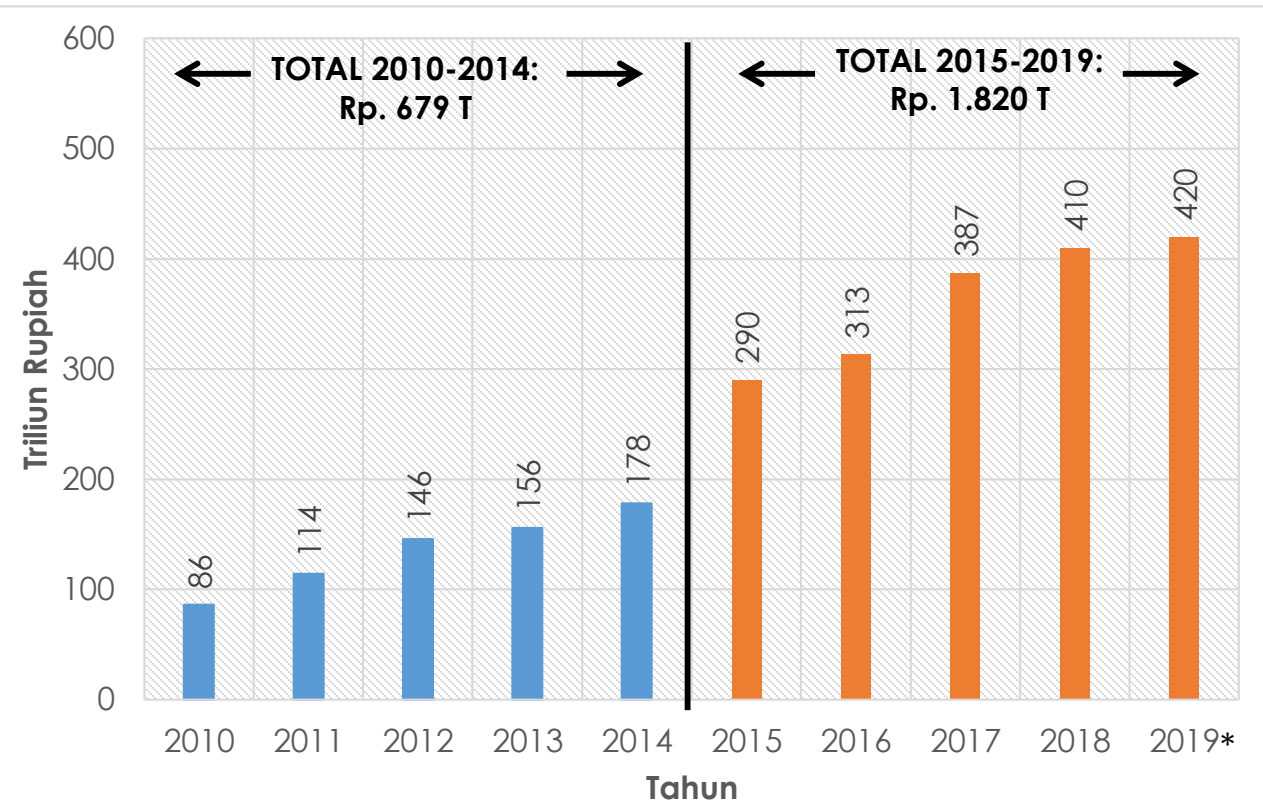
... stok infrastruktur rendah memerlukan alokasi pembiayaan infrastruktur yang besar ...

## STOK INFRASTRUKTUR (PERSEN PDB)



Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)

## ALOKASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



\*Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019

Stok infrastruktur berdasarkan kajian Prospera **(42%)** maupun World Bank **(38%)**, stok infrastruktur Indonesia **masih dibawah rata-rata dunia (70%)**.

# Isu Strategis Kualitas Infrastruktur

## ... mengapa infrastruktur masih perlu dibangun ...

### Ranking Kualitas Infrastruktur

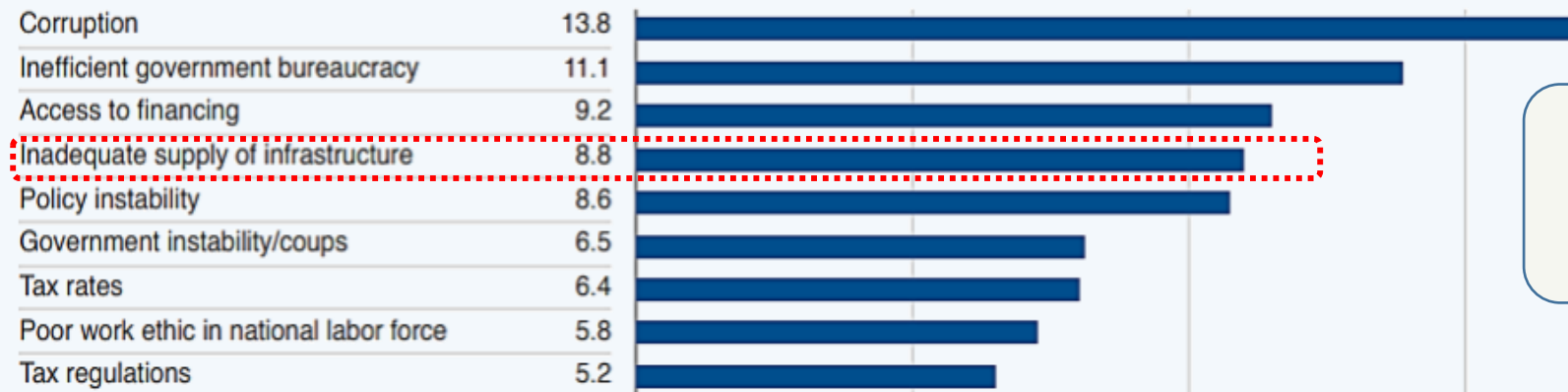
	2014	2015	2016	2017
<b>2<sup>nd</sup> pillar: Infrastructure</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>52</b>
Quality of overall infrastructure	72	81	80	68
Quality of roads	72	80	75	64
Quality of railroad infrastructure	41	43	39	30
Quality of port infrastructure	77	82	75	72
Quality of air transport infrastructure	64	66	62	51
Available airline seat kilometers millions/week	14	15	14	14
Quality of electricity supply	84	86	89	86
Mobile-cellular telephone subscription /100 pop.	54	49	38	18
Fixed telephone lines /100 pop.	71	80	86	105

Negara	Ranking	Nilai
Singapura	2	6,5
Malaysia	22	5,5
Thailand	43	4,7
Indonesia	52	4,5
Brunei Darussalam	60	4,3
Vietnam	79	3,9

Sumber: The Global Competitiveness Report  
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018

### Most problematic factors for doing business

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017



“Sebagian besar kualitas infrastruktur telah meningkat, namun tetap menjadi salah satu faktor utama penghambat melakukan usaha”

# Fokus Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2020-2024

**RPJPN  
2005-  
2025**

**Perkiraan  
Capaian  
Penting  
(2019)**

**VISI  
2045**

**SDGs**

- Terbangunnya jalan sejajar perbatasan di NTT dan Kalimantan
- Tersambungannya jalan tol di pantai utara Jawa
- Terbangunnya jalur KA di Sulawesi
- Mulai beroperasinya jalan tol di Kalimantan
- Beroperasinya MRT di Jakarta

- Tercapainya rasio elektrifikasi melebihi 96,6%
- Tersambungannya jaringan kabel serat optik ke seluruh kabupaten/kota
- Terbangunnya 1 juta ha jaringan irigasi
- Terbangunnya 29 bendungan
- Akses air minum layak 59,07 (2017), akses sanitasi 76,91% (2017)

- Jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi
- Pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien
- Pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern
- Konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air

- Air minum dan sanitasi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan sector terkait
- Peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana
- Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat

- Peningkatan Ketahanan air
- Peningkatan peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- Penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau
- Transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat
- Transportasi laut dan udara untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah

- Transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas maritime
- Pengembangan kawasan aerotropis
- Pemenuhan konektivitas digital dan virtual
- Pemenuhan akses masyarakat terhadap prasarana dasar

- Meningkatkan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau
  - Akses air minum aman
  - Akses sanitasi aman dan kebersihan yang memadai dan merata dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS)
- Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah domestik
- Meningkatkan kualitas air
- Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan
- Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air

- Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern
- Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global
- Melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat
- Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh
- Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi
- Menyediakan akses terhadap sistem transportasi

# Sasaran Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

## Pelayanan Dasar

-  **Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Terjangkau**
  - Terpenuhinya hunian layak untuk rumah tangga
-  **Pengelolaan Air Tanah, Air Baku serta Air Minum Aman dan Berkelanjutan**
  - Terpenuhinya akses layanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan
  - Terwujudnya pengelolaan air minum yang handal
  - Pengamanan Air Tanah, Baku berkelanjutan
-  **Akses Sanitasi Aman**
  - Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan di kabupaten/kota prioritas
  - Meningkatnya akses pengelolaan air limbah domestik
  - Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah
-  **Keamanan dan Keselamatan Transportasi**
  - Pengurangan indeks fatalitas kecelakaan transportasi jalan
  - Meningkatnya akurasi informasi cuaca dalam mendukung keselamatan transportasi
-  **Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur**
  - Meningkatnya perlindungan terhadap daya rusak air, longsor, gunung berapi, gempa


## Infrastruktur Pendukung Pembangunan Ekonomi

-  **Konektivitas**


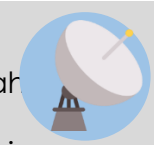
Konektivitas Antar Pulau

  - Terselenggaranya tulang punggung sistem logistik nasional melalui jasa pelayaran multiport yang teratur dan terjadwal dari Timur ke Barat Indonesia
  - Terselenggaranya *Berthing Window* yang sempurna
  - Terpenuhinya standar keselamatan, keamanan dan pelayanan udara
  - Pembangunan Konektivitas Antarmoda dan Multimoda
-  **Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi**
  - Meingkatnya manfaat Waduk Multipurpose untuk wilayah ekonomi.
  - Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi, menuju modernisasi irigasi-more crop for drop
-  **Aksesibilitas Daerah Tertinggal**
  - Terwujudnya aksesibilitas di daerah 3T yang handal dan memadai
  - Terhubungnya Kawasan tertinggal dengan Kawasan yang lebih maju
  - Terwujudnya penyelenggaraan transportasi perintis yang efektif dan terpadu
  - Moda transportasi yang sesuai dengan karakteristik kawasan di daerah 3T

## Infrastruktur Perkotaan

-  **Perkotaan**
  - Terciptanya angkutan massal perkotaan berbasis rel yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan
  - Tersedianya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan
  - Terwujudnya kota-kota di Indonesia yang berketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim

## Energi, Ketenagalistrikan dan TIK

- 
  - Tercapainya akses ketenagalistrikan universal
  - Tercukupinya pasokan listrik untuk pertumbuhan ekonomi
  - Meningkatnya keberlanjutan pasokan tenaga listrik
  - Meningkatnya akses layanan energi untuk memasak yang terjangkau, andal dan modern
  - Meningkatnya jumlah cadangan energi strategis
- 
  - Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa
  - Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersial
  - Terkoneksinya jaringan *fixed broadband* ke pusat pertumbuhan ekonomi
  - Meningkatnya implementasi smart city pada kota-kota sedang dan besar

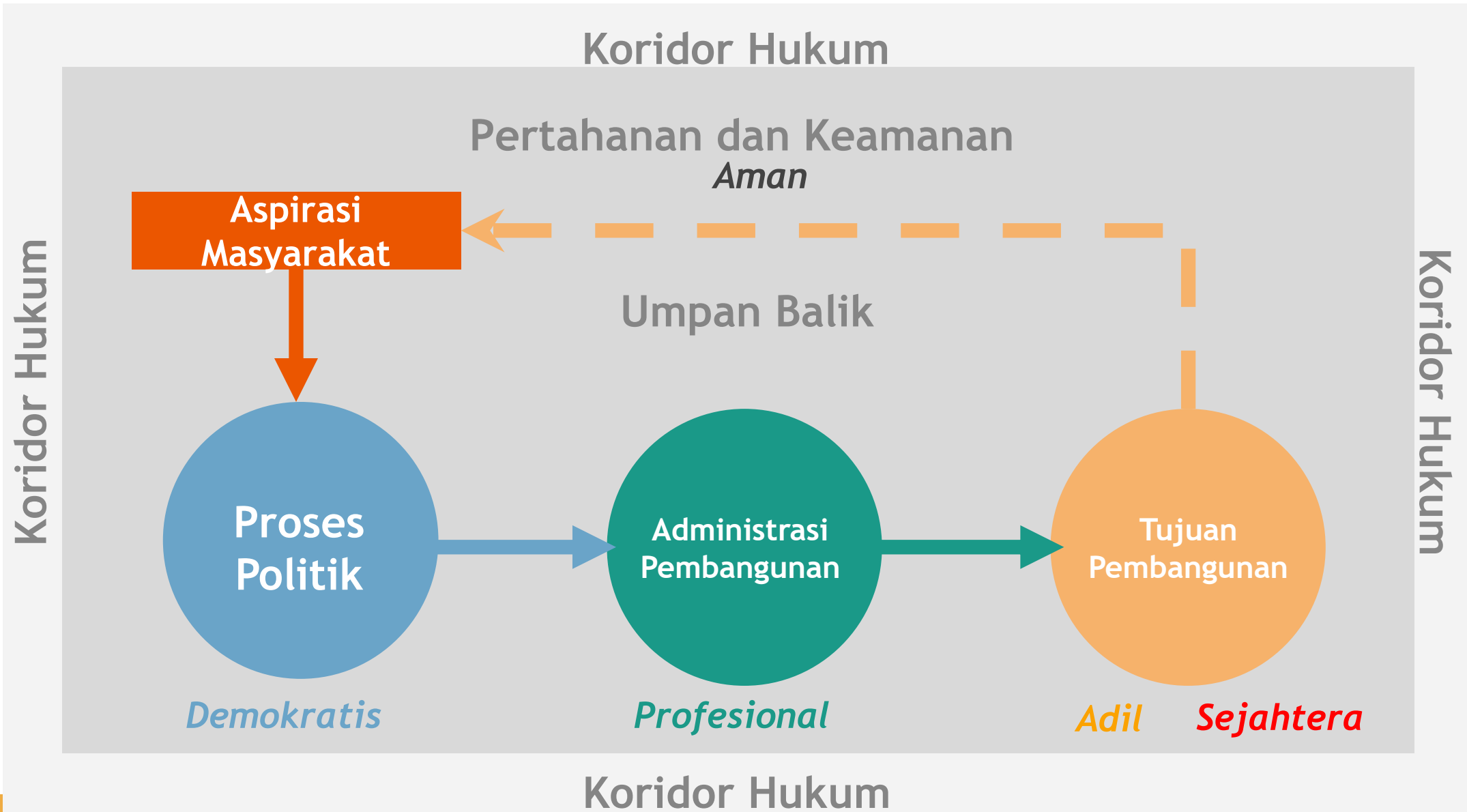
## **6. KERANGKA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM**

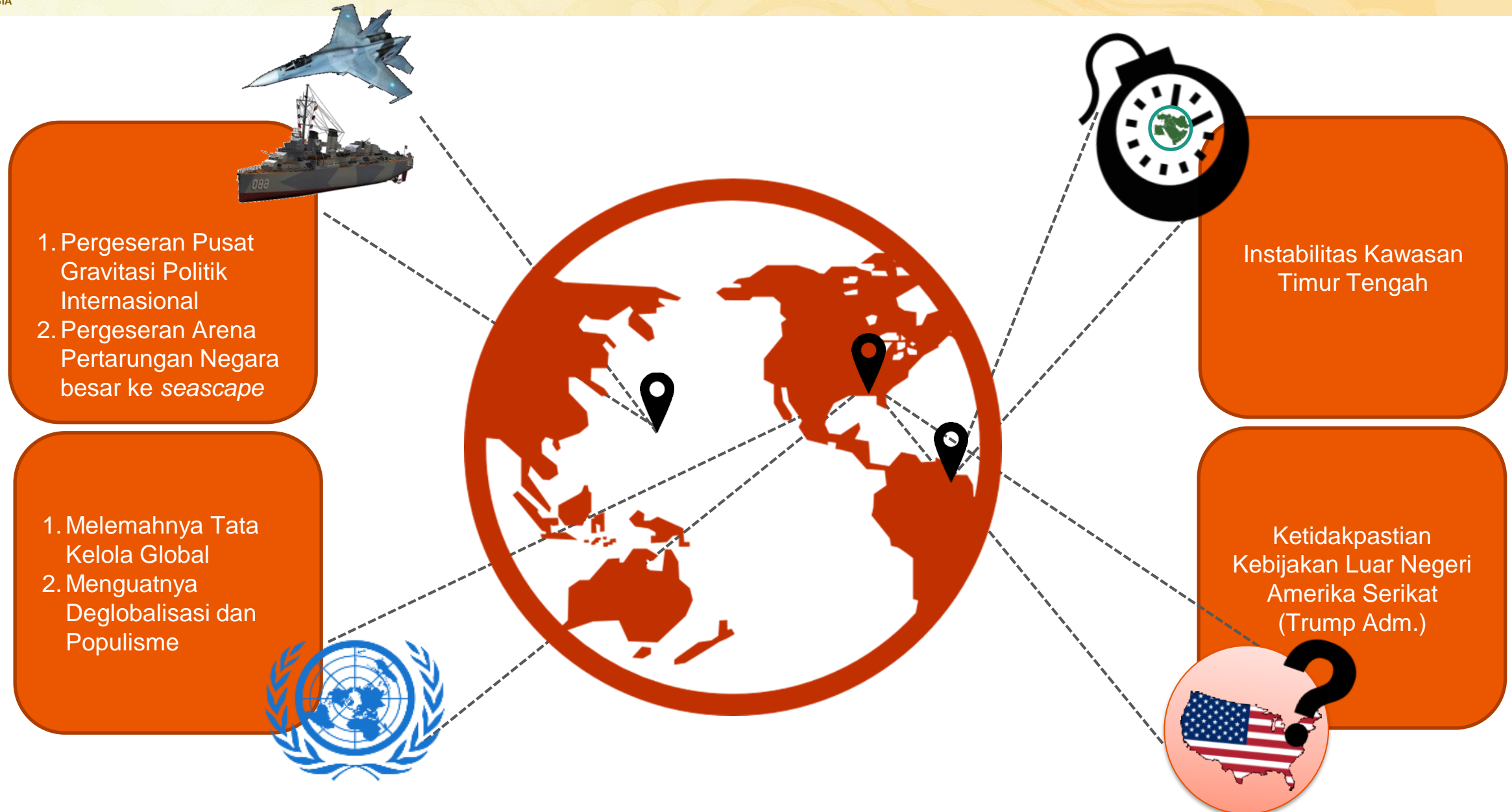
**6.1 Kerangka Pembangunan Polhukhankam**

**6.2 Konstelasi & Dinamika Geopolitik Global, Regional, Nasional**

**6.3 Fokus Pembangunan Polhukhankam**

**6.4 Arah Pembangunan Polhukhankam**







OBOR (BRI) VS Pivot to Asia

## *The Rise of China*

- Peringkat Ke-3 pada Global Fire Power Index
- Peringkat Ke-3 PDB terbesar di dunia

Krisis Nuklir di Korea

Kontestasi Kekuatan Besar

Sengketa Laut China Selatan

Melemahnya Sentralitas ASEAN

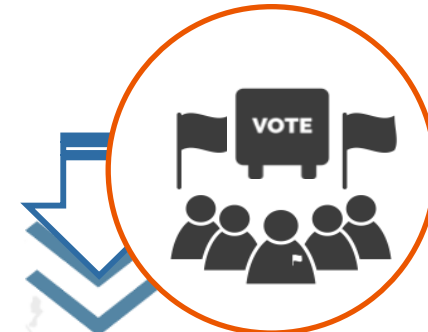
Meningkatnya Ancaman  
Kejahatan Transnasional



**Kepulauan Natuna**



**Intoleransi Menguat**



**Demokrasi Prosedural**

**Gangguan  
Keamanan di  
Papua**



**Kesenjangan  
Reformasi Birokrasi**



**Masih Adanya Perilaku  
Korupsi**



**Blok  
Masela**

## Visi 2045

- Demokrasi substansial
- Negara yang berpengaruh di Asia Pasifik
- Supremasi Hukum yang didukung masyarakat berbudaya hukum dan anti korupsi
- Birokrasi yang dinamis, solid dan kokoh
- Keamanan dalam negeri dan Pertahanan yang andal

## SDGs

- Konsolidasi Demokrasi
- Meningkatnya kualitas kemitraan global dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
- Akses terhadap keadilan, Identitas Hukum, Anti korupsi
- Meningkatkan rasa aman masyarakat

## RPJMN 2020-2024

- Terwujudnya konsolidasi demokrasi
- Kemandirian nasional dalam konstelasi global
- Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri
- Tata kelola pemerintahan yang baik,
- Birokrasi yang profesional dan netral
- Supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia.
- TNI profesional
- Sinergi polri dan masyarakat
- Intelijen efektif
- Inhan yang handal

# ARAH PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM




## Politik

- Mewujudkan demokrasi yang substansial
- Meningkatkan kualitas pemilu
- Memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional
- Meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional

## Fokus Pembangunan RPJMN 2020-2024

- ☐ Struktur Perekonomian yang Kokoh
- ☐ Keunggulan Kompetitif Wilayah
- ☐ SDM Berkualitas



## Hukum dan Aparatur

- Mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan anti-korupsi
- Menata Regulasi
- Memperkuat sistem penegakkan Hukum
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik




## Pertahanan dan Keamanan

- Mewujudkan Kekuatan Pokok Minimal Pertahanan (Minimum Essential Force/MEF)
- Meningkatkan industri pertahanan dalam negeri
- Menurunkan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut



# ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN

## PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH


- 
- Kemiskinan di KTI (18,01%)\*, KBI (10,33%)\*, perdesaan (13.47%)\* dan perkotaan (7,20%)\* yang tinggi
  - Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) -Perkotaan (0,4)
  - Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

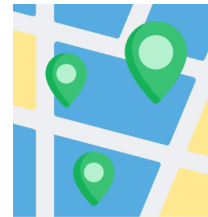


## PENGELOLAAN URBANISASI

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB)

## PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH


- 
- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
  - Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
  - Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang



## PEMANFAATAN RUANG

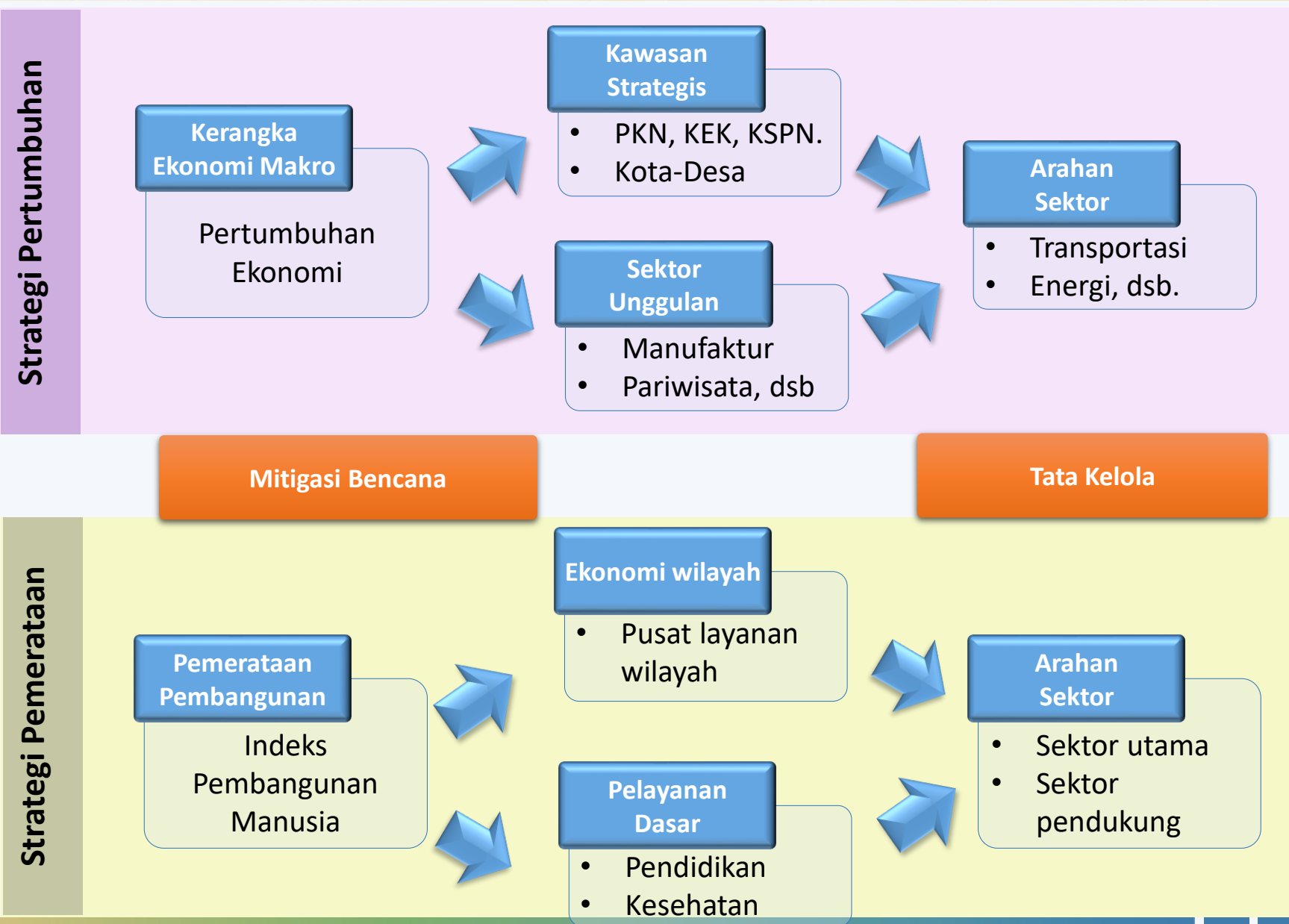
- Konflik ruang) yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018)
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa)
- Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan,dsb)

## PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- 
- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%\*, air minum 72%\*, sanitasi layak 67,5%\*, dsb)
  - Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
  - Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang
  - Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari →Papua)

# STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH INKLUSIF DAN BERDAYA SAING

## STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH INKLUSIF DAN BERDAYA SAING



# SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN POKOK PENGEMBANGAN WILAYAH

## SASARAN

**Meningkatnya Pemerataan  
antarwilayah (KBI-KTI,  
Jawa-luar Jawa)**



**Meningkatnya Keunggulan  
Kompetitif Pusat-pusat  
Pertumbuhan Wilayah**



**Meningkatnya Kualitas Dan  
Akses Pelayanan Dasar, Daya  
Saing serta Kemandirian  
Daerah**



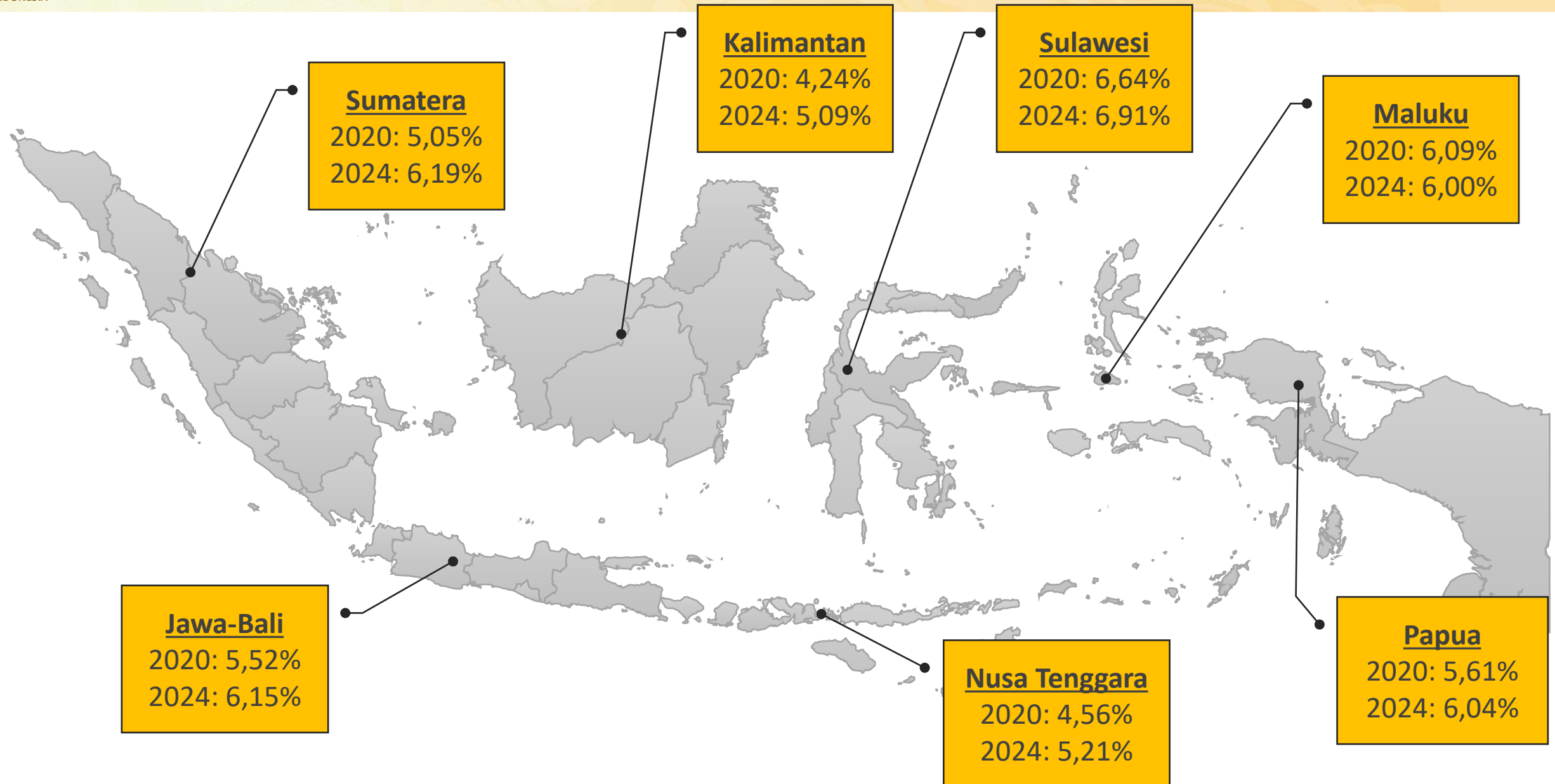
**Meningkatnya Sinergi  
Pemanfaatan Ruang  
Wilayah**



## ARAH KEBIJAKAN POKOK

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang telah ditetapkan)
4. Peningkatan Nilai Tambah SDA
5. Peningkatan konektivitas antar-wilayah
6. Penataan pola hubungan pusat dan daerah
7. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
8. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
9. Peningkatan kemudahan perizinan
10. Pengembangan kerja sama antar daerah, kolaborasi multipihak dan inovasi pemerintahan daerah
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
12. Peningkatan sinergi kegiatan perkotaan dan perdesaan
13. Penegakan penataan ruang yang berbasis bencana dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
14. Peningkatan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah

# Sasaran Pertumbuhan Wilayah – Skenario Sedang



## **8. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024**

**8.1 Sasaran Makro 2020-2024**

**8.2 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Produksi & Pengeluaran**

**8.3 Sasaran dan Arah Kebijakan**

**8.4 Postur Fiskal 2020-2024**

**8.5 Kebutuhan Investasi dan Pembiayaannya**

# Sasaran Makro 2020 - 2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

**5,4%-6,1%**

**Pertumbuhan  
Ekonomi**



**US\$6.069**

**PDB Harga Berlaku  
Per Kapita  
Skenario Sedang**

Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan makro ekonomi tersebut tergantung dari efektivitas perbaikan kebijakan lintas sektor (kebijakan reformasi struktural)

**Target-target Pembangunan  
Tahun 2024**

**2,99 juta ➡ 2,7-3,0 juta**

(Agustus 2018) (2024)

**Penciptaan  
Kesempatan Kerja**

**9,82% ➡ 6,5-7,0%**

(Maret 2018) (2024)

**Tingkat Kemiskinan**

**0,389 ➡ 0.370-0,374**

(Maret 2018) (2024)

**Ketimpangan/  
Gini Ratio**

**5,34% ➡ 4,0-4,6%**

(Agustus 2018) (2024)

**Tingkat Pengangguran  
Terbuka**

**71,38 ➡ 75,35**

(2018) (2024)

**IPM**

# Highlight Asumsi Makro 2020-2024



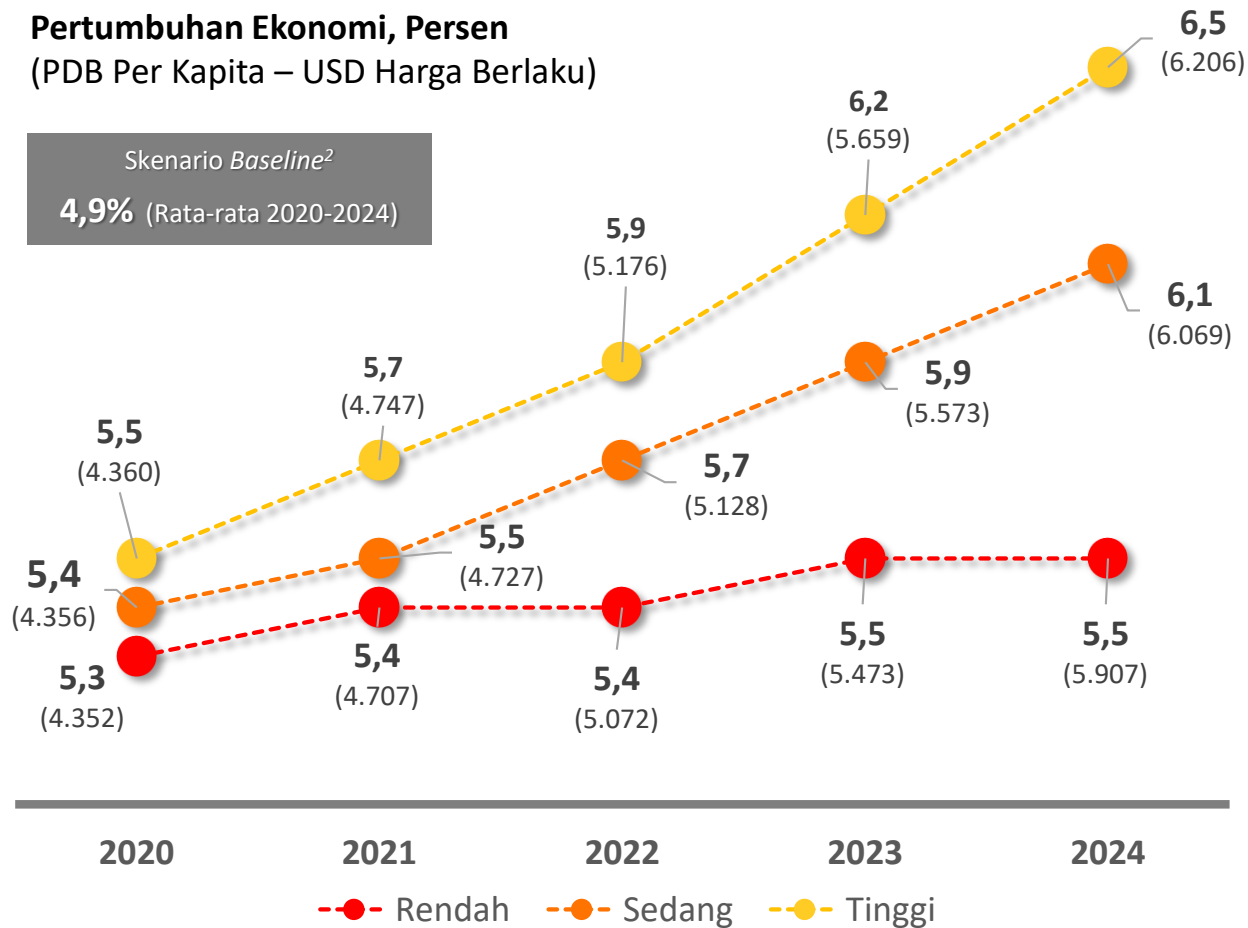
## Kunci peningkatan pertumbuhan<sup>1</sup>:

1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan investasi
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

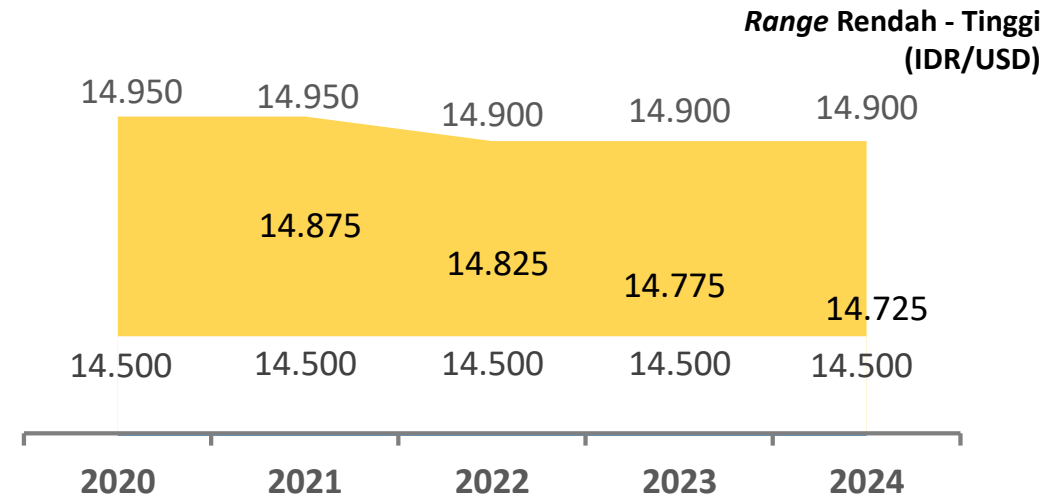
## Pertumbuhan Ekonomi, Persen (PDB Per Kapita – USD Harga Berlaku)

Skenario Baseline<sup>2</sup>

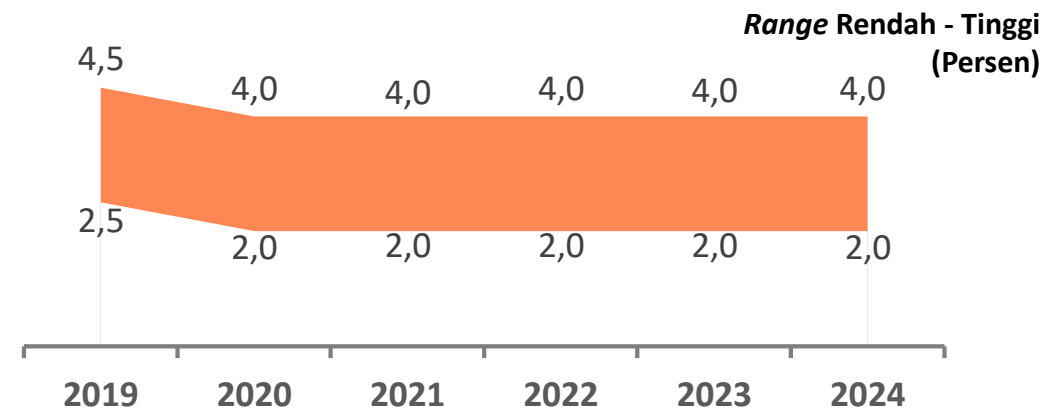
4,9% (Rata-rata 2020-2024)



Nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor



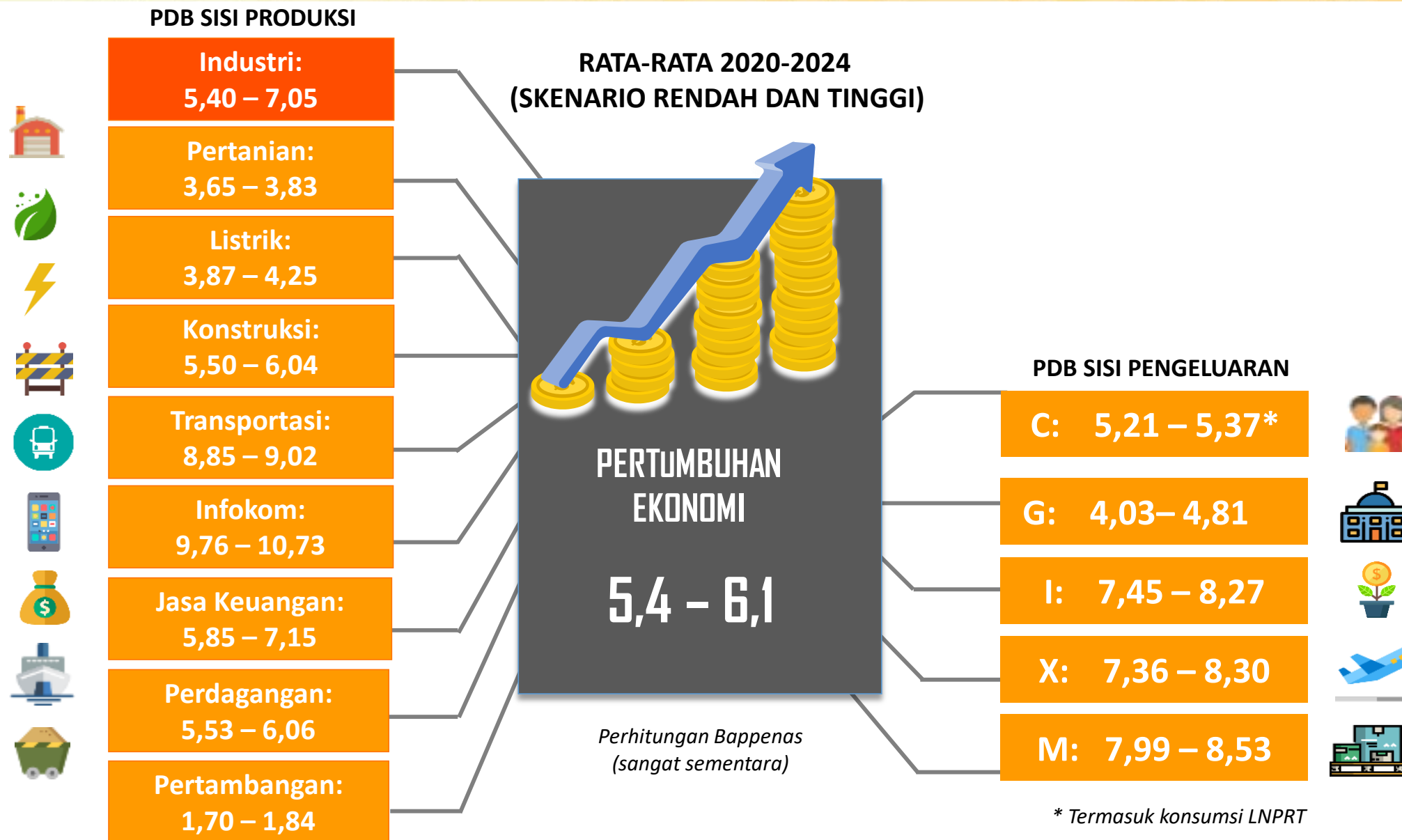
Inflasi dijaga pada tingkat jangka panjangnya melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi



<sup>1</sup>Berdasarkan simulasi pertumbuhan potensial model Growth Accounting Bappenas

<sup>2</sup>Tanpa adanya reformasi struktural sepanjang 2020-2024

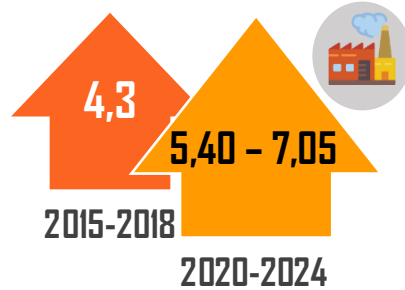
# Gambaran Pertumbuhan Ekonomi 2020 - 2024



# PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

## REVITALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR

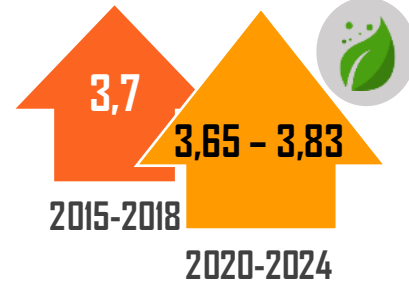
### INDUSTRI MANUFAKTUR



Perbaikan *enabling environment* untuk persiapan menghadapi era *Industry 4.0*

## MODERNISASI PERTANIAN

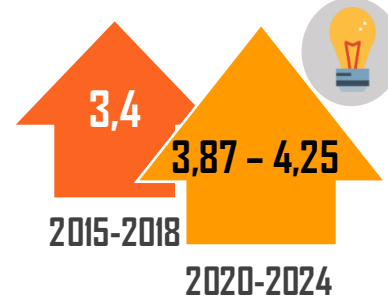
### PERTANIAN



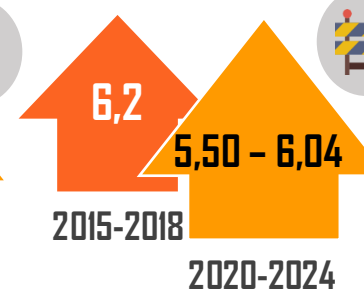
Meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

### LISTRIK



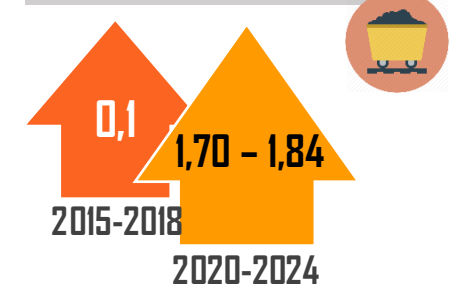
### KONSTRUKSI



Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif

## HILIRISASI PERTAMBANGAN

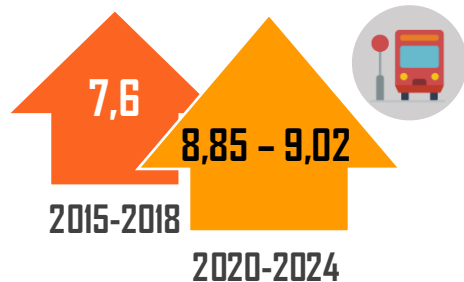
### PERTAMBANGAN



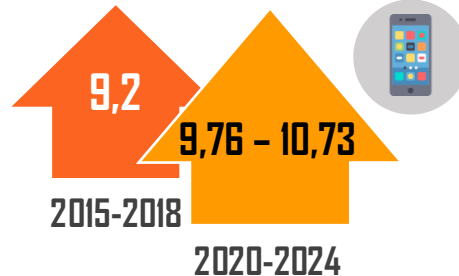
Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir

## TRANSFORMASI SEKTOR JASA

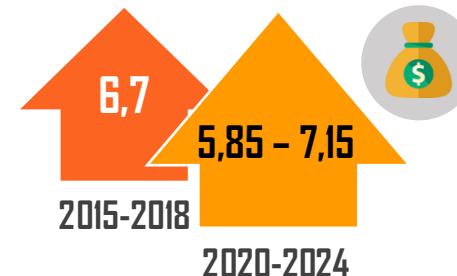
### TRANSPORTASI



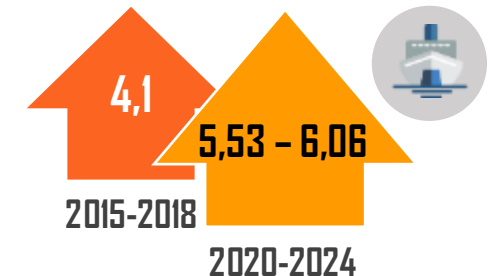
### INFOKOM



### JASA KEUANGAN



### PERDAGANGAN



Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi

Rata-rata pertumbuhan (Persen)

2015-2018

2020-2024  
(rendah tinggi)

# PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

## KONSUMSI RT & LNPRT



5,0

5,21 – 5,37

Konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik

## KONSUMSI PEMERINTAH



3,1

4,03 – 4,81

Dorongan pemerintah berupa belanja yang lebih berkualitas serta penerimaan perpajakan yang optimal

## INVESTASI



5,7

7,45 – 8,27

Investasi didukung oleh peningkatan efisiensi investasi baik swasta maupun pemerintah

5.907-6.206

PDB per kapita 2024  
(USD harga berlaku)

6,8 – 7,5

Tingkat Kemiskinan 2024  
(Persen)

4,0 – 4,6

TPT 2024  
(Persen)

6,0 – 6,6

Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
(Rata-rata, Persen PDB)

10,0 – 10,4

Belanja Pemerintah Pusat 2020-204  
(Rata-rata, Persen PDB)

12,0 – 13,0

Rasio Pajak 2020-2024  
(Rata-rata, Persen PDB)

15,0 – 15,5

Share PMA/PMDN 2024  
thd Investasi (Persen)

1,9 – 2,2

Belanja Modal 2020-204  
(Rata-rata, Persen PDB)

47,7

Stok Infrastruktur 2024  
(Persen PDB) – skenario sedang

**Keterangan:**

Rata-rata pertumbuhan (Persen)

2015-2018

2020-2024  
(rendah tinggi)

# PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor demi Penguatan Stabilitas Eksternal

## EKSPOR BARANG DAN JASA



3,1

7,36 – 8,30

## IMPOR BARANG DAN JASAR



3,1

7,99 – 8,53

Kontribusi net ekspor diharapkan menuju positif, didukung oleh revitalisasi sektor industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor dan ketergantungan terhadap impor. Peningkatan ekspor juga didukung oleh pengembangan sektor pariwisata

20,1 -21,2

Share Industri Manufaktur 2024  
(Persen PDB)

5,8 – 7,4

Pertumbuhan Industri Manufaktur Non Migas  
2020-2024 (Rata-Rata, Persen)

11,1 -12,8

Pertumbuhan Ekspor Non Migas  
2020-2024 (Rata-Rata, Persen)

26,0 – 30,0

Jumlah Wisman 2024  
(Juta Orang)

31,2 – 40,5

Devisa Pariwisata 2024  
(USD miliar)

59,6 – 68,4

Share Ekspor Manufaktur thd  
Total Ekspor 2024 (Persen)

## STABILITAS EKSTERNAL YANG KUAT

147,8 - 171,7

Cadangan Devisa 2024 (USD Miliar)

2,5 – 1,7

Defisit Transaksi Berjalan 2024 (Persen PDB)

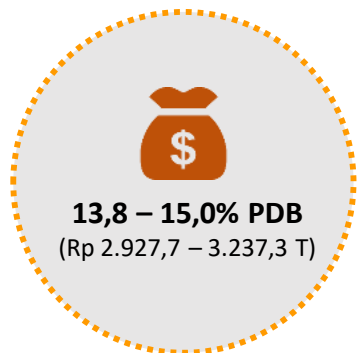
Keterangan:

Rata-rata pertumbuhan (Persen)

2015-2018

2020-2024  
(rendah tinggi)

## MOBILISASI PENDAPATAN NEGARA



**Penerimaan  
Perpajakan**

**12,0 - 13,0% PDB**  
(Rp2.551,5 – 2.807,9 T)

**PNBP**

**1,8-2,0% PDB**  
(Rp 373,6 – 426,7 T)

**Hibah**

**0,0-0,0% PDB**  
(Rp 2,7 – 2,7 T)

## PENAJAMAN BELANJA NEGARA



**Belanja Pemerintah  
Pusat**

**10,0-10,4% PDB**  
(Rp 2.109,8 – 2.235,1 T)

**Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa**

**6,0-6,6% PDB**  
(Rp 1.280,4 – 1.427,5 T)

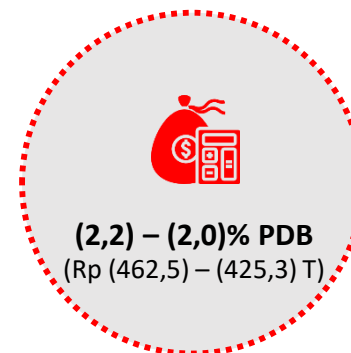
**Belanja K/L**

**5,6–6,0% PDB**  
(Rp 1.185,2 – 1.299,6 T)

**Belanja Non K/L**

**4,4 - 4,4% PDB**  
(Rp 924,6 – 935,5 T)

## PEMBIAYAAN



**Primary Balance**

**(0,5) - (0,3) % PDB**  
(Rp (95,7) – (62,1) T)

**Defisit**

**(2,2) – (2,0) % PDB**  
(Rp (462,5) – (425,3) T)

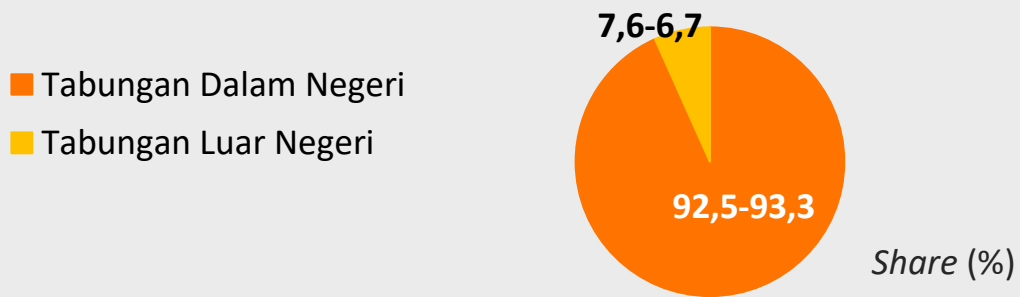
**Rasio Utang**

**29,6 – 28,8% PDB**

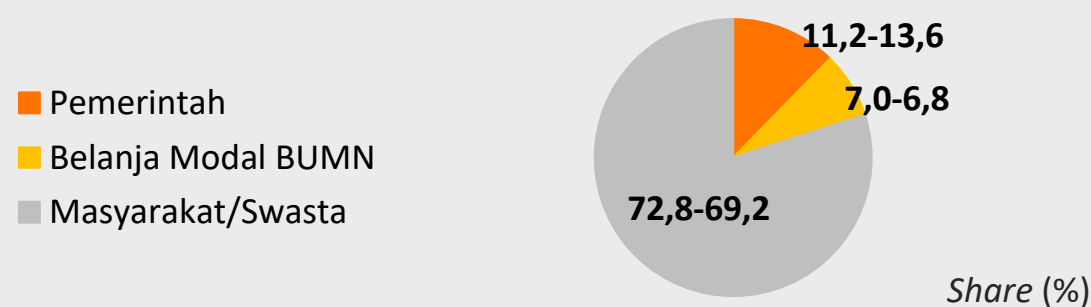
\*) Rata-rata 5 tahunan  
Skenario Low dan Skenario High

# Kebutuhan Investasi dan Pembiayaannya

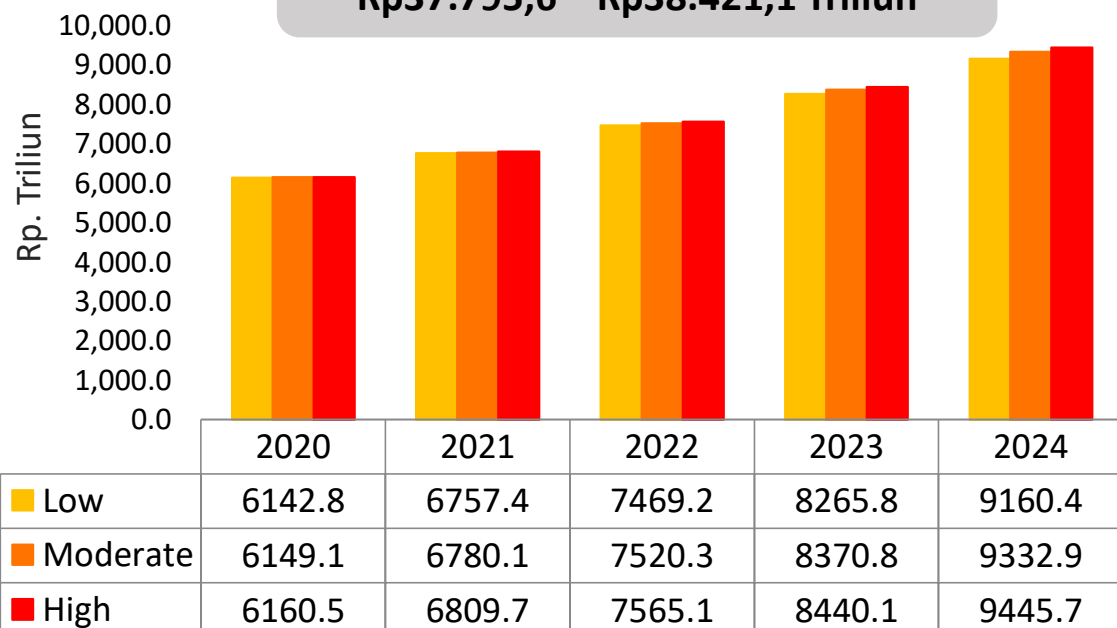
## Sumber Pembiayaan



## Pemenuhan Kebutuhan Investasi



## Total Kebutuhan Investasi 2020-2024 Rp37.795,6 – Rp38.421,1 Triliun



## Instrumen Pembiayaan

